BERITA DAERAH
KOTA SUKABUMI



TAHUN 2026 NOMOR 30

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 6 AGUSTUS 2026

NOMOR : 30 TAHUN 2026

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2026

SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2026;

jdih.sukabumikota.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

5. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

jdih.sukabumikota.go.id

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 73);

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 75);

jdih.sukabumikota.go.id

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

jdih.sukabumikota.go.id

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat P-RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Daerah Kota Sukabumi untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

jdih.sukabumikota.go.id

13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

P-RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar perangkat daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.

Pasal 3

(1) P-RKPD ini menguraikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan serta menjadi landasan penyusunan perubahan KUA-PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

(2) P-RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
a. pendahuluan;
b. evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD Sampai dengan Triwulan I (satu) tahun berkenaan;
c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
f. penutup.

(3) Uraian secara rinci P-RKPD dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 4

P-RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

a. pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b. pedoman dalam rangka penyusunan Perubahan KUA-PPAS;
c. pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026; dan
d. pedoman penyusunan perubahan RKA-PD.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

jdih.sukabumikota.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 6 Agustus 2026

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 6 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ANDANG TJAHJANDI

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2026 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,

YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

jdih.sukabumikota.go.id

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 30 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. Kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu, berjenjang, dan berkesinambungan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam tiga horizon waktu, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD yang memuat prioritas pembangunan daerah, sasaran pembangunan, kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, program dan kegiatan perangkat daerah beserta target kinerja dan indikasi pendanaannya.

RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025–2029. Dalam pelaksanaannya, dinamika pembangunan, perubahan kondisi ekonomi, sosial, fiskal, serta perkembangan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memengaruhi asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RKPD.

Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian melalui penyusunan Perubahan RKPD agar arah pembangunan tetap relevan terhadap perkembangan kondisi aktual. Ketentuan mengenai perubahan RKPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi awal dengan perkembangan keadaan, perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, perubahan prioritas pembangunan, maupun kondisi lain yang berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan beberapa kondisi yang memerlukan penyesuaian kebijakan pembangunan. Beberapa indikator makro pembangunan masih memerlukan perhatian, khususnya Indeks Gini yang masih menunjukkan tingkat ketimpangan relatif tinggi serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat dan nasional. Selain itu, masih terdapat indikator kinerja utama kepala daerah yang belum menunjukkan capaian sesuai target, realisasi anggaran sejumlah perangkat daerah yang relatif rendah terutama pada program yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi, maupun kegiatan infrastruktur, serta capaian indikator output dan outcome yang masih memerlukan percepatan pelaksanaan.

Di sisi lain, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit, Pemerintah Kota Sukabumi memperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang harus dimanfaatkan melalui mekanisme Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan SiLPA, baik yang bersifat diarahkan maupun tidak diarahkan, memerlukan penyesuaian terhadap program, kegiatan, serta alokasi pendanaan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 juga dilakukan sebagai bentuk penyelarasan terhadap visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025–2029, sekaligus mendukung implementasi prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Penyesuaian tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai agenda strategis nasional, antara lain penguatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, Program Makan Bergizi Gratis, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, Perubahan RKPD Tahun 2026 tetap diarahkan untuk mendukung tema pembangunan daerah, yaitu "Menguatkan Pembangunan Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan." Tema tersebut selaras dengan arah pembangunan Provinsi Jawa Barat maupun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 yang menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, dokumen Perubahan RKPD mempunyai nilai penting, antara lain:

1. merupakan instrumen pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2025–2029;
2. menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah;
3. mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2025–2029;
4. menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) dalam penyusunan Rancangan perubahan APBD Kota Sukabumi Tahun 2025; dan
5. menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada Perubahan RKPD.

Dengan demikian, RKPD dan Perubahannya mempunyai fungsi pokok:

1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RPAPBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan Kota Sukabumi satu tahun; dan

3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Seluruh dokumen perencanaan perubahan, nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran perubahan yang tentunya akan disempurnakan melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan keuangan sehingga menjadi dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026 adalah sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah yang merupakan penyesuaian atas pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025–2029, guna merespons dinamika perkembangan kondisi daerah serta kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta Rancangan Perubahan APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2026.
2. Menjamin keterpaduan, konsistensi, dan kesinambungan antara RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025–2029 dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan.
3. Menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Tahun 2026 sesuai prioritas pembangunan daerah.
4. Mengoptimalkan pencapaian target indikator kinerja pembangunan daerah melalui penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan, serta pendanaan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
5. Menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah terhadap perkembangan kondisi ekonomi, sosial, fiskal, regulasi, dan kebijakan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat.

7. Menjadi dasar pelaksanaan monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

1.3 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 73);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 75);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 79).

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Penyusunannya dilaksanakan secara terpadu, berjenjang, dan berkesinambungan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. Keterpaduan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan antara dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Dalam konteks tahapan perencanaan daerah, Perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026 memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen penjabaran serta pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjembatani antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran operasional tahunan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2025–2029, Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, Program Strategis Nasional, serta pedoman penyusunan RKPD yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan demikian, arah kebijakan, sasaran, prioritas pembangunan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang dimuat dalam Perubahan RKPD tetap selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, sekaligus mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah.

Hubungan antara Perubahan RKPD dengan RPJMD berfungsi untuk mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan jangka menengah secara terukur. Dengan demikian, seluruh penyesuaian arah kebijakan, prioritas pembangunan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang dimuat dalam Perubahan RKPD tetap berada dalam koridor pencapaian visi dan misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Perubahan RKPD selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026. Dokumen Perubahan Renja tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, terdapat keterkaitan yang erat antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen penganggaran daerah sehingga tercipta konsistensi dalam pelaksanaan pembangunan.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 yang menunjukkan adanya perkembangan kondisi yang berbeda dengan asumsi pada saat penyusunan RKPD awal.

Perubahan tersebut meliputi perkembangan prioritas pembangunan daerah, kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan daerah, penyesuaian terhadap target indikator kinerja, program, kegiatan, subkegiatan, pagu anggaran, lokasi kegiatan, maupun kelompok sasaran. Selain itu, perubahan juga mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hasil evaluasi kinerja pembangunan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan kapasitas fiskal daerah. Perubahan ini mencakup penyesuaian terhadap:

a. Penyelarasan Target Kinerja: Penyesuaian indikator dan target kinerja pembangunan daerah, program, kegiatan, dan subkegiatan agar lebih realistis dan adaptif terhadap perkembangan isu strategis serta capaian kinerja terkini.
b. Penyelarasan Pendanaan dan Kapasitas Fiskal: Penyesuaian pagu anggaran, lokasi kegiatan, serta kelompok sasaran yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan daerah.
c. Kolaborasi Sumber Pendanaan: Mengoptimalkan berbagai potensi pendanaan secara terpadu, baik yang bersumber dari APBD Kota Sukabumi, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN, Pinjaman Daerah, Dana Masyarakat/Umat, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), maupun Corporate Social Responsibility (CSR) / Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Melalui keterpaduan antar dokumen perencanaan tersebut, Perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026 diharapkan mampu mewujudkan sinkronisasi antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kota Sukabumi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025–2029.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2026 disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, landasan hukum, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan dokumen.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2026

Bab ini menguraikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, meliputi capaian indikator makro pembangunan daerah, realisasi program dan kegiatan, capaian indikator kinerja daerah, kondisi pelayanan publik, serta berbagai permasalahan dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan pembangunan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat analisis perkembangan ekonomi daerah, proyeksi ekonomi makro, arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, serta kemampuan keuangan daerah sebagai dasar penyusunan perubahan kebijakan pembangunan.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan, arah kebijakan pembangunan, serta penyesuaian target dan indikator kinerja berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dan perkembangan kondisi strategis daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat perubahan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target capaian, lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, serta indikasi pendanaan yang menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi simpulan serta penegasan mengenai fungsi Perubahan RKPD sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, sekaligus sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Kota Sukabumi sampai dengan akhir Tahun 2026.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2026

Evaluasi pembangunan daerah pada buku ini menjelaskan tentang indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi atau kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Hasil Evaluasi akan memberikan pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi pembangunan daerah melalui merupakan data dan informasi yang menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD Tahun berjalan sebagai bahan acuan.

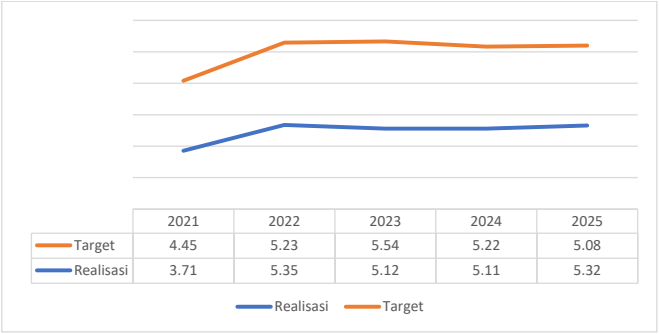
2.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

2.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Sukabumi tahun 2020 sempat mengalami kontraksi sebesar 1,48 persen jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,49 persen. Kontraksi tersebut merupakan dampak dari pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Akan tetapi di tahun 2021 LPE kembali naik di angka 3,71 persen dan meningkat kembali menjadi 5,35 persen di tahun 2022. Keberhasilan pengendalian pandemi, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal oleh pemerintah serta sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi.

Gambar 2.1 LPE Kota Sukabumi Tahun 2021-2025 (Persen)



Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2026 (diolah)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Sukabumi mengalami percepatan, di mana ekonomi tumbuh sebesar 5,32 % pada 2025, meningkat dibandingkan capaian keseluruhan tahun 2024 yang berada di angka 5,11%. Angka ini menunjukkan bahwa Kota Sukabumi masih berada dalam tren pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Lapangan usaha dengan laju pertumbuhan dominan tampak berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2021, lapangan usaha M, N (Jasa Perusahaan) mencatat pertumbuhan tertinggi. Sementara pada tahun 2022, sektor R, S, T, U (Jasa Lainnya) menjadi yang tertinggi dibanding sektor lain. Untuk tahun 2023, sektor H (Transportasi) mengalami pertumbuhan paling signifikan.

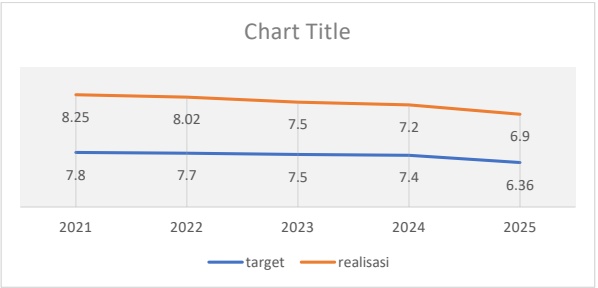
Meskipun memiliki luas wilayah yang kecil, keterbatasan sumber daya alam, serta jumlah lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja yang masih perlu ditingkatkan, Kota Sukabumi tetap menunjukkan kinerja ekonomi yang baik. Hal ini terlihat dari LPE Kota Sukabumi yang lebih tinggi dibanding LPE Provinsi Jawa Barat dan Nasional pada tahun 2024 dan 2025.

Tahun 2021 menjadi tahun resiliensi dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. Pemerintah Kota Sukabumi telah menjalankan berbagai kebijakan dan program untuk memulihkan ekonomi, seperti strategi pengeluaran pemerintah (*government spending strategy*), serta upaya meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat yang mendorong investasi dan kapasitas fiskal. Stabilitas pertumbuhan ekonomi hingga 2025 mencerminkan keberlanjutan upaya pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi daerah.

A. Pengentasan Kemiskinan

Penduduk miskin Kota Sukabumi tahun 2025 sekitar 23.170 ribu jiwa atau 7,20 persen dari keseluruhan jumlah penduduk. Persentase penduduk miskin di Kota Sukabumi pada tahun 2025 tercatat sebesar 6,90% dari total populasi, mengalami penurunan sebesar 0,30% dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 7,20%.

Gambar 2. 2 Tingkat Kemiskinan Kota Sukabumi Tahun 2021-2025 (Persen)



Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2026 (diolah)

Capaian penurunan kemiskinan di Kota Sukabumi tahun 2024 lebih baik jika dibandingkan tahun 2023. Adapun penurunan kemiskinan yang dicapai tersebut tidak lepas dengan geliat ekonomi yang terjadi pasca Covid-19. Penurunan kemiskinan di Kota Sukabumi tahun 2024 tersebut masih lebih baik jika dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

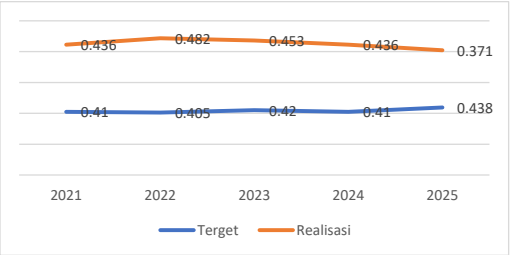
Kemiskinan di Kota Sukabumi perlu untuk terus dikurangi dengan meningkatkan akses masyarakat miskin ke pendidikan, kesehatan, dan layanan air bersih serta sanitasi. Pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan juga perlu untuk ditingkatkan. Selain itu, perlunya peningkatan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Jika hal-hal itu dilaksanakan secara tepat sasaran, penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi tentunya dapat mencapai hasil yang optimal.

B. Pengurangan Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol

(pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Indeks Gini Kota Sukabumi dalam 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif.

Gambar 2. 3 Indeks Gini Kota Sukabumi Tahun 2021-2025 (Poin)



Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2026 (diolah)

Meskipun LPE Kota Sukabumi tahun 2025 mencapai 5,32 persen, namun Indeks Gini berkurang secara signifikan. Indeks Gini (Gini Ratio) Kota Sukabumi pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,371, yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran dalam kategori rendah Capaian angka tersebut merupakan hasil tren perbaikan yang positif, mencerminkan adanya pemerataan dalam distribusi pendapatan atau pengeluaran masyarakat di wilayah Kota Sukabumi. Semakin rendah Indeks Gini mendekati angka 0, maka ketimpangan ekonomi antar warga semakin kecil dan distribusi kekayaan semakin merata Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta merta.

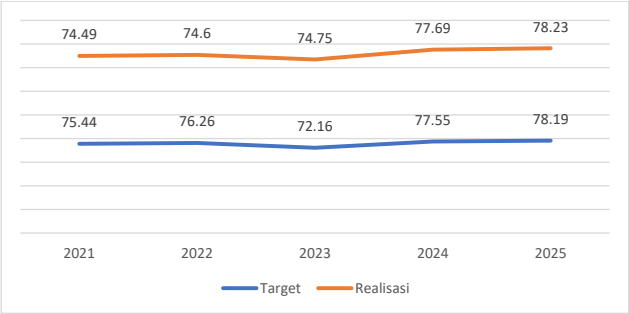
Indeks Gini Kota Sukabumi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2025 menunjukkan bahwa ketimpangan di Kota Sukabumi masih di atas Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Sukabumi masih menghadapi permasalahan seperti konsentrasi kekayaan yang hanya dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat, kesenjangan produktivitas tenaga kerja, akses ekonomi bagi masyarakat miskin masih terbatas, dan masyarakat masih mengalami kesenjangan dalam menghadapi situasi yang tak terduga seperti adanya Covid-19.

C. Peningkatan Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat pembangunan dalam jangka panjang. Di mana untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan. Kedua aspek itu, yakni kecepatan dan status pencapaian. Pertumbuhan nilai IPM antar waktu akan menunjukkan kecepatan pembangunan yang terjadi sebagai cerminan atas upaya yang dilakukan untuk meningkatkan

pembangunan manusia. Sementara status pencapaian IPM merefleksikan tingkatan pencapaian pembangunan manusia dalam satu periode.

Gambar 2. 4 IPM Kota Sukabumi Tahun 2021-2025 (Poin)



IPM Kota Sukabumi di tahun 2025 masuk dalam kategori tinggi (interval 70-79 poin). Naik cukup signifikan sekitar 0,54 poin dari 77,69 di tahun 2024 menjadi 78,23 di tahun 2025. Kenaikan IPM terjadi pada semua komponen yaitu usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan.

Tabel 2. 1 Komponen IPM Kota Sukabumi Tahun 2021-2025

INDIKATOR	SATUAN	2021	2022	2023	2024	2025
Usia Harapan Hidup	Tahun	74,38	74,64	74,89	75,11	75.45
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,58	13,59	13,60	13,62	13,63
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,81	10,14	10,37	10,38	10,39
Rata-rata Pengeluaran per Kapita sebulan	Ribu Rupiah	10.942	11.229	11.999	12.252	12.692
IPM	Indeks	75,44	76,24	77,16	77,69	78.23

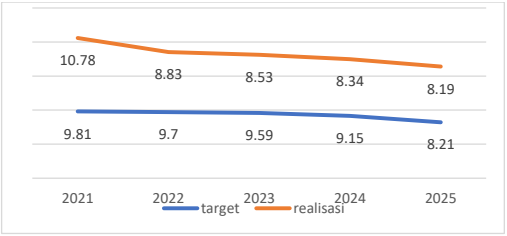
Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2026

Jika dilihat perkembangan dari tahun 2021-2025, IPM Kota Sukabumi masih lebih baik jika dibandingkan IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Di antara kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat, IPM Kota Sukabumi tahun 2025 berada di peringkat 7. Namun jika dilihat hanya kategori kota, dari 9 kota di Provinsi Jawa Barat, peringkat IPM Kota Sukabumi hanya lebih baik dari IPM Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar. IPM Kota Sukabumi masih bisa lebih baik lagi asalkan 4 komponen pembentuk IPM diintervensi dengan tepat dan dilaksanakan oleh lintas urusan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sukabumi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,15 persen dari 8,34 persen (14.619 jiwa) di tahun 2024 menjadi 8,19 persen (14.547 jiwa) di tahun 2025.

Angka tersebut juga melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,06 persen. Menurunnya TPT Kota Sukabumi tidak lepas dari aktivitas perekonomian yang makin menggeliat dan dibarengi dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja khususnya di sektor tersier (perdagangan, angkutan dan komunikasi, keuangan, dan jasa).

Gambar 2. 5 TPT Kota Sukabumi Tahun 2021-2025 (Persen)



Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2026 (diolah)

Meskipun TPT Kota Sukabumi mengalami penurunan, namun TPT Kota Sukabumi di tahun 2025 masih berada di atas angka TPT Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat permasalahan di Kota Sukabumi seperti jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja serta belum terintegrasinya antara kebutuhan dunia usaha dengan kemampuan tenaga kerja.

2.1.1.2 PERLINDUNGAN SOSIAL

Kondisi perlindungan sosial menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik. Perlindungan sosial di Kota Sukabumi salah satunya tercermin dari jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan yang sudah mencapai 100 persen dengan kepesertaan aktif mencapai 80 persen di tahun 2025. Fokus selanjutnya adalah menjaga keaktifan peserta, memperbaiki sistem pendataan, dan meningkatkan pelayanan agar UHC tetap bermakna dalam kehidupan masyarakat.

2.1.1.3 KESEHATAN UNTUK SEMUA

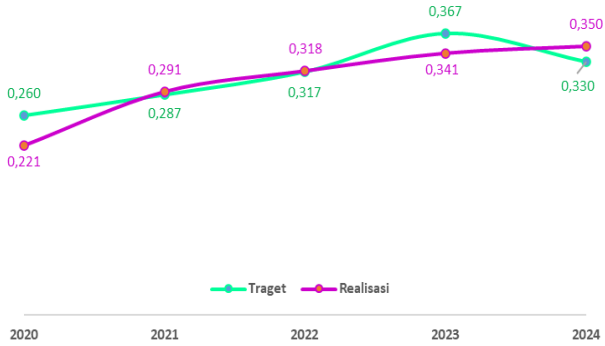
A. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu fokus capaian pembangunan nasional di bidang kesehatan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat melalui program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Keluarga sehat adalah fondasi masa depan bangsa yang gemilang.

Menurut WHO, keluarga sehat berarti keluarga dengan kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual yang optimal. Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) telah menetapkan 12 IKS. Dengan menerapkan 12 indikator keluarga sehat menurut Kemenkes, maka diharapkan banyak dari keluarga yang ada di Indonesia memiliki standar kesehatan yang optimal.

Secara umum status kesehatan keluarga di Kota Sukabumi cenderung mengalami perbaikan. Hal ini juga tercermin dengan jumlah keluarga tidak sehat dan pra sehat yang berkurang. Selain itu, meningkatnya pelayanan puskesmas juga menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan IKS. Untuk lebih meningkatkan IKS perlu dilakukan penguatan, pendampingan dan pemantauan terhadap puskesmas yang belum mencapai target, penguatan kerja sama tim lintas program, dan optimalisasi keterlibatan berbagai pihak seperti institusi pendidikan, organisasi profesi ataupun pihak swasta.

Gambar 2. 6 Indeks Keluarga Sehat Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (poin)



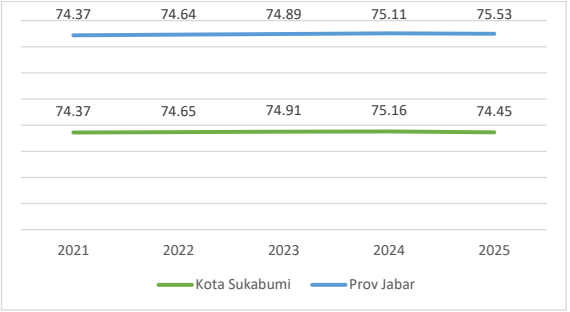
Sumber: Dinkes Kota Sukabumi, 2026 (diolah)

B. Peningkatan Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH di Kota Sukabumi

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat dan mencapai angka 74,45 di tahun 2025.

Gambar 2. 7 UHH Kota Sukabumi Tahun 2021-2025 (Tahun)



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2026 (diolah)

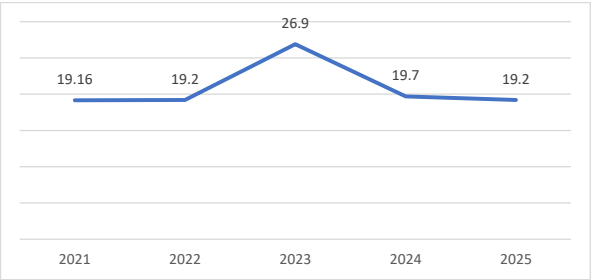
Semakin membaiknya derajat kesehatan masyarakat Kota Sukabumi yang ditunjukkan dengan UHH merupakan salah satu indikator yang menentukan IPM. Hal ini juga menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan kualitas kesehatan penduduk utamanya pada kalangan bayi, balita, wanita berusia subur, dan lansia.

Meskipun capaian UHH Kota Sukabumi cenderung meningkat setiap tahun, namun masih di bawah UHH Provinsi Jawa Barat. Karena itu, upaya untuk lebih meningkatkan UHH Kota Sukabumi perlu terus dilakukan. Upaya tersebut seperti dengan meningkatkan kemudahan mengakses sarana prasarana kesehatan, peningkatan kualitas asupan gizi, serta berkurangnya angka warga yang sakit.

C. Penanganan Stunting

Untuk menciptakan generasi unggul, permasalahan kesehatan salah satunya stunting, harus ditangani dengan serius. Stunting telah menjadi agenda pembangunan nasional dalam beberapa tahun terakhir. Angka persentase stunting yang tinggi menunjukkan adanya masalah serius dalam pemenuhan gizi pada anak-anak. Stunting pada dasarnya terjadi diakibatkan berbagai macam faktor tidak hanya persoalan gizi semata. Faktor lainnya disebabkan oleh usia dini pernikahan, lingkungan yang tidak sehat hingga pola asuh terhadap anak.

Gambar 2. 8 Prevalensi Stunting Kota Sukabumi Tahunb 2021-2025 (persen)



Sumber: Kemenkes, 2026 (diolah)

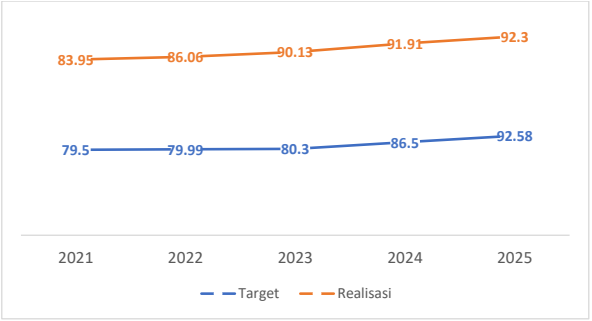
Stunting di Kota Sukabumi yang cenderung meningkat memerlukan kesadaran kolektif, saling kolaborasi dari semua pihak, penyusunan strategi yang tepat komprehensif, dan bergerak dengan cepat turun ke wilayah berisiko. Beberapa hal yang menjadi tantangan penanganan stunting seperti balita (bayi di bawah usia lima tahun) dan baduta (bayi di bawah usia dua tahun) tumbuh di dalam keluarga perokok aktif, sanitasi yang tidak layak, lingkungan rumah yang kumuh dengan ventilasi dan cahaya matahari buruk, serta pola makan yang belum dapat dikategorikan sebagai makanan sehat dan bergizi berimbang.

Untuk itu, upaya percepatan penurunan stunting melalui optimalisasi cakupan intervensi berbasis bukti perlu terus dilakukan. Salah satunya dengan memastikan warga mendapatkan asupan gizi terbaik dan dalam pendataan terdeteksi tidak ada masalah. Selain itu, upaya kolaborasi dengan intervensi kasus secara tepat akan mempercepat penurunan stunting di Kota Sukabumi.

D. Peningkatan Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif maka diperlukan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam, bergizi, seimbang, aman dan halal (B2SAH) dalam jumlah dan komposisi yang cukup. Semakin mendekati skor ideal (maksimum 100), semakin baik kualitas pola konsumsi pangan masyarakat.

Gambar 2. 9 Skor Pola Pangan Harapan Kota Sukabumi Tahun 2021-2925 (poin)



Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2026 (diolah)

Skor PPH Kota Sukabumi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2025, Skor PPH-nya mencapai 92,3 poin yang artinya bahwa kualitas pola konsumsi pangan masyarakat berada pada kategori sangat baik (ideal).

Upaya untuk menjaga dan meningkatkan Skor PPH Kota Sukabumi perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan menyusun analisis PPH Konsumsi, pelatihan pengolahan pangan lokal, distribusi bibit/benih tanaman hortikultura yang mendukung peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan, pelatihan teknologi *urban farming* yang mendukung peningkatan ketahanan pangan daerah, sosialisasi gerakan konsumsi pangan B2SAH, pembinaan/fasilitasi dalam rangka pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan ketahanan pangan, subsidi harga pada acara Gelar Pangan Murah Kota Sukabumi, subsidi harga dan dipasarkan melalui PMT (Pasar Mitra Tani), rapat koordinasi distribusi pangan, vaksinasi pada Hewan Penular Rabies (HPR) dan AI untuk mencegah penularan zoonosis, dan fasilitasi pelaku olahan hasil perikanan.

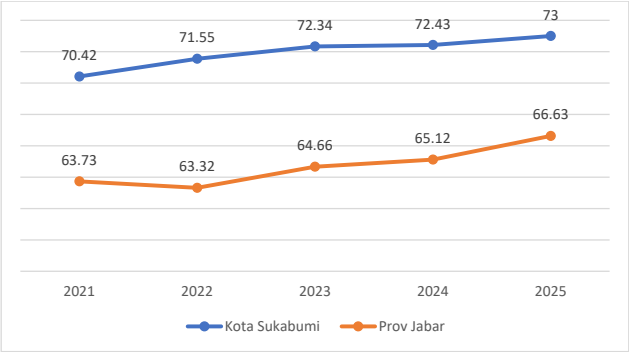
2.1.1.4 PENDIDIKAN BERKUALITAS DAN MERATA

A. Perluasan Akses Pendidikan

Indeks Pendidikan adalah salah satu komponen yang menyusun IPM. Indeks Pendidikan terdiri dari komponen Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Jika dibandingkan dengan Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran, Indeks Pendidikan Kota Sukabumi termasuk terendah. Di mana kedua indeks lainnya berada di atas angka 80.00 poin.

Jika dilihat trennya, Indeks Pendidikan Kota Sukabumi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kenaikan ini berkorelasi dengan variabel pembentuknya yaitu RLS dan HLS. RLS Kota Sukabumi pada tahun 2024 adalah 10,38. Artinya rata-rata masyarakat Kota Sukabumi pendidikan terakhirnya adalah setara dengan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat.

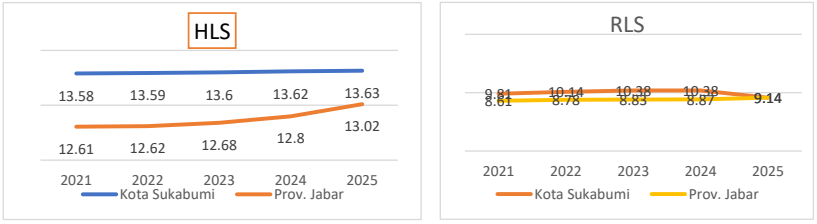
Gambar 2. 10 22 Indeks Pendidikan Kota Sukabumi Tahun 2021-2025 (Tahun)



Sumber BPS Provinsi Jawa Barat, 2026 (diolah)

Sementara itu, HLS Kota Sukabumi pada tahun 2025 mencapai 13,63 tahun, meningkat 0,02 poin dari angka HLS tahun 2024. Angka HLS sebesar 13,63 tahun menunjukkan bahwa harapan lama sekolah anak di Kota Sukabumi sudah masuk pada jenjang pendidikan tinggi. Kondisi demikian menunjukkan bahwa kinerja urusan pendidikan sudah makin membaik.

Gambar 2. 11 RLS dan HLS Kota Sukabumi Tahun 2021-2025 (Tahun)



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2026

Untuk lebih meningkatkan Indeks Pendidikan di Kota Sukabumi tentunya harus ditingkatkan juga RLS dan HLS. Peningkatan akses dan mutu pendidikan menjadi kunci yang sangat penting untuk meningkatkan angka Indeks Pendidikan.

Karena itu, upaya yang perlu dilakukan antara lain pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar formal maupun nonformal/kesetaraan, bantuan bagi siswa-siswi yang kurang mampu, dan pemberdayaan satuan pendidikan nonformal berbasis kemasyarakatan. Jika hal-hal tersebut dilakukan dengan tepat maka Indeks Pendidikan Kota Sukabumi akan tetap berada di atas Indeks Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

B. Peningkatan Mutu Pendidikan

Literasi/numerasi adalah komponen Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif dalam masyarakat. Literasi merupakan kemampuan peserta didik untuk memahami, menggunakan, merefleksi dan berinteraksi dengan teks tulis agar seseorang mampu meraih tujuan pribadi, mengembangkan pengetahuan dan potensinya sehingga mampu beradaptasi sebagai masyarakat.

Dari Rapor Pendidikan Kota Sukabumi, rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional menunjukkan peningkatan dan masuk dalam kategori BAIK. Itu artinya sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.

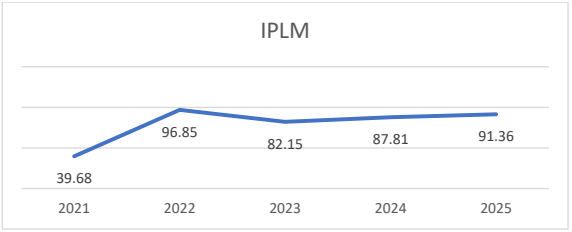
Tabel 2. 2 Rata-rata Kemampuan Literasi/Numerasi Siswa

URAIAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
	Literasi	Numerasi	Literasi	Numerasi	Literasi	Numerasi
Sekolah Dasar	48.55	34,88	53.67	38.27	56.6	41.54
Sekolah Menengah Pertama	59.24	53.20	68.64	55.98	69.92	57.83

Sumber: Rapor Pendidikan Kota Sukabumi, 2024

Numerasi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Rapor Pendidikan Kota Sukabumi seperti pada tabel di atas, rata-rata kemampuan numerasi siswa Kota Sukabumi berdasarkan hasil asesmen Nasional menunjukkan tren meningkat dan masuk dalam kategori SEDANG. Itu artinya 40-70 persen peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi.

Gambar 2. 12 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Sukabumi Tahun 2021-2025 (poin)



Sumber: Perpusnas, 2026 (diolah)

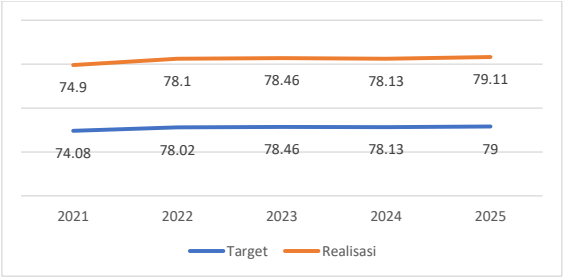
Seiring meningkatnya literasi/numerasi peserta didik, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Sukabumi juga menunjukkan hasil yang makin membaik meskipun di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Permasalahan pembangunan literasi masyarakat di Kota Sukabumi yang perlu terus menjadi perhatian yaitu terkait dengan peningkatan budaya literasi masyarakat di tengah gempuran media sosial, sarana perpustakaan yang belum semuanya ideal, dan terbatasnya pustakawan.

2.1.1.5 BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU

A. Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Agama merupakan landasan penting bagi masyarakat terkait dengan etika dan moral. Idealnya semakin etika dan moral masyarakat membaik kerukunan umat beragama juga turut membaik. Dengan demikian, kerukunan umat beragama dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan. Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang diukur dengan Indeks KUB telah menjadi salah satu indikator capaian pembangunan di Kota Sukabumi dalam beberapa tahun terakhir.

Gambar 2. 13 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Sukami Tahun 2021-2025 (poin)



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2026 (diolah)

Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Sukabumi cenderung mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketenteraman serta mengoptimalkan Forum Kerukunan Umat Beragama.

B. Pengembangan Kebudayaan

Pengembangan kebudayaan di Kota Sukabumi yang ditunjukkan dengan indikator terlestarikannya cagar budaya masih memerlukan peningkatan untuk ke depannya. Meskipun capaiannya menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 yang sebesar 73,33 persen menjadi 100 persen di tahun 2025. Hal ini penting sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap warisan budaya yang mewarnai perkembangan Kota Sukabumi hingga seperti sekarang ini. Selain itu, pelestarian ini juga untuk menunjang perkembangan wisata budaya.

Saat ini, terdapat 21 objek diduga cagar budaya di Kota Sukabumi yang sedang dikaji, dan tiga di antaranya (Balai Kota, Rumah Pengasingan Bung Hatta, dan Gereja Sidang Kristus) dalam proses penetapan. Proses ini menunjukkan adanya keseriusan Kota Sukabumi dalam meningkatkan nilai warisan budaya, yang merupakan bagian penting dari indeks warisan budaya.

Untuk mengembangkan kebudayaan secara komprehensif, Kota Sukabumi perlu bertindak pada lima level Utama, yaitu penguatan kebijakan dan hukum, peningkatan pendidikan dan regenerasi, peningkatan pelestarian dan digitalisasi, peningkatan ekspresi dan event budaya, serta pengembangan ekonomi kreatif dan teknologi. Dengan dukungan lintas sektor (pemerintah, komunitas, sekolah, pelaku budaya, dan swasta), budaya lokal Kota Sukabumi tidak hanya lestari tapi juga menjadi pilar ekonomi dan jati diri kota.

2.1.1.6 KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF

A. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak.

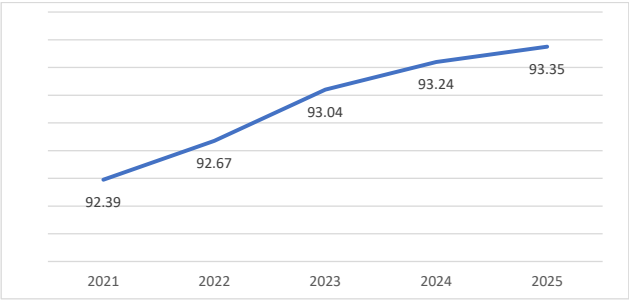
Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, IPA di Kota Sukabumi tahun 2022 yaitu 65,70. Angka ini termasuk terendah jika dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat. Jika ditelusuri per kluster, dari 5 kluster yang ada terdapat 2 kluster nilainya yang masih rendah yaitu kluster hak sipil dan kebebasan (48,00) dan kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya (41,13).

Untuk meningkatkan upaya perlindungan anak di Kota Sukabumi diperlukan pelaksanaan strategi yang dibarengi pelaksanaan program/kegiatan yang lebih disesuaikan dengan karakteristik wilayah (level kecamatan). Kebutuhan akan pemenuhan dan perlindungan anak antara satu wilayah dengan wilayah lain tentunya akan berbeda. Karena itu, intervensi yang berbeda-beda sesuai karakteristik wilayah diharapkan lebih tepat sasaran dalam memenuhi dan melindungi anak.

B. Peningkatan Kualitas Keluarga

Pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dapat tercermin dari iBangga. Hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang, dan rentan.

Gambar 2. 14 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Sukabumi Tahun 2021-2025 (poin)



Sumber: BKKBN, 2026 (diolah)

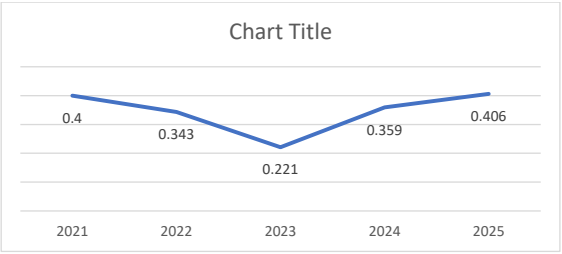
Bangga Kota Sukabumi tahun 2025 sebesar 93.35, menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 93.24. Dengan angka tersebut, Kota Sukabumi masuk dalam kategori “berkembang”. Perlu dilakukan upaya intervensi terhadap tiga dimensi pembentuknya agar capaiannya dapat meningkat menjadi “tangguh”.

C. Peningkatan Kesetaraan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki.

Tren IPG di Kota Sukabumi menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. IPG Kota Sukabumi tahun 2025 sebesar 93,35 poin. Ini berarti bahwa pembangunan antara perempuan dengan laki-laki di Kota Sukabumi semakin mendekati setara (setara jika nilai IPG 100). Perkembangan IPG Kota Sukabumi dari tahun ke tahun juga masih lebih baik dari capaian IPG Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Gambar 2. 15 IKG 2021-2025 (Poin)



Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2026 (diolah)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. IKG Kota Sukabumi tahun 2024 menunjukkan hasil yang baik yaitu 0,359 yang artinya masuk dalam kategori rendah. Namun pada tahun 2025, IKG Kota Sukabumi menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan sebesar 0.406.

Mencermati kondisi di atas, upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pengarusutamaan gender di Kota Sukabumi supaya lebih baik salah satunya yaitu dengan mengoptimalkan peran posyandu atau kader posyandu menyusuri rumah warga, *Homecare* atau perawat yang di tempatkan di 33 kelurahan untuk mendatangi rumah warga yang alami gangguan kesehatan, dan lainnya.

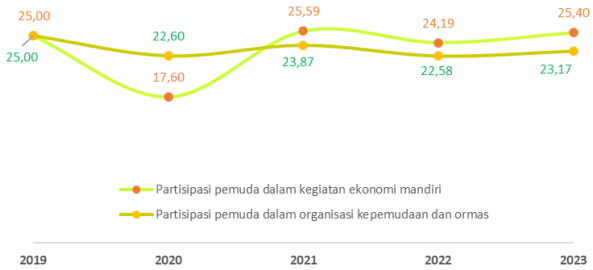
D. Pengembangan Kepemudaan

Peran pemuda sering dikaitkan dengan kemajuan suatu bangsa dan pemuda menjadi komponen penting yang perlu dilibatkan dalam pembangunan.

Hal ini dikarenakan generasi muda memiliki fisik yang kuat, pengetahuan yang baru, inovatif dan juga memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Pemuda itu sendiri adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Tingkat partisipasi pemuda Kota Sukabumi dalam pembangunan menunjukkan angka di atas 20 persen dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tingkat partisipasi tersebut mencakup dalam kegiatan ekonomi mandiri serta organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan. Mengingat jumlah pemuda di Kota Sukabumi saat ini jumlahnya paling besar maka upaya optimalisasi peran pemuda dalam pembangunan perlu menjadi perhatian. Upaya tersebut meliputi peningkatan partisipasi pemuda dan peningkatan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan.

Gambar 2. 16 Tingkat Partisipasi Pemuda Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 (persen)



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

2.1.2 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.2.1 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

A. Pengurangan Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan atau *dependency ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2. 3 Rasio Ketergantungan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

JUMLAH PENDUDUK	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
0-14	86.687	86.882	87.056	87.402	87.721
15-64	237.199	241.313	245.156	248.291	251.460
>65	20.942	22.609	24.198	24.951	26.374
Rasio Ketergantungan (%)	45,37	45,37	45,38	45,25	45,34

Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

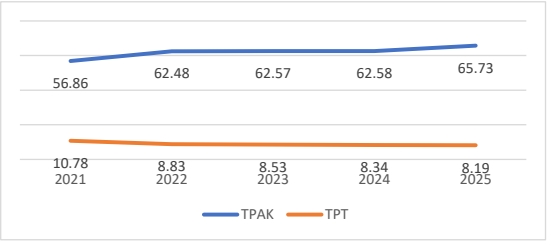
Rasio Ketergantungan Kota Sukabumi pada tahun 2024 sebesar 45,34 persen, di mana setiap 100 orang yang berusia produktif menanggung sebanyak 45 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Hal itu menandakan bahwa Kota Sukabumi sedang memasuki periode terbaik bonus demografi. Melimpahnya penduduk usia produktif tentu harus dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan peluang bagi Kota Sukabumi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM menjadi lebih unggul dan berdaya saing.

B. Peningkatan Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran proporsi penduduk usia kerja suatu daerah yang bergerak aktif di pasar tenaga kerja dan menjadi faktor penting dalam menggerakkan pembangunan. TPAK di Kota Sukabumi cenderung meningkat seiring pemulihan ekonomi pasca Covid-19. TPAK ini berkorelasi dengan TPT, di mana ketika TPAK mengalami peningkatan TPT cenderung menurun.

Jika dicermati lebih dalam, gap antara TPAK laki-laki dengan perempuan di Kota Sukabumi cukup lebar. Tren TPAK laki-laki dalam kurun 5 tahun terakhir selalu di atas 70 persen, sementara TPAK perempuan hanya di bawah 45 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas perekonomian masih kurang.

Gambar 2. 17 TPAK dan TPT Kota Sukabumi Tahun 2021-2025 (Persen)



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2026 (diolah)

Sementara itu, jumlah penduduk Kota Sukabumi yang bekerja pada lapangan usaha utama cenderung mengalami peningkatan. Dari tiga lapangan usaha utama, penduduk Kota Sukabumi banyak bekerja di sektor jasa yaitu mencapai 70,76 persen pada tahun 2025. Hal ini menegaskan bahwa lapangan usaha dominan yang ada di Kota Sukabumi berada pada sektor perdagangan dan jasa.

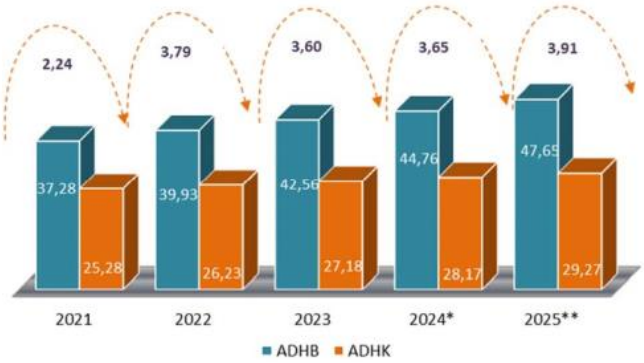
C. Produktivitas Per Kapita

PDRB Per Kapita selain menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah juga menggambarkan produktivitas masyarakatnya. Semakin tinggi produktivitas masyarakat yang ditunjukkan dengan PDRB Per Kapita mencerminkan juga daya saing wilayah tersebut dengan wilayah lainnya.

Secara umum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dapat menjadi salah satu indikator makro dalam mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi domestik dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Oleh karena itu, dinamika pertumbuhan ekonomi maupun fluktuasi jumlah penduduk secara langsung akan memengaruhi nilai nominal maupun riil dari PDRB per kapita tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk pada tahun berjalan. Nilai PDRB per kapita Kota Sukabumi atas dasar harga berlaku sejak tahun 2021 hingga tahun 2025 senantiasa mengalami tren kenaikan yang positif. Pada tahun 2021, PDRB per kapita ADHB tercatat sebesar 37,28 juta rupiah, dan secara nominal terus mengalami peningkatan hingga tahun 2025 (Angka Sangat Sementara) yang mencapai 47,69 juta rupiah. Kenaikan nominal ADHB yang cukup signifikan ini mencerminkan adanya peningkatan volume perputaran uang dan aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan. Namun demikian, angka ini belum sepenuhnya mencerminkan pertumbuhan daya beli atau kondisi kemakmuran riil masyarakat karena di dalamnya masih terdapat pengaruh faktor perubahan harga (inflasi).

Gambar 2. 18 PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Per Kapita ADHK Kota Sukabumi Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2026

Untuk meningkatkan secara signifikan PDRB Per Kapita, upaya-upaya yang dapat dilakukan seperti: meningkatkan nilai output produksi barang dan jasa; meningkatkan efisiensi dan produktivitas barang dan jasa; meningkatkan investasi SDM agar kualitas tenaga kerja semakin meningkat; pengembangan infrastruktur untuk menunjang efisiensi produksi; dan mendorong investasi daerah.

Kondisi tren positif selama periode 2021-2025 ini menjadi modalitas sektoral yang penting dalam menyusun strategi perencanaan jangka menengah, khususnya dalam merumuskan target indikator makro pada dokumen RKPD Tahun 2027. Fokus kebijakan selanjutnya diarahkan pada penguatan efisiensi produksi barang dan jasa, peningkatan kualitas investasi SDM daerah, serta perluasan akses pasar UMKM guna mengonversi pertumbuhan ekonomi makri ini menjadi pemerataan pendapatan yang dapat menekan angka Gini Rasio daerah

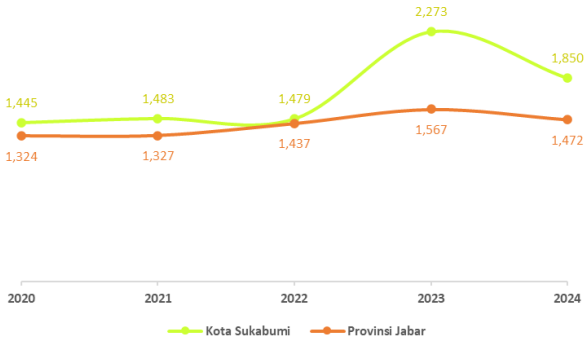
D. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran per kapita masyarakat Kota Sukabumi mengalami penurunan di masa pandemi Covid-19. Seiring dengan membaiknya perekonomian, pengeluaran per kapita masyarakat mengalami kenaikan di tahun 2021 dan sedikit menurun kembali di tahun 2022.

Namun angka tersebut meningkat sebesar 53,61 persen menjadi Rp 2.273.334,- di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Konsumsi masyarakat secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengeluaran konsumsi untuk kelompok makanan dan non makanan. Pada tahun 2023, masyarakat Kota Sukabumi mengalokasikan anggarannya sebanyak 38,86 persen untuk konsumsi makanan dan sebanyak 61,14 persen untuk pengeluaran konsumsi non makanan. Namun pada tahun 2024, menunjukkan hal yang berbeda dimana konsumsi untuk nonmakanan menurun signifikan tetapi konsumsi makan meningkat.

Gambar 2. 19 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

Adapun lima jenis komoditas makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Kota Sukabumi adalah makanan dan minuman jadi, rokok, padi-padian, daging, dan telur dan susu. Sementara kelompok non makanan yang paling banyak dikonsumsi adalah subkelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga serta subkelompok aneka barang dan jasa.

2.1.2.2 IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI

A. Penerapan Inovasi

Inovasi merupakan salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing daerah untuk menghadapi persaingan baik di tingkat regional, nasional, bahkan global. Dalam era global, pembangunan perlu lebih mengedepankan aspek pemanfaatan Iptek dan inovasi sebagai faktor pembentuk daya saing atau disebut dengan *innovation-driven development*.

Pertumbuhan pembangunan perlu digerakkan oleh strategi yang tidak saja semakin efisien, namun mengedepankan inovasi dengan mendayagunakan Iptekin.

Tabel 2. 4 Indeks Inovasi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021-2025

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
Target (persen/predikat)	Terinovatif (≥ 1001)	Terinovatif (≥ 1001)	Terinovatif (≥ 1001)	Terinovatif (≥ 1001)	Terinovatif (≥ 1001)
Capaian (persen/predikat)	Sangat Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber: Bapppeda Kota Sukabumi, 2025

Dalam hal inovasi, Kota Sukabumi masuk dalam kategori sangat inovatif. Pertumbuhan aspek ekosistem inovasi didukung oleh pertumbuhan pilar dinamika bisnis serta pertumbuhan pilar kapasitas inovasi. Meskipun kondisi pilar kesiapan teknologi tidak bertumbuh, namun pertumbuhan pilar bisnis yang signifikan terutama didukung dengan adanya perbaikan pada dimensi kebijakan serta peningkatan dimensi kewirausahaan. Sementara pertumbuhan pilar kapasitas inovasi sangat dipengaruhi oleh dimensi interaksi dan keberagaman dan peningkatan dimensi penelitian dan pengembangan.

B. Peningkatan PDRB

Berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), PDRB Kota Sukabumi pada tahun 2020 sebesar Rp12,401 triliun, meningkat sebesar 32 persen menjadi Rp16,370 triliun di tahun 2024. Adapun distribusi PDRB tertinggi tahun 2024 yaitu dari lapangan usaha perdagangan besar dan eceran (36,83 persen), transportasi dan pergudangan (11,78 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (11,67 persen),.

Dalam konteks Provinsi Jawa Barat, kontribusi PDRB Kota Sukabumi terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berada pada kisaran 0,58 persen. Kontribusi tersebut masih lebih baik jika dibandingkan Kabupaten Pangandaran (0,54 persen) dan Kota Banjar (0,2 persen).

Tabel 2. 5 PDRB ADHB Kota Sukabumi Tahun 2021-2025 (Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	277,05	286,97	307,55	591,88	651.23
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	
Industri Pengolahan	459,55	481,63	503,98	797,66	857.64
Pengadaan Listrik dan Gas	16,99	18,00	18,57	30,69	31.36

LAPANGAN USAHA	2021	2022	2023	2024	2025
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	11,73	19,25	19,83	20,86	21.26
Konstruksi	601,49	943,84	1.041,63	1.112,21	1,186.37
Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi	3.572,48	5.410,49	5.769,43	6.029,76	6,433.07
Transportasi dan Pergudangan	777,52	1.541,49	1.763,39	1.928,34	2,215.47
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	385,49	436,87	483,20	534,30	586.78
Informasi & Komunikasi	556,42	588,91	625,56	653,81	712.37
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.522,25	1.624,98	1.720,80	1.910,78	1,961.81
Real Estate	153,33	169,07	180,11	192,55	208,68
Jasa Perusahaan	228,98	255,45	279,41	296,02	326,79
Administrasi Pemerintah	583,17	580,28	600,15	608,50	620.80
Jasa Pendidikan	585,18	640,08	695,88	753,42	819.17
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	256,39	283,83	308,44	326,02	363.75
Jasa Lainnya	405,09	472,64	531,37	583,60	666.01
TOTAL PDRB	13.053,04	14.192,25	15.349,71	16.370,38	17.662.55

Sumber: Bapppeda Kota Sukabumi, 2025

Tabel 2. 6 PDRB ADHK Kota Sukabumi Tahun 2021-2025 (Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	277,07	286,97	307,55	329,00	7,94
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	
Industri Pengolahan	459,55	481,63	503,98	534,04	3.20
Pengadaan Listrik dan Gas	16,99	18,00	18,57	18,57	2,05
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	11,73	12,47	12,73	13,38	2.03
Konstruksi	601,49	600,60	641,76	680,21	4,63
Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi	3.572,48	3.767,92	3.911,06	4.082,00	3,70
Transportasi dan Pergudangan	777,52	836,52	912,50	997,68	10.61
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	247,78	271,81	293,05	309,67	8.15
Informasi & Komunikasi	534,52	571,97	607,26	635,38	9,38
Jasa Keuangan dan Asuransi	934,62	958,67	990,62	1.020,26	1,76
Real Estate	116,52	123,86	130,72	136,22	6,78
Jasa Perusahaan	145,66	158,96	171,74	181,63	7,43
Administrasi Pemerintah	329,32	328,20	334,99	335,05	1,44
Jasa Pendidikan	344,12	371,97	393,52	413,46	6,85
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	181,55	199,43	210,84	221,95	7,79
Jasa Lainnya	300,15	335,16	360,99	394,66	10,01
TOTAL PDRB	8.851,05	9.324,16	9.801,88	10.303,16	5,32

Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025

Jika dilihat dari lapangan usaha, seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2025. Adapun 3 lapangan usaha mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu transportasi dan pergudangan (9,33 persen), jasa lainnya (9,33 persen) serta pertanian, kehutanan, dan perikanan (6,97 persen).

Secara khusus, terdapat dua lapangan usaha yang menjadi arahan untuk dikembangkan dalam rangka transformasi ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Kedua lapangan usaha itu yaitu industri pengolahan serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Perkembangan kedua lapangan usaha tersebut menunjukkan tren yang terus bertumbuh dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Rasio lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB Kota Sukabumi tahun 2025 yaitu 5,97 persen. Sementara itu, rasio lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB sebesar 5,67 persen.

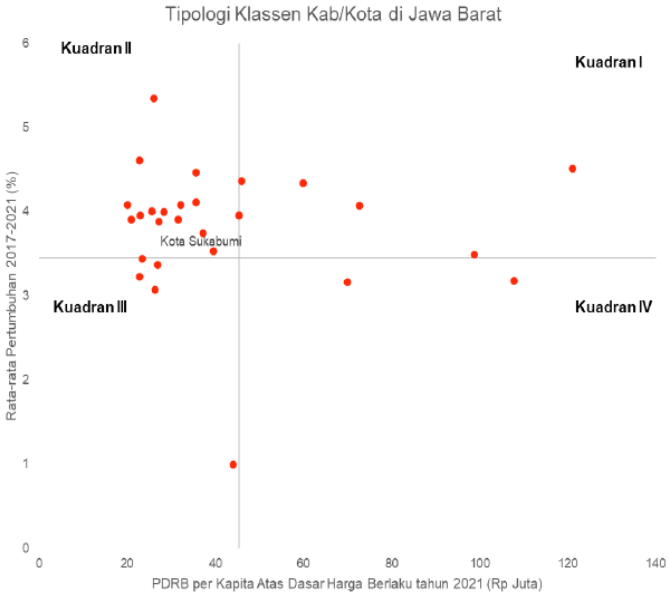
C. Pengembangan Lapangan Usaha Unggulan dan Potensial

Berdasarkan Tipologi Klassen yang digunakan untuk mengetahui posisi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan jumlah tenaga kerja dalam empat kuadran, Kota Sukabumi berada di posisi kuadran II. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Sukabumi termasuk daerah berkembang yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota.

Berdasarkan analisis LQ pada periode tahun 2017-2021, Kota Sukabumi memiliki 11 sektor basis yang dapat mendorong perekonomian daerah. Sektor basis, artinya kontribusi sektor tersebut di wilayah Sukabumi lebih besar kontribusinya dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah lain di Jawa Barat, di mana sektor tersebut mampu mencukupi kebutuhan daerahnya. Adapun sektor yang paling potensial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Sukabumi yaitu sektor Konstruksi serta Jasa Keuangan dan Asuransi.

Sementara itu, berdasarkan analisis *Shift Share* pada periode tahun 2017–2021, Kota Sukabumi memiliki 10 sektor yang termasuk kompetitif dapat bersaing dengan sektor-sektor lainnya. Sektor yang memiliki nilai kompetitif tertinggi yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Gambar 2. 20 Tipologi Klassen



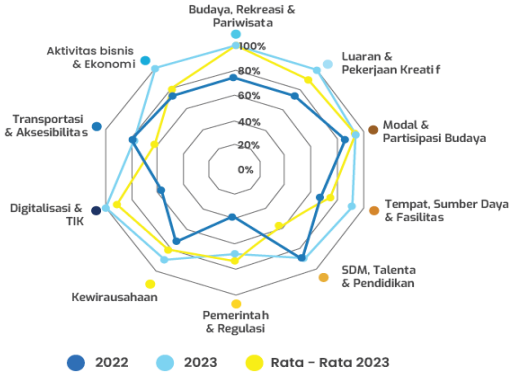
Sumber: Laporan *Background Study* RPJPD, 2023

D. Pengembangan Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif Kota Sukabumi menunjukkan kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Didukung dengan generasi produktif Kota Sukabumi sebesar 53,33 persen, maka jumlah pelaku ekonomi kreatif sudah meningkat lebih dari 500 pelaku yang terdata. Dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang teraktivasi, terdapat 4 subsektor yang paling potensial, yaitu kuliner, musik, seni pertunjukan, dan kriya.

Sektor ekonomi kreatif di Kota Sukabumi masih perlu diperkuat agar menjadi solusi bagi permasalahan kesejahteraan dan kesenjangan di Kota Sukabumi. Karena itu, keberadaan Sukabumi *Creative Hub* yang merupakan komite akselerasi, penataan, dan pengembangan ekonomi kreatif diharapkan dapat mendorong kolaborasi pemangku kepentingan ekonomi kreatif dalam melahirkan kreativitas dan inovasi untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ke depannya, ekonomi kreatif juga diharapkan dapat menjadi tulang punggung ekonomi baru di Kota Sukabumi.

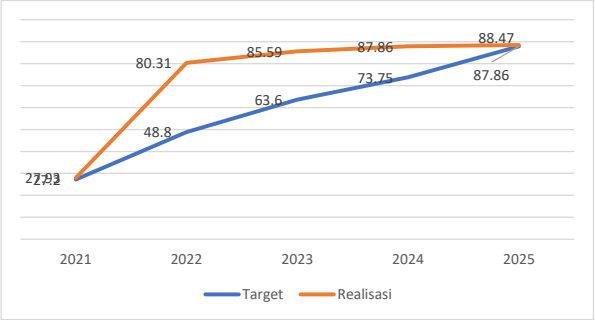
Gambar 2. 21 Spider Chart Indeks Kota Kreatif



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2024

Kota kreatif identik dengan kreativitas masyarakatnya. Semakin kreatif, semakin kompetitif kota tersebut. Para pemangku kepentingan di kota itu tentunya memiliki pemahaman tentang apa yang menjadi kekuatan yang akan membedakannya dengan kota lainnya. Secara umum, kota kreatif ditandai dengan karakter yang terbuka, memiliki jejaring yang luas, masyarakat yang cair dan dinamis, selalu terbuka dengan hal-hal baru serta mudah menyesuaikan diri dengan ide-ide kontemporer.

Gambar 2. 22 Indeks Kota Kreatif Kota Sukabumi Tahun 2021-2025 (poin)



Sumber: Bapppeda Kota Sukabumi, 2026 (diolah)

Indeks Kota Kreatif mulai diterapkan di Kota Sukabumi sejak tahun 2021. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Sukabumi memiliki potensi industri kreatif yang menjanjikan. Pengembangan Kota Kreatif di Kota Sukabumi dilakukan dengan kolaborasi *Penta Helix* yang terdiri dari akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah dan media.

Agar Indeks Kota Kreatif Kota Sukabumi lebih baik lagi, maka perlu upaya kolaborasi berbagai pihak seperti dengan akademisi untuk pengembangan SDM melalui riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, kolaborasi dengan pelaku usaha atau bisnis yang memiliki peranan sebagai pencipta produk dan jasa kreatif, kolaborasi dengan komunitas kreatif untuk mewadahi pemasaran produk dan jasa kreatif melalui kegiatan yang diadakan oleh komunitas.

E. Penerapan Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi ketimpangan sosial, sambil meminimalkan risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis bagi generasi mendatang. Tujuannya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan, dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dan sumber energi terbarukan. Ekonomi hijau menekankan pada pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Provinsi Jawa Barat, Indeks Ekonomi Hijau (Pilar Ekonomi) Kota Sukabumi tahun 2023 yaitu 41,15 poin, naik menjadi 41,43 poin. Capian ini menunjukkan bahwa Kota Sukabumi masih dalam kategori “Sedang Tier 2”.

Perlu upaya lanjutan agar penerapan ekonomi hijau di Kota Sukabumi lebih masif lagi, seperti meningkatkan penerapan urban farming, penerapan energi terbarukan, pemanfaatan kendaraan listrik, penerapan green building, dan sebagainya.

F. Penerapan Ekonomi Syariah

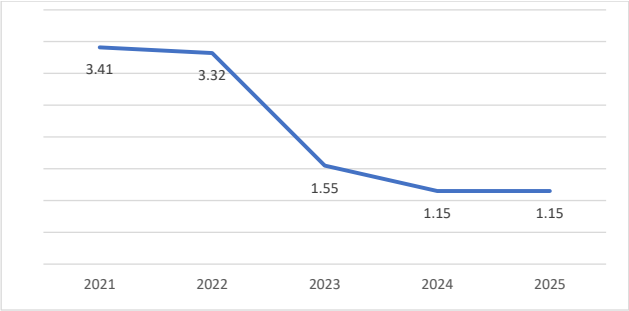
Pemerintah Kota Sukabumi terus mendorong tumbuhnya ekonomi syariah dengan membangun perekonomian umat yang berbasis pada nilai-nilai keislaman dan semangat kebersamaan. Hal ini juga didukung dengan mayoritas warganya yang beragama Islam dan kotanya yang identik dengan Kota Santri. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi yaitu dengan mendorong penguatan ekosistem dekonomi syariah melalui sinergi antara koperasi, Baznas, lembaga wakaf, zakat, dan sedekah.

Pemerintah Kota Sukabumi juga menginisiasi dana abadi Kota Sukabumi berbasis wakaf. Di mana, dana wakaf yang ada di Kota Sukabumi yang nilainya Rp 284 juta, sekitar Rp 200 juta dibelikan ke sukuk BJB Syariah. Meski masih relatif kecil, namun potensi pengembangannya cukup besar. Sementara, jika dilihat dari Indeks Zakat Kota Sukabumi tahun 2024 yang mencapai 0,53 dan masuk dalam kategori "Stabil", mengindikasikan bahwa potensi zakat masih juga cukup besar untuk dikembangkan.

G. Peningkatan Investasi

Hingga November 2024, jumlah perusahaan di Kota Sukabumi mencapai 23.631 perusahaan, terdiri dari perusahaan kecil (PK) mencapai 753, perusahaan menengah (PM) 36, mikro 22.754 dan sebanyak 88 merupakan perusahaan besar (PB), dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 36.283 orang. Jumlah tersebut perlu terus ditingkatkan, terlebih pengurusan perizinan dipermudah dengan adanya sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko. Untuk mendukung hal itu, berbagai inovasi kemudahan layanan terus diluncurkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi. Salah satunya melalui aplikasi Si Jimat Boss (sistem jemput perijinan masyarakat bersama OSS).

Gambar 2. 23 Realisasi Investasi Kota Sukabumi Tahun 2021-2025 (Triliun Rupiah)



Sumber: DPMPTSP Kota Sukabumi, 2026 (diolah)

Meskipun tren investasi menunjukkan penurunan, adanya mega proyek yang tengah dilakukan pemerintah pusat, yaitu pembangunan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), ini tentunya akan sangat berdampak kepada laju investasi ke depanya. Peluang investasi di Kota Sukabumi tergolong cukup besar, terutama dibidang properti, hotel dan restoran, kuliner serta industri.

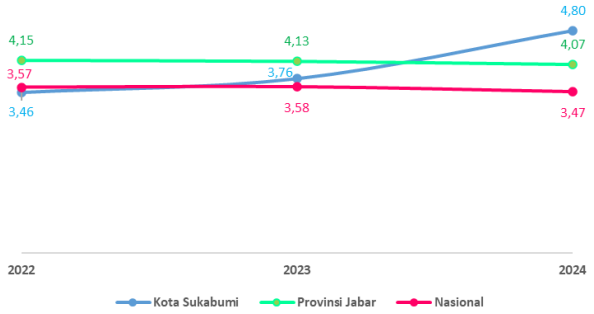
Karena itu, dengan fondasi pelayanan publik yang semakin baik dan kolaborasi antarlembaga yang diperkuat, Kota Sukabumi akan meneguhkan diri sebagai salah satu kota yang siap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat.

2.1.2.3 TRANSFORMASI DIGITAL

Daerah yang masyarakatnya mampu memaksimalkan penggunaan TIK berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi lebih produktif. TIK dapat mengurangi biaya transaksi serta mempercepat pertukaran informasi dan ide pada suatu daerah sehingga meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi. Salah satu cara mengukur penggunaan TIK yaitu dengan melihat tingkat adopsi TIK atau tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dari suatu daerah.

Berdasarkan data Indeks Daya Saing Daerah yang diterbitkan Badan Riset dan Inovasi Nasional, pada pilar ketiga disebutkan tentang adopsi TIK. Untuk Kota Sukabumi, skor adopsi TIK mengalami kenaikan signifikan di tahun 2024 yaitu sebesar 1,04 poin dari tahun 2023. Skor adopsi TIK Kota Sukabumi di tahun 2024 juga lebih baik dari Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Bahkan di antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, skor tersebut berada pada peringkat kelima.

Gambar 2. 24 Adopsi Teknologi Informasi Kota Sukabumi Tahun 2022-2024 (poin)



Sumber: BRIN, 2025 (diolah)

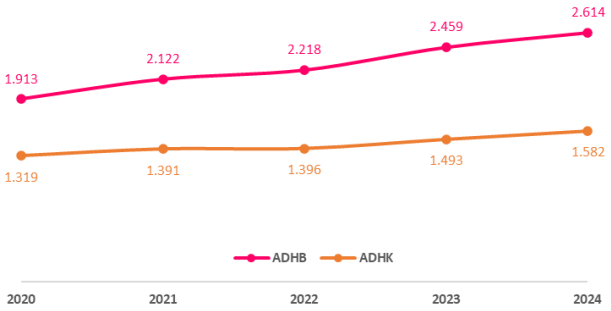
Skor adopsi TIK yang sudah tinggi tersebut perlu didukung dengan ekosistem digital yang memadai. Dengan demikian, kumpulan teknologi informasi yang saling terintegrasi dan terkait dapat digunakan sebagai kesatuan yang utuh. Sistem yang terbentuk kemudian dapat digunakan dan diisi oleh banyak pihak dalam bisnis, mulai dari pelanggan, pemasok, penyedia data, pihak pemerintah melalui dinas terkait, berbagai bentuk layanan dari bisnis lain, dan lain sebagainya.

2.1.2.4 INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Informasi tentang PMTB, tidak terlepas dari upaya mengetahui besaran investasi yang dilakukan di suatu wilayah dari tahun ke tahun. Manfaatnya bagi pemerintah daerah adalah sebagai acuan mengambil kebijakan untuk menjaga dan meningkatkan iklim investasi.

PMBT Kota Sukabumi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan dan selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun, mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan cenderung meningkat.

Gambar 2. 25 PMTB Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)



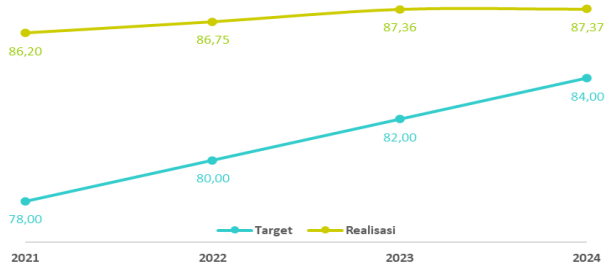
Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

2.1.2.5 PERKOTAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

A. Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Sukabumi. Selain untuk mengukur kepuasan masyarakat, IKLI dapat digunakan untuk mengakomodasi keinginan dan harapan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Sukabumi.

Gambar 2. 26 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kota Sukabumi Tahun 2021-2024 (persen)



Sumber: Dinas PUPR Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

IKLI Kota Sukabumi sudah masuk ke dalam kategori B atau memiliki mutu pelayanan baik. Namun demikian, layanan infrastruktur tetap harus ditingkatkan. Jika dicermati lebih dalam, layanan infrastruktur yang sudah termasuk baik adalah infrastruktur listrik, jalur pedestrian, taman kota dan jaringan telekomunikasi.

Sedangkan infrastruktur yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan kualitasnya adalah layanan transportasi seperti terminal dan jaringan jalan skala desa, jaringan air bersih, dan jaringan air limbah.

B. Peningkatan Kemantapan Jalan

Jalan merupakan prasarana transportasi darat, yang berperan penting bagi kehidupan manusia. Kondisi jalan yang baik akan memperlancar lalu lintas barang dan jasa. Sehingga keadaan jalan dan jaringan-jaringan jalan bisa dijadikan acuan tentang tingginya kebudayaan dan kemajuan ekonomi suatu daerah.

Tingkat kemantapan jalan milik Kota Sukabumi saat ini tergolong cukup baik, dengan persentase mencapai sekitar 81 persen. Ada sekitar 154 ruas jalan Kota Sukabumi kondisinya tergolong cukup baik. Sedangkan untuk sisanya saat ini masih terus dalam perbaikan.

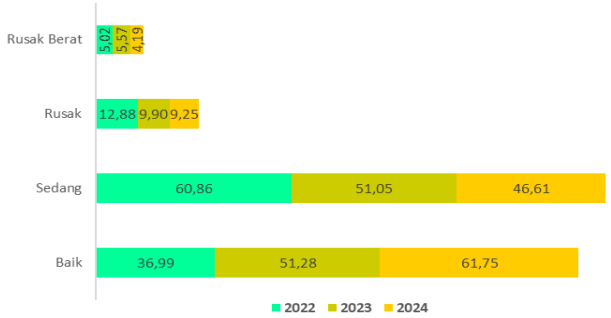
Tabel 2. 7 Panjang Jalan Berdasarkan Kewenangan di Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Km)

JALAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Negara	8,50	8,50	8,80	8,80	8,80
Provinsi	33,55	33,55	37,74	33,18	33,18
Kota	115,79	115,79	115,74	117,80	117,80
Total (km)	157,79	157,79	162,29	159,78	159,78

Sumber: Dinas PUPR, 2025

Meskipun saat ini secara persentase kemantapan jalan belum bisa 100 persen. Tapi, upaya pemeliharaan dan perbaikan terhadap jalan rusak kewenangan Kota Sukabumi terus dilakukan sesuai dengan anggaran yang ada. Kondisi sarana jalan itu sendiri banyak dipengaruhi oleh faktor alam maupun faktor manusia dalam hal ini kendaraan. Kondisi jalan itu sendiri tidak akan mungkin bisa 100 persen. Tapi, setidaknya bisa mendekati ke angka tersebut.

Gambar 2. 27 Kondisi Jalan di Kota Sukabumi Tahun 2022-2024 (Km)

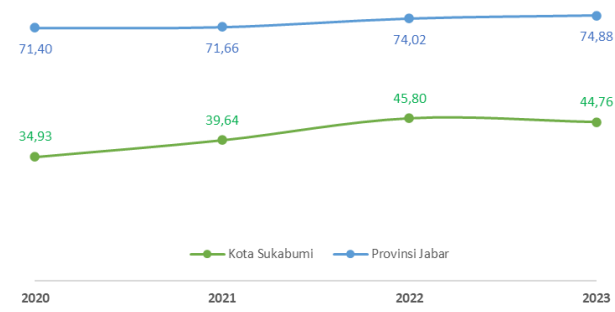


Sumber: Dinas PUPR, 2025 (diolah)

C. Peningkatan Akses Terhadap Sanitasi Layak

Sanitasi layak adalah fasilitas dan layanan yang memadai untuk pembuangan tinja secara aman dan higienis, serta mencegah kontak manusia dengan limbah. Akses sanitasi layak mencakup berbagai aspek yang memastikan fasilitas sanitasi memenuhi standar kesehatan dan kebersihan. Akses sanitasi yang layak sangat penting untuk mencegah penyakit menular dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Gambar 2. 28 Persentase RT yang Memiliki Akses Sanitasi Layak di Kotta Sukabumi Tahun 2020-2024 (porsen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

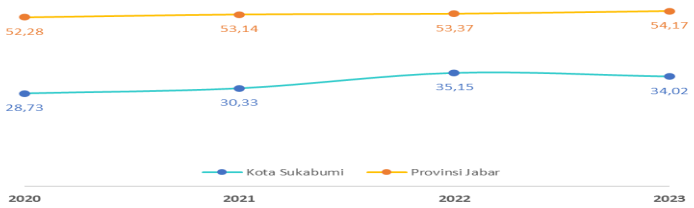
Akses sanitasi layak di Kota Sukabumi meskipun menunjukkan peningkatan namun capaiannya masih jauh di bawah Provinsi Jawa Barat. Capaian akses sanitasi layak Kota Sukabumi tahun 2023 yang hanya 44,76 persen mengindikasikan bahwa permasalahan ini perlu mendapat perhatian serius ke depannya.

Penggunaan sanitasi yang tidak layak tentunya akan berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat. Perlu upaya besar untuk meningkatkan akses sanitasi layak di Kota Sukabumi. Pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan pembangunan dan perbaikan fasilitas sanitasi di daerah yang kurang terlayani. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi layak dan perilaku hidup bersih harus terus digalakkan. Kerja sama dan partisipasi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program-program sanitasi perlu ditingkatkan. Selain itu, pemeliharaan dan pemantauan kondisi fasilitas sanitasi perlu ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.

D. Peningkatan Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi standar minimum kesehatan, kenyamanan, dan keamanan untuk penghuninya. Rumah layak huni di Kota Sukabumi cenderung meningkat dalam kurun 4 tahun terakhir meskipun capaiannya masih 34,02 persen di tahun 2023. Capaian ini masih di bawah Provinsi Jawa Barat yang capaiannya sebesar 54,17 persen.

Gambar 2. 29 Rumah Layak Huni Tahun 2020-2023 (Persen)



Sumber: Susenas, 2024 (diolah)

Jika dicermati lebih jauh, mayoritas rumah sudah memiliki struktur dinding, atap, dan lantai yang memadai. Namun, sebagian rumah masih menggunakan bahan yang kurang tahan lama seperti bambu atau kayu tanpa perlakuan khusus. Selain itu, sebagian rumah masih menghadapi masalah kepadatan, terutama di area dengan populasi tinggi.

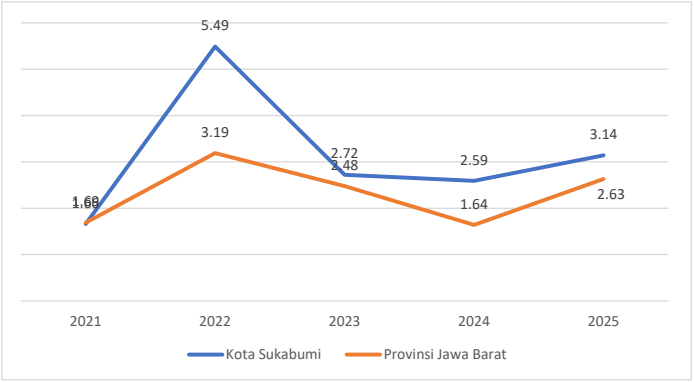
Upaya untuk meningkatkan rumah layak huni di Kota Sukabumi perlu dilakukan berkesinambungan. Pembangunan dan renovasi melalui intervensi pemerintah dan pihak terkait perlu ditingkatkan. Intervensi tersebut dapat berupa menyediakan bantuan dan subsidi bagi keluarga yang tidak mampu. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kondisi rumah yang layak huni perlu digalakkan.

Selain itu, kerja sama dengan melibatkan sektor swasta dalam program perumahan, baik dalam hal pendanaan maupun pelaksanaan proyek perlu ditingkatkan.

2.1.2.6 STABILITAS EKONOMI MAKRO

Stabilitas ekonomi makro diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro yaitu terkait dengan inflasi.

Gambar 2. 30 Inflasi Kota Sukabumi Tahun 2021-2025 (Persen)



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2026 (diolah)

Inflasi akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan pola investasi. Inflasi yang tinggi akan menggerus nilai uang dari waktu ke waktu, sehingga daya beli masyarakat akan menurun, dan demikian halnya investasi. Hal tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian inflasi yang terkendali merupakan indikasi adanya pertumbuhan ekonomi.

Secara *year on year* (y-o-y), pada tahun 2025 inflasi di Kota Sukabumi sebesar 3.63 persen dan termasuk tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini perlu disikapi dengan berbagai cara seperti pemantauan harga secara berkala untuk deteksi dini potensi kenaikan harga, stabilisasi pasokan pangan melalui kerja sama antardaerah (intervensi pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit), melaksanakan operasi pasar reguler dan pasar murah ketika terjadi lonjakan harga pada komoditas tertentu dan memberikan subsidi distribusi pangan atau dukungan biaya logistik bagi pedagang kecil saat harga naik tajam.

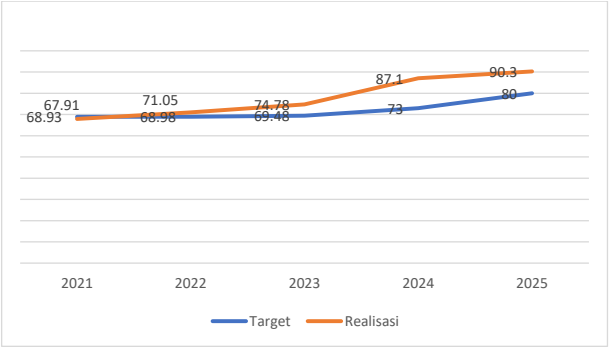
2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1 REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF

A. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi

Daya saing dan produktivitas hanya dapat diraih bila dilakukan dengan konsisten dan fokus pada penyederhanaan sistem birokrasi dan manajemen, rekayasa dan inovasi teknologi, peningkatan kompetensi SDM, dan peningkatan budaya produktif. Semua ini menjadi prasyarat guna menjawab tantangan dalam mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan.

Gambar 2. 31 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sukabumi Tahun 2021 – 2025 (Poin)



Sumber: Setda Kota Sukabumi, 2026 (diolah)

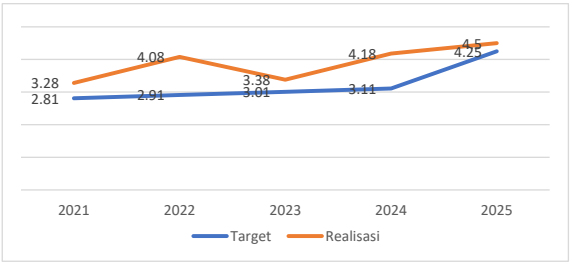
Memacu reformasi birokrasi menjadi salah satu strategi yang sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan daya saing daerah, peningkatan kualitas pelayanan dengan birokrasi yang efisien melayani akan menumbuhkan iklim investasi agar ekonomi tetap tumbuh dan mampu menciptakan lapangan kerja.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sukabumi dalam kurun waktu 2021-2025 menunjukkan kenaikan yang signifikan dan masuk dalam kategori “Sangat Memuaskan” di tahun 2025. Artinya, Pemerintah Kota Sukabumi telah menerapkan sebagian besar prinsip reformasi birokrasi dengan cukup baik. Struktur, tata kelola, dan pelayanan publiknya sudah mengalami peningkatan signifikan. Namun masih ada beberapa area yang perlu perbaikan lebih lanjut untuk mencapai efektivitas dan efisiensi optimal. Kinerja aparatur cukup baik, tetapi budaya kerja, integritas, dan inovasi layanan publik masih bisa ditingkatkan.

B. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyediaan pelayanan publik di era sekarang ini dan ke depannya akan semakin kompleks. Kecepatan dan kemudahan pelayanan menjadi tuntutan masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

Gambar 2. 32 Indeks Pelayanan Publik Kota Sukabumi Tahun 2021 – 2925 (Poin)



Sumber: Setda Kota Sukabumi, 2026 (diolah)

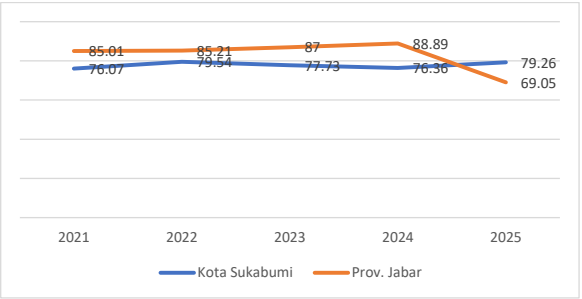
Indeks Pelayanan Publik Kota Sukabumi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Namun demikian, upaya peningkatan standar pelayanan publik agar makin ditingkatkan dari waktu ke waktu. Standar pelayanan tersebut mencakup kecepatan, kemudahan, dan keramahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

C. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk merencanakan kinerja, mengukur dan melaporkan kinerja, serta mengevaluasi kinerja dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja yang transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Selama lima tahun berturut-turut, Kota Sukabumi berhasil mempertahankan predikat BB, menunjukkan konsistensi dalam akuntabilitas kinerja. Meskipun predikat tetap, terdapat fluktuasi nilai, dengan puncak pada tahun 2024 (79,54) dan penurunan pada tahun 2024 dan 2025.

Gambar 2. 33 Nilai SAKIP Kota Sukabumi Tahun 2021-2025 (Poin)



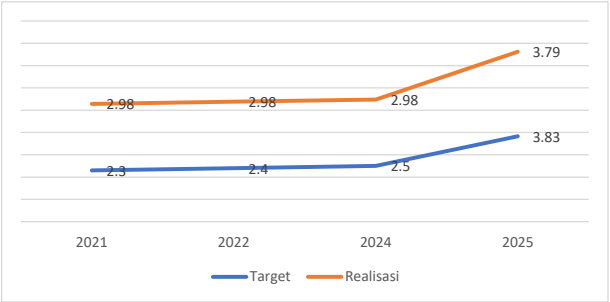
Sumber: Setda Kota Sukabumi, 2026 (diolah)

Tantangan dalam meningkatkan capaian SAKIP Kota Sukabumi antara lain masih adanya perangkat daerah yang belum sepenuhnya melengkapi data kinerja, menyebabkan ketidaksinkronan antara serapan anggaran dan realisasi kinerja. selanjutnya, diperlukan perbaikan dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

D. Peningkatan Kualitas Pemerintahan Berbasis Digital

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka diharapkan dapat menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Gambar 2. 34 Indeks SPBE Kota Sukabumi Tahun 2021-2025 (Poin)



Sumber: Diskominfo Kota Sukabumi, 2026 (diolah)

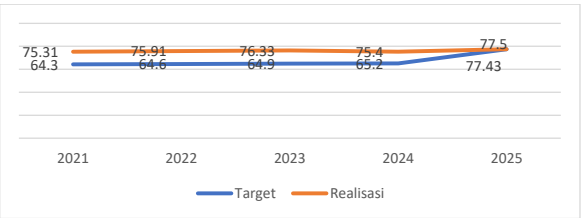
Berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi mendapatkan nilai Indeks SPBE Tahun 2021-2023 sebesar 2,98 dan meningkat menjadi 3,79 dengan kategori "Baik" di tahun 2025. Dengan demikian implementasi SPBE pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat terlaksana berkat kerja sama dan kolaborasi yang baik antar-PD yang tergabung dalam Tim Koordinasi Implementasi SPBE Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

2.1.3.2 HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL YANG TANGGUH DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL

Iklim investasi yang positif dapat dilihat dari tingkat keamanan dan ketertiban yang ada serta kemudahan regulasi. Tingkat keamanan dan ketertiban dapat dilihat dari upaya penanggulangan pelanggaran perda dan unjuk rasa yang mencapai 100 persen. Artinya walaupun terdapat pelanggaran perda dan unjuk rasa, pemerintah Kota Sukabumi dapat menanggulanginya sehingga kondusifitas tetap terjaga.

Selain itu, tingkat keamanan Kota Sukabumi yang diukur dari Indeks Rasa Aman dan Indeks Kerukunan Umat Beragama juga menunjukkan hasil yang dapat mendukung iklim investasi. Untuk Indeks Rasa Aman Kota Sukabumi cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya. Walaupun tingkat rasa aman di Kota Sukabumi ini berada pada level "Aman" ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditingkatkan, yaitu terkait partisipasi warga dalam kegiatan simulasi bencana, sosialisasi dan optimalisasi petunjuk keselamatan bencana, peningkatan akses warga terhadap lembaga/institusi pengembangan diri, dan masih terdapatnya kejadian kriminalitas (pencurian, perampasan, penganiayaan) serta kekerasan komunal (tawuran, perkelahian Ormas).

Gambar 2. 35 Indeks Rasa Aman Kota Sukabumi Tahun 2021-2025 (Poin)



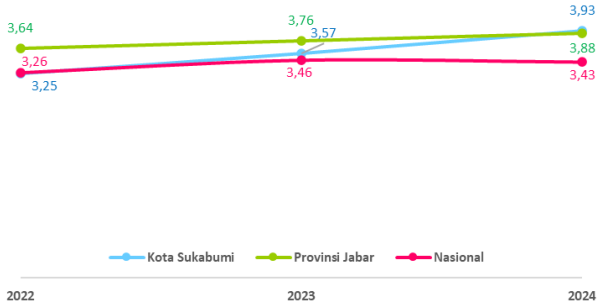
Sumber: Bapppeda Kota Sukabumi, 2026 (diolah)

2.1.3.3 KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN

Penciptaan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat penting. Dalam konteks ini, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dapat dijadikan alat untuk memahami kondisi daya saing suatu daerah, yaitu kondisi lingkungan pendukung, sumber daya manusia, tingkat efisiensi pasar, dan ekosistem inovasi.

IDSD Kota Sukabumi menunjukkan peningkatan di tahun 2024 dengan capaian 3,93 poin. Dari 12 pilar yang membentuk IDSD Kota Sukabumi, terdapat 1 pilar yang capaiannya masih di bawah 3,00, yaitu pilar kapabilitas inovasi (2,64). Agar daya saing daerah Kota Sukabumi meningkat diperlukan intervensi yang spesifik terhadap pilar-pilar yang capaiannya masih rendah tersebut.

Gambar 2. 36 IDSD Kota Sukabumi Tahun 2022-2024 (Poin)



Sumber: BRIN, 2026 (diolah)

2.2 EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

2.2.1 EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Capaian IKU Kota Sukabumi Tahun 2025 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 8 Capaian IKU Kota Sukabumi Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	KET.
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	77,90	78.23	
2	Indeks Pendidikan	Poin	73,63	73	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	KET.
3	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,31	74.45	
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,36 - 7,02	6.9	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7.54 - 8.21	8.19	
6	Indeks Rasa Aman	Poin	77,43	77.5	
7	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	79,00	79.11	
8	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Poin	76	76.51	
9	Indeks Warisan Budaya	Poin	38,85	32.46	
10	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Poin	60,1	55.5	
11	PDRB Per Kapita	Juta Rp.	45.29 - 45.65	47.64	
12	Indeks Kota Kreatif	Poin	87,86	88.53	
13	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	3,29	3.32	
14	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	82,52	78.91	
15	Rasio Terbentuknya Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	Persen	0	0	
16	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	10	12.47	
17	Indeks Kota Layak Huni	Poin	66,75	67.52	
18	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	88,37	88.37	
19	Indeks Risiko Bencana	Skor	75,56	61.11	
20	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	BB	A	
21	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,83	3.79	
22	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,25	4.5	
23	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	87,50	88	
24	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	
25	Indeks Reformasi Birokrasi General (IRB General)	Poin	78	75.76	
26	Indeks Sistem Merit	Poin	77,90	n/a	

Sumber: RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 dan BPS

2.2.2 EVALUASI INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2025

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Tabel 2. 9 Capaian IKD Kota Sukabumi Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TAHUN 2025		KET.
			TARGET	REALISASI	
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI					
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	82,52	80.90	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	3,74	4.74	
3	Kapasitas Air Baku	m^3/detik	0,56	0,56	
4	Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Perpipaan	Persen	24,30	14,83	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	61,28	70.25	
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	6,69	10,68	
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	0,63	n/a	
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	89,01	n/a	
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton Co2eq/ Miliar	0,14	0,85	
10	Indeks Risiko Bencana	Skor	75,56	61.11	
11	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Poin	60,1	55.5	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.08 - 5.58	5.32	
2	Rasio Gini	Poin	0.432-0.439	0.37	
3	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	77,90	78.23	
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,36 - 7,02	6.9	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7.54 - 8.21	8.19	
6	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,31	75.45	
7	Indeks Keluarga Sehat	Poin	0,375	n/a	
8	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	23,52	19.2	
9	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun	Jumlah	8	15.85	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TAHUN 2025		KET.
			TARGET	REALISASI	
10	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	Persen	91	187	
11	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	Persen	91	79.00	
12	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	100	98.62	
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	55,00	59,09	
14	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun	Tahun	10,50	10.39	
15	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,63	13.61	
16	Skor Literasi/Numerasi				
	Skor Literasi SD	Poin	65,72	61.22	
	Skor Literasi SMP	Poin	79,52	77.72	
	Skor Numerasi SD	Poin	47,41	51.13	
	Skor Numerasi SMP	Poin	65,02	67.6	
17	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	89,91	91.36	
18	Indeks Pendidikan	Poin	73,63	73	
19	Indeks Rasa Aman	Poin	77,43	77.5	
20	Indeks Warisan Budaya	Poin	38,85	32.46	
21	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	79,00	79.11	
22	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	60,46	66	
23	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,334	0.406	
ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	4,02	3,94	
2	Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi	Persen	0,58	1	
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	4,82	5.5	
4	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	3,29	3.32	
5	Indeks Kota Kreatif	Persen	87,86	78.31	
6	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	5,34	3,01	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TAHUN 2025		KET.
			TARGET	REALISASI	
7	PDRB Per Kapita (ADHK)	Juta. Rp.	29,61	47.649	
8	PDRB Per Kapita (ADHB)	Juta Rp.	45.29-45.65	47,65	
9	Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	4,82	4,98	
10	Indeks Konektivitas	Skor	3	n/a	
11	Rasio Terbentuknya Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	Persen	0	0	
12	Tingkat Inflasi	Persen	3,04	3.63	
13	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persen	85	n/a	
14	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	16,12	16,22	
15	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	Poin	67,87	42,16	
16	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	88,37	88,37	
17	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persen	36,45	36,45	
18	Rasio Akses Masyarakat Terhadap Energi	Persen)	100	99,99	
19	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	
20	Indeks Akses Keuangan Daerah	Poin	6,70	n/a	
ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	BB	A	
2	Indeks Reformasi Birokrasi General (IRB General)	Poin	78	75.76	
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	3,83	3.79	
4	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,25	4.5	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	87,50	88	
6	Nilai SAKIP	Poin	78	79.26	

Sumber: RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 dan BPS

Tabel 2. 10 Capaian IKK Kota Sukabumi Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		KET.
			TARGET	REALISASI	
A	PENDIDIKAN				
1	Jumlah Anak Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (APS)	Persen	99,45	98.88	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		KET.
			TARGET	REALISASI	
2	Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (APS)	Persen	82,01	67.26	
3	Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (APS)	Persen	56,98	82.56	
4	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	30	30	
5	Indeks Pemerataan Guru	Indeks	0,25	0,25	
6	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	Persen	100	100	
7	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persen	75	75	
B	KESEHATAN				
1	Prevalensi Stunting	Persen	18,07	19,70	
2	Angka Keberhasilan Pengobatan TB	Persen	90	79	
3	Persentase pengendalian dan pencegahan penyakit	Persen	68,53	70,10	
4	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	42,00	65	
5	Persentase Peningkatan Kualitas Sarana Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah	persen	35,00	40	
6	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	persen	67	67,78	
7	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	persen	80,00	79,83	
8	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Standar Ketenagaan Minimal	Persen	35	20	
9	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, UMOT dan PIRT yang Memenuhi Standar	Persen	57	66,67	
10	Persentase Tempat Pengolahan Pangan Siap Saji Yang Memenuhi Syarat Kesehatan	Persen	66	42,10	
11	Persentase Kelurahan Dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Persen	75	75	
C	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persen	58,34	26.72	
2	Persentase Luas Layanan Daerah Irigasi	Persen	65,74	67.02	
3	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi	Persen	16,86	83.35	
4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Air Limbah Domestik Layak dan Aman	Persen	71,87	71,87	
5	Persentase Cakupan Drainase Lingkungan	Persen	43,02	44,02	
6	Persentase Bangunan Gedung Pemerintahan dalam Kondisi Baik	Persen	35,14	60	
7	Persentase RTHKP dalam Kondisi Baik	Persen	72,53	72,53	
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Persen	88,85	99.79	
9	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil	Persen	53,26	n/a	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		KET.
			TARGET	REALISASI	
10	Luasan Pemanfaatan Ruang yang Telah Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Ha	20	17,2	
D	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Persentase Rumah Susun yang Terpelihara	Persen	100	0	
2	Persentase Luas Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani	Persen	13,07	6,25	
3	Persentase Berkurangnya Jumlah RTLH	Persen	1,37	1,91	
4	Persentase Perumahan yang Telah Serah Terima dan Tersedia PSU	Persen	15,96	13,83	
E	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang Terselesaikan	Persen	100	100	
2	Persentase Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Sesuai Standar Pelayanan	Persen	100	100	
3	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana	Persen	100	100	
F	SOSIAL				
1	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial	Persen	52	95,5	
2	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang sesuai standar	Persen	94,8	99,2	
3	Persentase Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Persen	0,81	0,69	
4	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Persen	100	89,1	
5	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	Persen	100	98,9	
6	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola Dengan Baik	Persen	100	99,7	
G	TENAGA KERJA				
1	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Persen	-	-	
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Rencana Tenaga Kerja Daerah Makro dan Mikro yang diterapkan	Persen	95	100	
3	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Persen	57,8	46,05	
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	52	85,33	
H	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	100	
2	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	100	
3	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	85	n/a	
4	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	65,8	n/a	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		KET.
			TARGET	REALISASI	
5	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Persen	1	100	
6	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persen	32,25	100	
7	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	41,9	52,36	
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	45,7	51,73	
I	PANGAN				
1	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	91,00	94,12	
2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	6,06	0	
3	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	80	96	
J	PERTANAHAN				
1	Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukkan Tanahnya di Atas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin Lokasi Yang Diterbitkan	Persen	25	83,76	
K	LINGKUNGAN HIDUP				
1	Emisi Co2 Equivalen	Ton CO2eq	26699,28	561464,18	
2	Persentase RTH	Persen	100	100	
3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persen	100	100	
4	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persen	100	87	
5	Persentase ketersedian dokumen perencanaan lingkungan hidup daerah	Persen	100	100	
6	Persentase kelompok Masyarakat yang mengikuti diklat dan penyuluhan lingkungan hidup	Persen	100	31	
7	Persentase jumlah penghargaan untuk masyarakat yang peduli terhadap lingkungan	Persen	25	25	
8	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persen	100	100	
9	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Persen	60	n/a	
L	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	75	75.09	
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	7,50	7.94	
3	Persentase Kepemilikan akta kelahiran 0-4 Tahun	Persen	99,85	99.98	
4	Persentase Kepemilikan akta perkawinan bagi penduduk yamg menikah	Persen	72,91	72.88	
5	Persentase Kepemilikan akta Perceraian bagi penduduk yang bercerai	Persen	52,63	52.34	
6	Persentase kepemilikan akta kematian yang dterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100	
7	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persen	16,67	26.67	
8	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	Dokumen	1	1	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		KET.
			TARGET	REALISASI	
M	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	20	40.25	
2	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)	Persen	84,00	87.3	
3	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB	Persen	66,67	69.70	
N	PERHUBUNGAN				
1	Presentase Ketersediaan Penerangan Jalan Umum yang terpelihara dan memenuhi standar	Persen	40,5	40	
O	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika yang Digunakan dalam Pemerintahan	Persen	95	70.97	
2	Persentase informasi kebijakan/ program pemerintah yang di diseminasikan kepada publik	Persen	90	91	
P	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
1	Persentase Koperasi yang memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam	Persen	11,26	0	
2	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	Persen	1,35	0,46	
3	Persentase UMKM Menjalin Kemitraan	Persen	0,11	0,26	
4	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	8,58	6,68	
5	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	15,92	11,53	
6	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persen	14,85	6,68	
7	Persentase Koperasi Aktif	Persen	66,05	90,49	
Q	PENANAMAN MODAL				
1	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	83	83	
2	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen	100	100	
3	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Persen	1	-9,95	
4	Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi	Persen	65,2	25	
5	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persen	100	100	
R	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
1	Rasio Wirausaha Pemuda2	Persen	25	n/a	
2	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persen	0,0076	0,0076	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan	Persen	0	0	
S	STATISTIK				
1	Persentase Penggunaan Statistik Sektoral Untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan)	Persen	100	100	
T	PERSANDIAN				
1	Persentase Keterhubungan Jaring Komunikasi Sandi	Persen	77	77	
U	KEBUDAYAAN				

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		KET.
			TARGET	REALISASI	
1	Persentase jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Persen	76	76	
2	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persen	55	55	
3	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Persen	60	60	
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persen	60	60	
5	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persen	60	60	
V	PERPUSTAKAAN				
1	Persentase Koleksi Budaya Etnis dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persen	25	25	
2	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan di Perpustakaan Umum Daerah	Persen	1,75	n/a	
W	KEARSIPAN				
1	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Niai	64.90	64,90	
2	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen	18	n/a	
X	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1434.24	1434,24	
2	Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang Taat Aturan	Persen	0	0	
3	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Kg/Kapita/ Tahun	19	18,26	
Y	PARIWISATA				
1	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persen	8,12	8,12	
2	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persen	25	25	
3	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persen	68	68	
4	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	16	16	
Z	PERTANIAN				
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	2	20	
2	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	20	19,4	
3	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen	35	100	
4	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen	25	25	
5	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persen	45	100	
6	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persen	80	80	
7	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	23	23	
8	Persentase Kelompok Tani yang Difasilitasi Berbadan Hukum	Persen	7	7,5	
AA	PERDAGANGAN				

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		KET.
			TARGET	REALISASI	
1	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persen	80	80	
2	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen	8,24	10,18	
3	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Persen	73,14	58	
4	Persentase Promosi Produk Lokal yang di Fasilitasi/di Laksanakan	Persen	100	100	
5	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang di Fasilitasi	Persen	100	100	
6	Nilai Ekspor Barang	US$	27.654.556	21.385.193,87	
BB	PERINDUSTRIAN				
1	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persen	2,86	4,20	
2	Persentase IKM yang di Fasilitasi Legalitas Usahanya	Persen	100	100	
3	Persentase Pameran yang dilaksanakan dan Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	Persen	100	100	
CC	SEKRETARIAT DAERAH				
1	Indeks Zakat Nasional Kota Sukabumi	Nilai	0,55	0,55	
2	Persentase pembinaan lembaga keagamaan	Persen	10	10,62	
3	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	88.50	86,64	
4	Nilai EKPPD	Nilai	3.32	3,27	
5	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Persen	70	66,49	
6	Persentase BUMD yang sehat	Persen	66.70	66,67	
DD	SEKRETARIAT DPRD				
1	Persentase Prolegda yang Ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Persen	100	100	
EE	PERENCANAAN				
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100	
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra	Persen	100	100	
3	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	
4	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	100	
5	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100	100	
FF	KEUANGAN				
1	Nilai Laporan Keuangan	Nilai	100	100	
2	Persentase Administrasi BMD	Persen	75	76,67	
3	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	35	35	
GG	KEPEGAWAIAN				
1	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Poin	77	100	
HH	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		KET.
			TARGET	REALISASI	
1	Persentase PD yang Menerapkan Inovasi Daerah	Persen	18,50	18,50	
II	PENGAWASAN (INSPEKTORAT)				
1	Persentase Rekomendasi Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Persen	83	97,41	
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	100	
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	2	
4	Manajemen Risiko Indeks	Level	3	n/a	
JJ	PEMERINTAHAN UMUM (BAKESBANGPOL)				
1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	Persen	36	100	
2	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	93	100	
3	Persentase Pendidikan Politik bagi Kader Politik, pelajar dan Masyarakat	Persen	44	100	
4	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif	Persen	67	100	
5	Persentase Konflik Antar Inter Umat Beragama yang Diantisipasi	Persen	73	100	
KK	KECAMATAN WARUDOYONG				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Warudoyong	Nilai	98,15	97,47	
2	Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Kelurahan	Persen	100	100	
3	Persentase pelaksanaan Fasilitasi/Koordinasi/Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	100	
4	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persen	100	100	
LL	KECAMATAN BAROS				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Baros	Nilai	84,80	85.03	
2	Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Kelurahan	Persen	100	100	
3	Persentase pelaksanaan Fasilitasi/Koordinasi/Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	100	
4	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persen	100	100	
MM	KECAMATAN GUNUNG PUYUH				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gunungpuyuh	Nilai	84,83	84.9	
2	Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Kelurahan	Persen	100	100	
3	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi/Koordinasi/Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	70	100	
4	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persen	100	100	
NN	KECAMATAN CIBEREUM				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cibeureum	Nilai	88,85	88.7	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		KET.
			TARGET	REALISASI	
2	Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Kelurahan	Persen	100	100	
3	Persentase pelaksanaan Fasilitasi/Koordinasi/Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	100	
4	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Keamanan	Persen	65	100	
OO	KECAMATAN CITAMIANG				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Citamiang	Nilai	97,97	98.03	
2	Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Kelurahan	Persen	100	100	
3	Persentase pelaksanaan Fasilitasi/Koordinasi/Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	100	
4	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Bidang Keamanan	Persen	100	100	
PP	KECAMATAN CIKOLE				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cikole	Nilai	95,00	87.75	
2	Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Kelurahan	Persen	100	100	
3	Persentase pelaksanaan Fasilitasi/Koordinasi/Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	100	
4	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Bidang Keamanan	Persen	100	100	
QQ	KECAMATAN LEMBURSITU				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lembursitu	Nilai	87,2	87,2	
2	Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Kelurahan	Persen	100	100	
3	Persentase pelaksanaan Fasilitasi/Koordinasi/Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	100	
4	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Bidang Keamanan	Persen	100	100	

2.2.3 EVALUASI CAPAIAN SPM TAHUN 2025

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Tabel 2. 11 Capaian SPM Kota Sukabumi Tahun 2023-2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN			KET.
			2023	2024	2025	
PENDIDIKAN						
1	Pendidikan Dasar	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang terpenuhi	98,29%	99,75%	99.04	
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terpenuhi	92,53%	99,65%	82.56	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini yang terpenuhi	80,32%	74,04%	74.01	
KESEHATAN						
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	99,89%	100%	100%	
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	96,62%	100%	100%	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	72,04%	98,37%	100%	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	93,27%	100%	100%	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	87,31%	100%	100%	
9	Pelayanan kesehatan penderita *diabetes melitus*	Jumlah Warga Negara penderita *diabetes melitus* yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN			KET.
			2023	2024	2025	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	91,49%	96,72%	100%	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga *tuberculosis* yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)*	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human mmunodeficiency Virus)* yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	
PEKERJAAN UMUM						
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-sehari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	100%	
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	100%	
PERUMAHAN RAKYAT						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	-	100%	
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	95.00%	
3	Pelayanan pencegahan dan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	100%	100%	93.74%	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN			KET.
			2023	2024	2025	
	kesiapsiagaan terhadap bencana	kesiapsiagaan terhadap bencana				
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	91.61%	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	
SOSIAL						
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100%	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	

Sumber: Setda Kota Sukabumi

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Rumusan permasalahan pembangunan Kota Sukabumi didasarkan pada analisis deskriptif dan diagnosis.

2.3.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan pembangunan berkaitan dengan kondisi fisik geografi di Kota Sukabumi, antara lain:

a. Alih fungsi lahan untuk permukiman dan pusat perdagangan cukup besar yang ditunjukkan dengan berkurangnya luas lahan pertanian mencapai 150 hektar;
b. Minimnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang baru mencapai sekitar 2 persen dari yang seharusnya 20 persen;
c. Status daya dukung pangan di sebagian besar wilayah sudah terlampui yaitu mencapai 3.357,22 ha;
d. Ketahanan pangan sudah masuk kategori sangat tahan (skor 80,90 di tahun 2024) namun dalam konteks kota di Provinsi Jawa Barat skornya hanya lebih baik dari Kota Tasikmalaya;
e. Kualitas lingkungan hidup cenderung stabil di angka 60 dalam kurun 5 tahun mengingat tekanan terhadap pencemaran air dan udara yang cenderung meningkat;
f. Kondisi geografis yang berkontur menyebabkan pengembangan infrastruktur seperti drainase mengalami tantangan;
g. Risiko bencana sudah masuk dalam kategori sedang (skor 107,44 di tahun 2024) namun risiko gempa bumi, banjir, dan tanah longsor masih cukup besar mengingat Kota Sukabumi masuk dalam lintasan Sesar Cimandiri; dan

Kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana masuk ke dalam kelas kapasitas sedang (0,57 di tahun 2023) sehingga masih memerlukan peningkatanPermasalahan demografi berdasarkan kondisi umum daerah dan proyeksi yang telah dilakukan di Kota Sukabumi, antara lain:

a. Distribusi penduduk yang belum merata yang ditunjukkan dengan konsentrasi jumlah penduduk di Kecamatan Cikole (63,24 ribu jiwa), Warudoyong (60,72 ribu jiwa), dan Citamiang (54,57 ribu jiwa);
b. Dengan luas wilayah yang kecil (±48 km^2), jumlah penduduk Kota Sukabumi terus meningkat menyebabkan munculnya permukiman kumuh di beberapa wilayah;
c. Belum adanya perubahan paradigma terkait bonus demografi yang seharusnya lebih menekankan pada konfigurasi tingkat pendidikan penduduk yang ditunjukkan dengan jumlah penduduk bekerja didominasi lulusan SMP ke bawah yaitu sebanyak 71.712 jiwa;
d. Kota Sukabumi menjadi tujuan migrasi dari daerah pedesaan di Kabupaten Sukabumi maupun dari daerah lain;
e. Belum optimalnya pengelolaan SDM terintegrasi, baik dari sektor publik maupun swasta; dan

f. Keberlangsungan kehidupan masyarakat adat di tengah arus globalisasi yang belum sepenuhnya tertangani.

2.3.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan kesejahteraan ekonomi di Kota Sukabumi, antara lain:

a. Adanya kesenjangan distribusi kekayaan di masyarakat yang relatif tinggi ditunjukkan dengan rasio gini yaitu 0,37 di tahun 2025 dan masih berada di atas angka Provinsi Jawa Barat serta nasional;
b. Pertumbuhan ekonomi cenderung melambat (5,11 persen) di tahun 2025 dan belum mencapai target (5,32 persen) meski capaiannya di atas angka Provinsi Jawa Barat;
c. Akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masih belum optimal yang tercermin dari angka kemiskinan yang masih berada di angka 7,20 persen;
d. Terbatasnya lapangan kerja menyebabkan TPT masih tinggi yaitu berada di angka 8,19 di 2025 persen di atas angka Provinsi Jawa Barat (6,75 persen) dan Nasional (4,91 persen); dan
e. IPM untuk skala kota tahun 2025 sebesar 78,23 masih cukup rendah dibanding kota lain di Provinsi Jawa Barat karena hanya lebih baik dari Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar.

Permasalahan kesejahteraan sosial budaya berdasarkan kondisi umum di Kota Sukabumi, antara lain:

a. Indeks Keluarga Sehat cenderung meningkat namun masih memerlukan penguatan dan pendampingan di beberapa puskesmas serta kerja sama pelaksanaan program;
b. Belum merata dan tercukupinya SDM kesehatan yang komposisinya masih didominasi perawat (47 persen), bidan (12 persen), dan dokter (7 persen);
c. Umur Harapan Hidup tahun 2025 yaitu 75,45 tahun, masih di bawah kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat;
d. Indeks Pembangunan Keluarga masuk kategori siaga (skor 93,35 tahun 2025) dan masih termasuk terendah di antara kota-kota di Provinsi Jawa Barat;
e. Indeks Ketimpangan Gender yang masih berada pada angka 0,406 di tahun 2025 memerlukan upaya komprehensif untuk menguranginya;

f. Rendahnya peran perempuan dalam ekonomi keluarga yang ditunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan tahun 2025 sebesar 65.73 Persen.

2.3.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan daya saing ekonomi di Kota Sukabumi, antara lain:

a. Masih rendahnya kontribusi PDRB ADHB Kota Sukabumi terhadap Provinsi Jawa Barat yang hanya 0,58 persen di tahun 2025;
b. PDRB per Kapita ADHB Kota Sukabumi tahun 2025 termasuk rendah dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat yaitu 47,65 juta;
c. Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital dalam perekonomian kota;
d. Adanya kesenjangan rata-rata pengeluaran per kapita di wilayah utara-selatan dikarenakan perkembangan kota yang memang timpang dan lebih maju di wilayah utara;
e. Belum optimalnya pola kemitraan koperasi dan UMKM dengan pengusaha besar; dan
f. Realisasi investasi yang cenderung meningkat tidak serta menurunkan angka pengangguran secara signifikan, di mana TPT Kota Sukabumi masih berada di angka 8,19 persen di tahun 2025.

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan daya saing SDM di Kota Sukabumi, antara lain:

a. Rata-rata masyarakat Kota Sukabumi tahun 2025 pendidikan terakhirnya setara kelas 10 Ssekolah menengah Menengah sederajat;
b. Kemampuan numerasi siswa SD 51.13 Persen dan SMP 67.76 masih dalam kategori sedang di tahun 2025;
c. Belum optimalnya kolaborasi berbagai pihak dalam pengembangan SDM kreatif;
d. Ekosistem digital belum terbangun dengan baik meskipun skor adopsi TIK Kota Sukabumi sudah mencapai 3.79 di tahun 2025;
e. Rasio ketergantungan yang stabil berada di angka 45 menunjukkan perlunya memanfaatkan bonus demografi untuk lebih meningkatkan produktivitas masyarakat.

Permasalahan daya saing infrastruktur di Kota Sukabumi berdasarkan kondisi umum daerah, antara lain:

a. Konektivitas antarwilayah agar memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
b. Masih adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur yang selama ini lebih berorientasi di wilayah utara; dan
c. Belum optimalnya penyediaan air minum (kebutuhan eksisting 44.551.250 liter/hari), pengelolaan air limbah, dan pengelolaan persampahan (produksi sampah mencapai 66.345.722 liter per hari).

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan daya saing iklim investasi di Kota Sukabumi, antara lain:

a. Dinamisme bisnis masih belum optimal, ditunjukkan dengan skor pilar 11 IDSD yang hanya 2,96 dari skala 5.;
b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban meskipun Indeks Rasa Aman Kota Sukabumi sudah mencapai 77.5 di tahun 2025;
c. Masih adanya pelanggaran Perda dan unjuk rasa yang dilakukan; dan
d. Konflik sosial di masyarakat masih sering terjadi terutama berkaitan dengan perkelahian antarkelompok pelajar dan pemuda.

2.3.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan pelayanan umum di Kota Sukabumi, antara lain:

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan pelayanan umum di Kota Sukabumi, antara lain:

a. Penerapan Reformasi Birokrasi masih bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi walaupun target BB tahun 2025 secara realisai menjadi A.
b. Indeks SPBE tahun 2025 masuk kategori baik (3,79) namun masih diperlukan upaya untuk menguatkan ekosistem digital di pemerintahan; dan
c. Perlunya peningkatan pelayanan publik meskipun Indeks Pelayanan Publik mencapai angka 4,5 di tahun 2025

2.7 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2026 dan Realisasi RPJMD

2.7.1 Capaian Bidang Urusan pada Evaluasi Hasil RKPD sampai Triwulan I Tahun 2026

Pendekatan *Gap Analysis* (analisis kesenjangan) dan Analisis Deskriptif dapat digunakan sebagai metode evaluasi RKPD.

Gap Analysis dipergunakan untuk membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Sementara Analisis Deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Dalam Analisis Deskrptif, data-data disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan lain-lain untuk mempermudah memahami data dan penyampaian informasi sehingga dapat diterima dan dipahami dengan baik.

Kedua metode diatas dipergunakan untuk menilai capaian anggaran dan kinerja perangkat daerah dan menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan yang akan datang. Adapun hasil evaluasi capaian anggaran dan kinerja perangkat daerah Triwulan I tahun 2026 ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 12
Rekapitulasi Capaian Bidang Urusan pada Evaluasi Hasil RKPD
Pemerintah Kota Sukabumi
Kondisi sampai dengan : Triwulan I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Bidang Urusan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	242,362,719,501.00	11.54	28.82	61,393,599,937.00	25.33
2	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	538,369,542,351.00	49.23	18.43	128,408,839,479.00	23.85
3	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	56,332,755,565.00	10.08	21.31	6,331,095,632.00	11.24
4	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,689,380,000.00	33.63	0	144,694,200.00	8.56
5	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	16,096,694,114.00	30.95	19.58	4,136,478,560.00	25.7
6	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6,497,538,256.00	133.81	5.21	1,360,179,479.00	20.93
7	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5,781,930,986.00	0	23.15	1,048,904,308.00	18.14
8	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8,576,332,251.00	10.14	25.77	1,777,781,236.00	20.73
9	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	8,385,633,695.00	79.77	80.5	2,062,563,465.00	24.6
10	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0.00	0	0	0.00	0
11	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	24,750,627,281.00	28.28	19.14	6,815,764,087.00	27.54
12	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4,361,287,390.00	98.53	52120.7	1,059,536,252.00	24.29
13	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3,140,652,000.00	0	12.7	115,750,000.00	3.69
14	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	15,800,366,470.00	3.28	22.25	1,728,008,053.00	10.94
15	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7,689,581,951.00	69.5	25.41	1,435,594,932.00	18.67

No.	Kode	Uraian Bidang Urusan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
16	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8,784,288,602.00	0	10.23	1,941,098,332.00	22.1
17	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4,940,086,138.00	66.05	84.33	1,184,587,316.00	23.98
18	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7,334,045,187.00	189415	21.3	1,555,969,322.00	21.22
19	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	5,000,000.00	25	0	0.00	0
20	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	55,000,000.00	27.38	0	5,505,000.00	10.01
21	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	15,000,000.00	0	0	0.00	0
22	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5,356,035,297.00	8.13	12.29	1,248,568,480.00	23.31
23	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	19,998,950.00	0	0	0.00	0
24	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	103,531,250.00	101.15	20	5,500,000.00	5.31
25	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	615,369,000.00	133.56	32.78	112,600,000.00	18.3
26	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	647,701,615.00	95.33	39.06	25,073,000.00	3.87
27	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	126,004,000.00	4.35	12.79	34,875,000.00	27.68
28	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	672,011,400.00	0	0	0.00	0
29	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	5,000,000.00	0	0	0.00	0
30	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	40,516,606,301.00	0	32.25	11,168,166,345.00	27.56
31	4.02	SEKRETARIAT DPRD	49,362,910,603.00	12.5	30.59	15,316,648,765.00	31.03
32	5.01	PERENCANAAN	9,961,217,096.00	5.05	16.21	2,023,897,328.00	20.32

No.	Kode	Uraian Bidang Urusan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
33	5.02	KEUANGAN	25,347,761,770.00	7.93	39.5	4,936,556,139.00	19.48
34	5.03	KEPEGAWAIAN	6,040,584,189.00	0	33.84	1,415,711,082.00	23.44
35	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	283,455,000.00	0	8.76	2,975,000.00	1.05
36	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403,600,000.00	0	0	63,581,945.00	15.75
37	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	11,516,460,403.00	20.69	38.47	2,934,065,704.00	25.48
38	7.01	KECAMATAN	77,781,654,273.00	16.11	32.91	13,984,192,259.00	17.98
39	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7,841,992,941.00	32.66	38.34	1,555,138,814.00	19.83
	TOTAL		1,197,570,355,826.00	3137.43	1616.55	277,333,499,451.00	23.16

2.7.2 Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja PER SKPD pada Evaluasi Hasil RKPD sampai Triwulan I Tahun 2026

Tabel 2. 13 Rekapitulasi Capaian SKPD pada Evaluasi Hasil RKPD
Pemerintah Kota Sukabumi

No.	Kode	Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	242,377,719,501.00	7.1	27.62	61,393,599,937.00	25.33
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	538,369,542,351.00	49.23	18.43	128,408,839,479.00	23.85
3	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	58,022,135,565.00	15.34	18.97	6,475,789,832.00	11.16
4	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	12,266,518,750.00	46.42	15.48	3,059,760,458.00	24.94
5	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,830,175,364.00	0	24.87	1,076,718,102.00	28.11
6	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	6,497,538,256.00	100	5.21	1,360,179,479.00	20.93
7	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja	5,786,930,986.00	0	21.97	1,048,904,308.00	18.13
8	2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	11,716,984,251.00	7.6	20.96	1,893,531,236.00	16.16

No.	Kode	Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
9	2.09.3.27.3.25.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	9,136,866,560.00	92.34	60.38	2,093,136,465.00	22.91
10	2.11.0.00.0.00.00.0000	Dinas Lingkungan Hidup	24,750,627,281.00	28.28	19.14	6,815,764,087.00	27.54
11	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,361,287,390.00	98.53	100	1,059,536,252.00	24.29
12	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	15,800,366,470.00	3.28	22.25	1,728,008,053.00	10.94
13	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	7,749,581,951.00	52.18	21.63	1,441,099,932.00	18.6
14	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	9,582,304,002.00	0.64	9.3	1,975,973,332.00	20.62
15	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,940,086,138.00	66.05	84.33	1,184,587,316.00	23.98
16	2.19.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	7,949,414,187.00	100	22.86	1,668,569,322.00	20.99
17	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5,376,034,247.00	4.88	9.9	1,248,568,480.00	23.22
18	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	40,516,606,301.00	0	32.25	11,168,166,345.00	27.56

No.	Kode	Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
19	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	49,362,910,603.00	12.5	29.57	15,316,648,765.00	31.03
20	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10,364,817,096.00	4.33	14.88	2,075,716,523.00	20.03
21	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	25,347,761,770.00	7.93	39.5	4,936,556,139.00	19.48
22	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6,324,039,189.00	0	30.54	1,418,686,082.00	22.43
23	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	11,516,460,403.00	20.69	37.32	2,890,312,704.00	25.1
24	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Cikole	14,161,322,502.00	28.89	26.85	2,450,970,665.00	17.31
25	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Gunung Puyuh	10,105,563,616.00	13	26.09	1,835,697,628.00	18.17
26	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Citamiang	11,570,204,268.00	10	25.58	2,128,183,194.00	18.39
27	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Warudoyong	11,639,014,556.00	6.6	24.71	2,042,236,725.00	17.55
28	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Baros	8,965,182,522.00	6.01	39.74	1,616,311,783.00	18.03

No.	Kode	Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
29	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Lembur Situ	10,865,119,013.00	15	33.23	2,035,293,295.00	18.73
30	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Cibeureum	10,475,247,796.00	30.42	58.85	1,875,498,969.00	17.9
31	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7,841,992,941.00	32.66	38.34	1,555,138,814.00	19.83
	JUMLAH		1,197,570,355,826.00	27.74	30.99	277,277,983,701.00	23.15

Kondisi sampai dengan : Triwulan I Tahun 2026

Penilaian rata-rata capaian kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diklasifikasikan dengan kriteria, sebagai berikut:

Tabel 2. 14 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria
91 ≤ 100	Sangat Tinggi
76 ≤ 90	Tinggi
66 ≤ 75	Sedang
51 ≤ 65	Rendah
≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Evaluasi RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026, diolah.

Secara umum capaian realisasi anggaran dan kinerja masing- masing perangkat daerah di Kota Sukabumi pada triwulan I tahun 2026 sangat rendah. Rata-rata perangkat daerah masuk dalam kriteria sangat rendah dalam hal penyerapan anggaran maupun kinerjanya, dan semua perangkat daerah yang masuk dalam sangat rendah.

2.7.3 Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD sampai Triwulan I Tahun 2026

Tabel 2. 15 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
Pemerintah Kota Sukabumi
Kondisi sampai dengan : Triwulan I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	180,495,369,501.00	92.3	28.24	90,412,779,132.00	50.09
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	61,767,350,000.00	93.86	30.23	27,864,004,245.00	45.11
3	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	0.00	0	0	0.00	0
4	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	100,000,000.00	0	0	0.00	0
5	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	0.00	0	0	0.00	0
6	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	0.00	0	0	0.00	0

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
7	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	15,000,000.00	0	0	0.00	0
8	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	0.00	0	0	0.00	0
9	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	0.00	0	0	0.00	0
10	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	0.00	0	0	0.00	0
11	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0.00	0	0	0.00	0
	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN					
12	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	482,441,535,611.00	65.94	53.59	237,334,269,567.00	49.19
13	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	48,715,820,340.00	63.19	28.05	15,425,007,859.00	31.66
14	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1,268,054,000.00	0	18.75	263,125,000.00	20.75

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
15	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	25,000,000.00	0	0	0.00	0
16	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5,919,132,400.00	0	0.62	1,599,000,000.00	27.01
	1.03.1.04.2.10.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG					
17	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14,637,052,584.00	89.84	32.88	8,027,020,463.00	54.84
18	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	740,000,000.00	4.51	8.33	731,886,994.00	98.9
19	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3,287,500,000.00	3.85	15	63,476,800.00	1.93
20	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3,045,262,000.00	3.35	4.55	79,413,200.00	2.61
21	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	235,000,000.00	0	5	221,358,000.00	94.19
22	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9,582,330,000.00	16.46	10.32	944,113,372.00	9.85

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
23	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3,699,590,843.00	45.33	100	6,621,222,893.00	178.97
24	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	20,906,020,138.00	11	33.98	3,098,652,424.00	14.82
25	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0.00	0	0	0.00	0
26	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	200,000,000.00	187.95	0	82,115,470.00	41.06
27	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	100,000,000.00	70	100	40,855,500.00	40.86
28	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	687,880,000.00	97.92	2.78	456,549,700.00	66.37
29	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	0.00	0	0	0.00	0
30	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	901,500,000.00	16.58	0	167,861,000.00	18.62
31	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	0.00	0	0	0.00	0

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN					
32	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,302,292,350.00	36.99	14.52	5,872,771,184.00	51.96
33	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	739,490,700.00	18	53.86	436,844,000.00	59.07
34	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	224,735,700.00	54	53.85	104,185,000.00	46.36
	1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
35	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,311,105,364.00	0	32.55	1,777,526,780.00	53.68
36	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	519,070,000.00	0	12.93	326,220,000.00	62.85
	1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL					
37	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,093,118,256.00	79.79	16.02	3,553,731,384.00	69.78

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
38	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	751,100,000.00	149.43	29.52	661,900,000.00	88.12
39	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	0.00	0	0	0.00	0
40	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	194,670,000.00	5.99	3.92	128,446,900.00	65.98
41	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	190,450,000.00	1824.82	16.46	101,325,000.00	53.2
42	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	266,400,000.00	7	3.43	114,300,000.00	42.91
43	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1,800,000.00	0	0	0.00	0
	2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA					
44	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,158,689,786.00	0	42.36	2,170,777,891.00	52.2
45	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	840,000,000.00	0	14.17	112,180,000.00	13.35

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
46	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	5,000,000.00	77.59	156.67	1,975,000.00	39.5
47	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	778,241,200.00	0	25	339,992,400.00	43.69
48	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	5,000,000.00	0	50	2,500,000.00	50
	2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK					
49	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,223,692,734.00	0	46.63	3,755,640,071.00	51.99
50	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	190,000,000.00	36.4	83.33	58,108,620.00	30.58
51	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	155,960,000.00	8.33	18.34	13,000,000.00	8.34
52	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	599,999,970.00	66.67	50	149,774,034.00	24.96
53	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0.00	0	0	0.00	0

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
54	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	5,000,000.00	0	50	2,900,000.00	58
55	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	401,679,547.00	1.19	26.67	9,622,500.00	2.4
56	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	65,400,000.00	0	12.5	0.00	0
57	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1,288,152,000.00	0	47.97	775,611,195.00	60.21
58	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1,787,100,000.00	0	31.25	128,021,000.00	7.16
	2.09.3.27.3.25.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN					
59	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,148,871,532.00	95.95	28.14	4,288,351,598.00	52.63
60	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	81,196,500.00	101.91	10	16,038,000.00	19.75
61	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	154,356,250.00	0	25	0.00	0

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
62	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1,209,413.00	121.21	0	0.00	0
63	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	103,531,250.00	102.16	25	60,320,000.00	58.26
64	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	0.00	100	0	0.00	0
65	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	0.00	101.3	0	0.00	0
66	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	219,810,000.00	125	18.75	4,675,000.00	2.13
67	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	45,016,750.00	102.27	16.67	24,018,000.00	53.35
68	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	19,275,000.00	85.07	16.67	11,250,000.00	58.37
69	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2,600,000.00	93.97	100	2,600,000.00	100
70	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	360,999,865.00	88.65	180	144,385,000.00	40

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.11.0.00.0.00.00.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
71	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21,045,162,656.00	42.83	37.59	11,356,386,601.00	53.96
72	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	7,000,000.00	0	0	0.00	0
73	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	30,000,000.00	0	6.25	15,275,924.00	50.92
74	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0.00	0	0	0.00	0
75	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	10,157,500.00	140	16.67	1,139,000.00	11.21
76	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	21,000,000.00	66.66	35.43	1,365,000.00	6.5
77	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0.00	0	0	0.00	0

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
78	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	60,000,000.00	100	5	60,000,000.00	100
79	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	12,000,000.00	100	65.87	1,950,000.00	16.25
80	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3,565,307,125.00	0	24.55	2,219,302,133.00	62.25
	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
81	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,321,332,690.00	99.47	143.41	2,241,593,898.00	51.87
82	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	34,955,000.00	89.08	1250000	15,720,000.00	44.97
83	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	4,999,700.00	99.52	0	0.00	0
84	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	0.00	130	0	0.00	0
85	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	0.00	100	0	0.00	0

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN					
86	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,877,296,470.00	44.26	19.28	4,216,967,724.00	32.75
87	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2,923,070,000.00	12.2	54.08	1,559,146,374.00	53.34
	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
88	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,129,958,951.00	107.4	53.45	2,629,526,004.00	51.26
89	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	295,060,000.00	52.27	64.12	204,122,652.00	69.18
90	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2,264,563,000.00	90.63	42.86	625,674,929.00	27.63
91	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	5,000,000.00	50	42.5	4,580,000.00	91.6
92	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	55,000,000.00	50	33.33	12,360,000.00	22.47

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.17.3.30.3.31.01.0000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
93	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,371,288,602.00	0	70.68	4,392,367,331.00	52.47
94	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	0.00	0	0	0.00	0
95	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	0.00	0	0	0.00	0
96	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	0.00	0	0	0.00	0
97	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0.00	0	0	0.00	0
98	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	25,000,000.00	0	0	1,360,000.00	5.44
99	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	388,000,000.00	0	0	0.00	0
100	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0.00	0	0	0.00	0

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
101	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	10,000,000.00	0	0	0.00	0
102	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	86,004,000.00	0	25	44,098,165.00	51.27
103	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	15,000,000.00	0	50	2,658,846.00	17.73
104	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	0.00	4.66	0	0.00	0
105	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	15,000,000.00	10.77	10.38	2,851,500.00	19.01
106	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	0.00	0	0	0.00	0
107	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	173,281,400.00	0	0	11,848,315.00	6.84
108	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	0.00	0	0	0.00	0
109	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	498,730,000.00	0	0	52,314,409.00	10.49

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
110	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,884,932,538.00	11.92	55	2,542,923,741.00	52.06
111	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	0.00	120	0	0.00	0
112	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	0.00	0	0	0.00	0
113	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	40,153,600.00	116.67	139.76	26,339,100.00	65.6
114	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	10,000,000.00	80	73.33	4,600,000.00	46
115	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	5,000,000.00	100	1520	1,760,000.00	35.2
	2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
116	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,629,770,409.00	34.35	24.22	2,948,739,994.00	52.38

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
117	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	754,925,000.00	139.42	53.5	354,295,000.00	46.93
118	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	949,349,778.00	1060606.1	40	568,275,580.00	59.86
119	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	0.00	0	0	0.00	0
120	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	105,000,000.00	0	0	45,000,000.00	42.86
121	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	0.00	0	450	0.00	0
122	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	0.00	0	0	0.00	0
123	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	510,369,000.00	50.97	305.33	179,509,000.00	35.17
	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
124	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,656,335,297.00	0	25.35	2,494,351,093.00	53.57

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
125	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	654,700,000.00	47.2	26.43	187,249,625.00	28.6
126	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	45,000,000.00	0	0	0.00	0
127	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	19,998,950.00	63.05	25	11,839,100.00	59.2
128	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	0.00	0	0	0.00	0
	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH					
129	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31,795,225,801.00	0	55.85	19,973,388,442.00	62.82
130	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8,360,970,550.00	0	169.35	4,574,961,199.00	54.72
131	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	360,409,950.00	0	35.71	49,583,530.00	13.76
	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD					

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
132	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32,621,431,348.00	0	50.34	20,064,238,887.00	61.51
133	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	16,741,479,255.00	50	98.39	12,766,857,465.00	76.26
	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
134	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,427,346,446.00	45.45	13.44	3,941,527,010.00	53.07
135	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,162,983,900.00	100	28.33	718,627,964.00	61.79
136	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,370,886,750.00	100	23.21	614,230,330.00	44.81
137	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	403,600,000.00	0	0	122,000,645.00	30.23
	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH					
138	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21,620,374,083.00	0	30.51	10,136,578,385.00	46.88

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
139	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2,167,862,687.00	33.33	171.9	460,247,733.00	21.23
140	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	85,000,000.00	95.62	127.67	69,688,562.00	81.99
141	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1,474,525,000.00	37.29	94.44	986,071,671.00	66.87
	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
142	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,723,745,939.00	0	83.63	2,966,421,896.00	51.83
143	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	316,838,250.00	0	15	128,427,500.00	40.53
144	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	283,455,000.00	0	28.52	77,036,050.00	27.18
	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH					
145	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,429,862,448.00	70.4	53.67	5,190,479,950.00	55.04

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
146	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1,416,743,955.00	33.04	29.2	829,207,500.00	58.53
147	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	669,854,000.00	0	24.82	110,456,000.00	16.49
	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN CIKOLE					
148	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,349,565,902.00	102.27	32.6	4,956,451,594.00	53.01
149	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	212,449,800.00	26.04	33.33	65,795,000.00	30.97
150	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4,530,393,200.00	72.22	12.31	1,677,185,600.00	37.02
151	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	58,913,600.00	60	40	31,881,200.00	54.12
152	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10,000,000.00	25	66.67	4,275,000.00	42.75
	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN GUNUNG PUYUH					

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
153	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,934,081,016.00	0	31.34	3,662,438,457.00	52.82
154	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	169,862,400.00	0	26.67	39,339,600.00	23.16
155	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,954,585,600.00	50	61.9	1,091,563,200.00	36.94
156	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	37,459,600.00	50	50	18,341,600.00	48.96
157	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9,575,000.00	50	30	4,650,000.00	48.56
	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN CITAMIANG					
158	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,114,015,468.00	4.87	56.17	4,328,871,781.00	53.35
159	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	182,121,600.00	100.33	50	73,612,000.00	40.42
160	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,219,614,400.00	50	23.21	1,107,405,000.00	34.4

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
161	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	44,452,800.00	50	50	22,226,400.00	50
162	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10,000,000.00	25	25	520,000.00	5.2
	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN WARUDOYONG					
163	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,867,064,556.00	0	65.23	4,202,342,756.00	53.42
164	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	175,640,400.00	0	50	78,933,400.00	44.94
165	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,546,522,400.00	33	52.88	1,280,022,400.00	36.09
166	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	39,787,200.00	50	50	20,131,200.00	50.6
167	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10,000,000.00	0	30.56	4,030,000.00	40.3
	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN BAROS					

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
168	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,322,941,022.00	0	67.87	3,335,926,387.00	52.76
169	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	173,615,500.00	0	100	49,577,800.00	28.56
170	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,436,531,000.00	0.65	17.76	823,700,600.00	33.81
171	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	29,995,000.00	29.38	25	17,625,600.00	58.76
172	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2,100,000.00	0	3.38	1,050,000.00	50
	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN LEMBUR SITU					
173	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,511,924,063.00	0	66.67	4,078,263,114.00	54.29
174	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	173,841,600.00	0	40.79	60,887,200.00	35.02
175	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,088,923,750.00	75	32.89	1,034,849,100.00	33.5

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
176	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	70,429,600.00	75	60	48,987,200.00	69.55
177	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20,000,000.00	75	100	18,500,000.00	92.5
	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN CIBEUREUM					
178	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,507,647,378.00	39.82	66.38	3,481,360,693.00	46.37
179	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	269,812,168.00	16.85	26.67	88,634,000.00	32.85
180	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,615,604,750.00	18	20	694,796,023.00	26.56
181	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	41,629,000.00	100	100	26,607,400.00	63.92
182	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40,554,500.00	30.56	30.56	8,045,000.00	19.84
	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
183	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,826,279,375.00	112.62	59.37	2,045,075,161.00	53.45
184	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	720,560,310.00	33.33	60	72,457,650.00	10.06
185	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	869,591,006.00	100	54.07	676,779,944.00	77.83
186	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	152,000,000.00	56.72	25.69	112,700,000.00	74.14
187	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	117,863,250.00	5.48	33.33	66,200,000.00	56.17
188	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2,155,699,000.00	27.08	48.59	1,062,285,000.00	49.28
	TOTAL		1,197,570,355,826.00	4394.13	3224.11	581,873,547,993.00	48.59

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan daerah yang disusun berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian serta kemampuan keuangan daerah pada tahun berjalan. Penyusunan kerangka ekonomi ini mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026, dinamika perekonomian daerah, serta berbagai perkembangan strategis di tingkat regional, nasional, dan global yang berpotensi memengaruhi pencapaian target pembangunan daerah.

Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran mengenai perkembangan dan proyeksi indikator ekonomi Kota Sukabumi sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah. Analisis dilakukan dengan memperhatikan perubahan asumsi ekonomi makro, kondisi fiskal, inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta berbagai faktor lainnya yang memengaruhi stabilitas dan kinerja perekonomian daerah.

Selanjutnya, kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah yang mencakup analisis terhadap perkembangan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah hingga akhir Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian kerangka pendanaan dilakukan sebagai respons terhadap perubahan kapasitas fiskal daerah, kebijakan pemerintah pusat, serta kebutuhan pendanaan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan dan penyelesaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah, kerangka pendanaan menjadi landasan dalam penyesuaian kebijakan anggaran agar alokasi sumber daya keuangan dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan penganggaran berbasis kinerja. Dengan demikian, perubahan alokasi anggaran diharapkan tetap mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang berkembang selama tahun berjalan.

Hasil kajian dan analisis terhadap kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 diharapkan menjadi dasar dalam proses penyesuaian perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan daerah.

Sehingga target kinerja pembangunan Kota Sukabumi pada Tahun 2026 dapat dicapai secara optimal sesuai dengan perkembangan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

3.1 Kondisi Perekonomian

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian global, nasional, regional, dan daerah selama tahun berjalan. Dinamika perekonomian global masih diwarnai oleh ketidakpastian akibat meningkatnya tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan internasional, perubahan kebijakan moneter di berbagai negara, serta meningkatnya risiko perubahan iklim yang memengaruhi ketahanan pangan dan rantai pasok global. Meskipun tekanan inflasi global cenderung menurun dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, proses pemulihan ekonomi dunia masih berlangsung tidak merata sehingga berdampak pada prospek perdagangan dan investasi internasional.

Pada tingkat nasional, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang relatif baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga di tengah perlambatan ekonomi global. Konsumsi rumah tangga, investasi, serta belanja pemerintah masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, tantangan masih dihadapkan pada upaya menjaga stabilitas inflasi, meningkatkan daya saing investasi, memperkuat produktivitas sektor riil, memperluas kesempatan kerja, serta mengantisipasi dampak ketidakpastian global terhadap kinerja ekspor, nilai tukar, dan arus modal.

Di tingkat Provinsi Jawa Barat, tantangan pembangunan ekonomi masih berkaitan dengan belum meratanya distribusi investasi antardaerah, penguatan daya saing industri manufaktur, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan jasa, serta pengendalian inflasi, khususnya pada kelompok bahan pangan. Selain itu, kapasitas fiskal pemerintah daerah yang masih terbatas di sebagian besar kabupaten/kota mendorong perlunya optimalisasi belanja daerah agar semakin produktif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Perubahan iklim juga menjadi tantangan yang semakin nyata karena berdampak terhadap produktivitas sektor pertanian, stabilitas pasokan pangan, dan peningkatan risiko bencana hidrometeorologi. Sejalan dengan kondisi tersebut, perekonomian Kota Sukabumi juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan penyesuaian kebijakan melalui Perubahan RKPD Tahun 2026.

Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun berjalan menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi daerah tetap perlu dijaga di tengah dinamika eksternal maupun internal. Di sisi lain, peningkatan investasi, penguatan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan produktivitas sektor unggulan menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, transformasi digital, penguatan ekonomi kreatif, pengembangan UMKM dan IKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah menjadi agenda strategis yang perlu terus diperkuat. Upaya tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah, memperluas kesempatan berusaha, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat terhadap berbagai risiko dan ketidakpastian.

Berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian hingga pertengahan Tahun 2026, beberapa tantangan utama pembangunan ekonomi Kota Sukabumi dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 meliputi:

1. Menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah di tengah dinamika perekonomian global dan nasional yang masih diwarnai ketidakpastian;
2. Meningkatkan investasi daerah melalui perbaikan iklim usaha, kemudahan perizinan, serta penguatan sektor-sektor unggulan daerah;
3. Mendorong transformasi ekonomi berbasis digital, inovasi, dan peningkatan daya saing UMKM, IKM, serta ekonomi kreatif;
4. Memperkuat pengendalian inflasi daerah dan menjaga ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas, kelancaran distribusi, dan stabilitas pasokan bahan pangan;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan perkembangan teknologi;
6. Mengoptimalkan efektivitas belanja daerah untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik; serta
7. Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan

3.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah;

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Daerah hingga pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2026 menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih berada pada jalur pertumbuhan yang positif. Berbagai indikator ekonomi memperlihatkan adanya keberlanjutan pemulihan dan penguatan aktivitas ekonomi yang didukung oleh meningkatnya konsumsi masyarakat, investasi, serta membaiknya aktivitas perdagangan dan jasa. Meskipun demikian, dinamika perekonomian masih dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti ketidakpastian ekonomi global, perkembangan kebijakan moneter, fluktuasi harga komoditas, serta tekanan inflasi yang memerlukan kewaspadaan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Struktur perekonomian Daerah masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebagai kontributor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang didukung oleh sektor konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta jasa keuangan dan asuransi. Dominasi sektor-sektor tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan dan jasa masih menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah, sejalan dengan karakteristik Kota Sukabumi sebagai kota perdagangan, jasa, dan pusat pelayanan wilayah.

Selama tahun berjalan, aktivitas pada sektor perdagangan, transportasi, akomodasi dan makan minum, jasa perusahaan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, serta sektor jasa lainnya menunjukkan perkembangan yang cukup baik seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas dunia usaha, dan pemulihan permintaan domestik. Di sisi lain, sektor konstruksi tetap memberikan kontribusi yang signifikan melalui pelaksanaan pembangunan infrastruktur pemerintah maupun investasi swasta. Sementara itu, sektor pertanian meskipun kontribusinya relatif kecil terhadap struktur PDRB Kota Sukabumi, tetap memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diperkirakan masih menjadi komponen terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Sukabumi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi pada sektor usaha dan pembangunan sarana prasarana.

Konsumsi pemerintah juga tetap berkontribusi dalam menjaga aktivitas ekonomi, terutama melalui percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan hingga pertengahan Tahun 2026 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain perlunya peningkatan investasi, penguatan produktivitas sektor unggulan, peningkatan daya saing UMKM dan IKM, pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan dunia kerja. Selain itu, pengendalian inflasi daerah, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan efektivitas belanja pemerintah daerah tetap menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.

Melalui Perubahan RKPD Tahun 2026, Pemerintah Kota Sukabumi mengarahkan berbagai kebijakan pembangunan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan iklim investasi, pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif, percepatan transformasi digital, peningkatan kualitas infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi, pengembangan sektor jasa dan perdagangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing daerah.

Perekonomian Tahun 2026 diperkirakan masih menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks dan dinamis, baik yang berasal dari faktor global, nasional, regional, maupun kondisi internal daerah. Tantangan tersebut muncul seiring dengan perubahan struktur ekonomi dunia, ketidakpastian geopolitik internasional, transformasi digital, perubahan iklim, serta tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih cepat dan merata.

Dalam konteks global, dinamika perekonomian dunia menuju tahun 2026 masih dibayangi ketidakpastian akibat meningkatnya tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan internasional, volatilitas sektor keuangan global, serta risiko perlambatan ekonomi dunia. Konflik geopolitik di Timur Tengah, rivalitas ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok, serta kecenderungan proteksionisme perdagangan.

Perekonomian global tahun 2026 diproyeksikan tumbuh stabil namun cenderung melambat dengan tingkat pertumbuhan sekitar 2,7–3,2 persen (menurut berbagai lembaga internasional). Meskipun inflasi global diproyeksikan mulai menurun, risiko tekanan harga energi dan pangan masih tetap tinggi. Bagi Kota Sukabumi sebagai kota perdagangan dan jasa, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas harga barang kebutuhan pokok, biaya distribusi, serta aktivitas usaha masyarakat.

Dalam konteks nasional, arah kebijakan pembangunan Tahun 2026 menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agenda pembangunan nasional difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, serta penurunan kemiskinan. Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Kota Sukabumi untuk mampu menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

Tantangan perekonomian Kota Sukabumi tahun 2026 akan berkisar pada aspek investasi dan daya saing, fiskal dan anggaran daerah, lapangan kerja dan produktivitas tenaga kerja, dan infrastruktur, serta transformasi digital dan penanggulangan kemiskinan. Tantangan utama yang akan dihadapi yaitu meningkatkan investasi produktif dan menarik investor ke wilayah Kota Sukabumi. Walaupun Kota Sukabumi menargetkan nilai investasi yang lebih tinggi dan berupaya membuka peluang investasi di sektor properti, *hospitality*, dan kuliner, keterbatasan ruang wilayah, infrastruktur yang belum terintegrasi sepenuhnya, dan daya saing relatif masih di bawah kota besar akan menjadi hambatan. Upaya optimalisasi investasi harus disertai perbaikan tata ruang dan dukungan fasilitas logistik yang memadai agar nilai investasi tumbuh berkelanjutan. Hal ini membutuhkan dukungan dokumen perencanaan tematik seperti RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detil Tata Ruang), serta RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal).

Kebutuhan pembangunan yang terus meningkat memerlukan inovasi pembiayaan dan penguatan kolaborasi multipihak. Ketergantungan besar pada dana transfer pusat dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tantangan lain yang akan dihadapi Kota Sukabumi. Kondisi fiskal yang rapuh ini menimbulkan risiko pembiayaan program pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Sukabumi perlu meningkatkan optimalisasi PAD, efektivitas belanja daerah, dan penguatan kerja sama investasi melalui skema kolaboratif seperti KPBU, CSR, dan kemitraan strategis lainnya.

Tantangan selanjutnya yaitu terkait penyediaan lapangan kerja yang cukup dan layak bagi penduduk lokal. Pemerintah Kota Sukabumi akan menekan angka pengangguran melalui pelatihan vokasi, program Pekerja Migran Indonesia (PMI), namun transformasi sektor ekonomi lokal perlu lebih cepat agar penciptaan lapangan kerja selaras dengan kebutuhan industri. Pasar tenaga kerja masih mencerminkan rendahnya serapan di sektor produktif yang padat karya. Maka dari itu diperlukan dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang selaras dengan kondisi tantangan tersebut dan urgen untuk segera disusun.

Keterbatasan infrastruktur logistik dan transportasi yang efisien merupakan tantangan lain yang akan dihadapi Kota Sukabumi.—Antisipasi dampak infrastruktur makro yaitu beroperasinya tol Bocimi seksi 3, menjadi pisau bermata dua, disatu sisi konektivitas ke Kota Sukabumi semakin lebar, disisi lain, Kota Sukabumi dituntut cepat untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru dan menata infrastruktur lainnya. Sehingga ke depan tidak akan terjadi stagnasi atau sekedar menjadi jalur perlintasan tanpa dampak ekonomi riil bagi warga lokal.

Transformasi digital dan percepatan adopsi teknologi menjadi tantangan sekaligus peluang strategis bagi perekonomian Kota Sukabumi Tahun 2026. Perkembangan ekonomi berbasis digital menuntut pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan industri lokal untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan pola produksi, pemasaran, dan perilaku konsumen yang semakin terintegrasi dengan teknologi. Digitalisasi usaha tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, serta perluasan akses pasar di tingkat regional maupun global. Namun demikian, percepatan transformasi digital di Kota Sukabumi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya literasi digital pelaku usaha, keterbatasan akses teknologi dan pembiayaan, serta belum optimalnya ekosistem industri berbasis inovasi dan teknologi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha lokal belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal dalam pengembangan usaha dan peningkatan nilai tambah produk. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan dan perencanaan pembangunan industri yang lebih terarah melalui penyusunan dokumen tematik Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) sebagai pedoman pengembangan industri daerah yang adaptif, inovatif, berdaya saing, dan berbasis transformasi digital.

Struktur ekonomi Kota Sukabumi yang masih didominasi sektor perdagangan dan jasa rentan terhadap fluktuasi permintaan dan perubahan iklim ekonomi nasional. Penurunan kemiskinan membutuhkan program pemberdayaan yang mendalam serta peningkatan kualitas pekerjaan di sektor formal. Selain itu, tekanan inflasi terutama pada komoditas pokok dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Walaupun ini merupakan isu yang lebih luas di Jawa Barat dan Indonesia, stabilitas harga tetap penting untuk perekonomian kota agar konsumsi rumah tangga tidak tergerus oleh kenaikan biaya hidup.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku atau ADHB dan Atas Dasar Harga Konstan atau ADHK. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, untuk mengetahui struktur perekonomian, untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran atau kesejahteraan, dan untuk mengetahui tingkat inflasi atau deflasi, berdasarkan pertumbuhan harga produsen.

PDRB atas dasar harga berlaku Kota Sukabumi tahun 2025 menunjukkan kinerja positif Kota Sukabumi mengalami pertumbuhan sebesar 5,32 persen sepanjang tahun 2025. Geliat positif dalam perekonomian terjadi pada seluruh kategori perekonomian di Kota Sukabumi. Secara umum, struktur perekonomian Kota Sukabumi masih didominasi oleh lima kategori lapangan usaha yaitu kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor), H (Transportasi dan Pergudangan), K (Jasa Keuangan dan Asuransi), F (Konstruksi) dan C (Industri Pengolahan). Kategori G memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Sukabumi yaitu sebanyak 6.433,07, Kategori H Transportasi dan Pergudangan memberikan kontribusi 2.215,47, Kategori K Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1.961,81 dan kategori F Konstruksi sebesar 1.186,37. Empat kategori ini secara konsisten terus memberikan kontribusi terbesar selama minimal 5 tahun kebelakang. Kontribusi terendah ada pada kategori E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Sebesar 21,26, Kategori D Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 31,36 dan Kategori L Real Estate sebesar 208,68.

Berdasarkan hasil analisis LQ (Location Quotient) dan DLQ (Dynamic Location Quotient) terdapat 3 kategori yang masuk sebagai sektor unggulan, yaitu: Kategori H Transportasi dan Pergudangan, Kategori O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Kategori R,S,T,U Jasa Lainnya.

Tabel 3. 1 Proyeksi Target Indikator Ekonomi Makro Kota Sukabumi disandingkan dengan Provinsi dan Nasional

Indikator	RPJMN 2026	JAWA BARAT 2026	KOTA SUKABUMI 2025	RPJMD KOTA SUKABUMI 2026	RKPD P KOTA SUKABUMI 2026
	(Target)	(Target)	(Capaian)	(Target)	(Target)
LPE (%)	5,7 – 6,2	4,96 - 5,69	5,11	4,96-5,96	5,43
PDRB perkapita (juta Rupiah)	63,9 – 65,6	0,38 - 52,75	44,76	50,38-51,35	51,02
Kontribusi PDRB	12,80	0,58		0,58	0,58
Tingkat Kemiskinan (%)	5,50 – 6,00	5,99 - 6,54	7,20	5,99-6,54	6,40
TPT (%)	6,30 – 6,65	7,41 - 7,82	8,34	7,25-7,91	8,00
Rasio Gini (Poin)	0,381 – 0,410	0,352 - 0,420	0,428	0,448-0,439	0,420
IPM / IMM (Poin) Indeks Pembangunan Manusia (Indikator Proxy. Poin)	0,57	79,07	77,69	78,31	78,31
Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton Co2eq/Miliar)	6,97	0,45	-	0,45	0,45
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin	64,31	61,53	61,28	61,53	61,79
Prevalensi Stunting (%)		21,96	16,8	22,11	21,96

Sumber: RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025 – 2029

Selain indikator makro di atas, maka berdasarkan hasil analisis dari capaian perekonomian terutama PDRB tahun-tahun sebelumnya, telah ditetapkan target dari PDRB sektor yang nantinya secara keseluruhan tentu akan mempengaruhi progres dari pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi. Capaian PDRB sektor tersebut seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 2 Capaian PDRB Sektor Kota Sukabumi Tahun 2023-2025

Lapangan Usaha	Capaian		
	2023	2024	2025
1	2	3	4
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.17	6,97	7,94
Indusri Pengolahan	4.64	5,97	3,2
Pengadaan Listrik dan Gas	3.19	-0,02	2,05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.09	5,10	2,03
Konstruksi	6.85	5,99	4,63
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.8	4,37	3,7
Transportasi dan Pergudangan	9.08	9,33	10,61
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.81	5,67	8,15
Informasi dan Komunikasi	6.17	4,63	9,38
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.33	2,99	1,76
Real Estat	5.54	4,21	6,78
Jasa Perusahaan	8.04	5,76	7,43
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Soaial Wajib	2.07	0,02	1,44
Jasa Pendidikan	5.79	5,07	6,85
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.72	5,27	7,79
Jasa lainnya	7.71	9,33	10,01
Produk Domestik Regional Bruto/LPE	5.12	5,11	5,32

Sumber: Hasil analisis Bappeda, 2025

Melihat capaian indikator makro yang telah ditampilkan sebelumnya, maka dapat dijelaskan realisasi dan proyeksi ekonomi makro Tahun 2026 sebagai berikut:

1) Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Perekonomian Kota Sukabumi menunjukkan ketangguhan struktural pasca-kontraksi tajam sebesar 1,48% pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Pemulihan ekonomi berjalan progresif dengan pertumbuhan sebesar 3,71% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 5,35% pada tahun 2022. Setelah sempat mengalami stabilisasi pada angka 5,12% di tahun 2023 dan 5,11% di tahun 2024, realisasi pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi sepanjang tahun 2025 tercatat positif sebesar 5,32%.

Di sisi lain, data Semester I tahun 2025 menunjukkan ekonomi kota sempat melaju hingga 5,43% , mengonfirmasi momentum pemulihan domestik yang kuat. Secara sektoral, struktur perekonomian Kota Sukabumi masih didominasi oleh lima kategori lapangan usaha utama, yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) yang menyumbang kontribusi terbesar senilai 36,83%, disusul oleh Transportasi dan Pergudangan (Kategori H), Jasa Keuangan dan Asuransi (Kategori K), Konstruksi (Kategori F), dan Industri Pengolahan (Kategori C). Pada tahun 2025, Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi mencatatkan akselerasi pertumbuhan tertinggi mencapai 9,08%.

Target LPE Kota Sukabumi dalam dokumen perencanaan tahun 2027 ditetapkan pada rentang 5,04% hingga 6,87%. Target ini diselaraskan dengan target jangka panjang kota dalam dokumen RPJPD yang memproyeksikan pertumbuhan optimal melalui pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata MICE (*Meeting, Incentives, Conventions, Exhibitions*), dan digitalisasi perdagangan. Upaya pencapaian target ini menuntut sinergi pembiayaan daerah serta perbaikan tata ruang kota guna mengatasi sempitnya wilayah daratan.

2) Proyeksi Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2025, persentase penduduk miskin di Kota Sukabumi berhasil ditekan menjadi 6,90%, mengalami penurunan sebesar 0,30% poin dibandingkan tahun 2024 yang bertengger di angka 7,20%. Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Kota Sukabumi tercatat sebanyak 23,17 ribu jiwa pada tahun 2025, berkurang sekitar 930 jiwa dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 24,10 ribu jiwa. Kinerja penurunan kemiskinan ini dicapai di tengah tren kenaikan Garis Kemiskinan (GK) Kota Sukabumi sebesar 4,15%, yakni dari Rp678.258 per kapita per bulan pada tahun 2024 menjadi Rp706.415 per kapita per bulan pada Maret 2025.

Anatomi pengeluaran masyarakat miskin di Kota Sukabumi menunjukkan sensitivitas yang tinggi terhadap harga makanan, di mana komoditas makanan memberikan kontribusi dominan sebesar 75,21% dalam pembentukan Garis Kemiskinan. Dinamika harga komoditas pangan pokok seperti beras, bawang merah, dan cabai sangat mempengaruhi fluktuasi angka kemiskinan kota. Penurunan kemiskinan pada tahun 2025 didorong oleh penguatan daya beli melalui pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tumbuh mencapai 5,59% pada Triwulan I tahun 2025.

Target persentase penduduk miskin Kota Sukabumi untuk tahun 2027 diproyeksikan secara progresif pada kisaran 5,19% hingga 5,72 %. Proyeksi ini menuntut perluasan akses kelompok rentan terhadap pendidikan vokasi, layanan kesehatan dasar, sanitasi layak, serta penguatan usaha mikro berbasis DTSEN (*Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional*)

3) Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Realisasi TPT Kota Sukabumi berdasarkan hasil Sakernas per Agustus 2025 berada pada angka 8,19%, menunjukkan penurunan sebesar 0,15% poin dibandingkan Agustus 2024 yang tercatat sebesar 8,34%. Penurunan ini melanjutkan tren positif jangka panjang setelah TPT sempat menyentuh angka 12,17% pada tahun 2020 akibat disrupsi rantai pasok industri perkotaan selama pandemi. Meskipun mengalami penurunan, angka TPT Kota Sukabumi masih berada di atas rata-rata TPT Provinsi Jawa Barat (6,77%) dan Nasional (4,85%).

Di balik penurunan tipis angka TPT tersebut, terdapat pergeseran struktural ketenagakerjaan yang signifikan. Jumlah angkatan kerja di Kota Sukabumi pada Agustus 2025 melesat naik sebesar 11,77 ribu orang menjadi 186,15 ribu orang, sejalan dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 3,15% poin dari 62,58% menjadi 65,73%. Jumlah penduduk bekerja tercatat naik sebanyak 11,08 ribu orang menjadi 170,91 ribu orang.

Namun, penyerapan tenaga kerja didominasi oleh perluasan sektor informal yang naik sebanyak 15,43 ribu orang hingga mencakup 53,30% (91,10 ribu orang) dari total tenaga kerja. Sebaliknya, penyerapan sektor formal justru mengalami kontraksi sebesar 4,36 ribu orang. Dari sisi latar belakang pendidikan, TPT lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengalami lonjakan drastis sebesar 6,88% poin, sedangkan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencatatkan penurunan TPT terbesar sebesar 6,37% poin.

Target penurunan TPT Kota Sukabumi pada tahun 2027 dipatok pada kisaran 7,37% hingga 7,93%. Target ini menuntut reformasi pendidikan vokasi perkotaan guna menyelaraskan kompetensi pencari kerja muda dengan kebutuhan riil dunia usaha dan industri (*link and match*).

4) Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kota Sukabumi secara konsisten mempertahankan status pembangunan manusia kategori "Tinggi" yang telah diraih sejak tahun 2013. Realisasi IPM Kota Sukabumi pada tahun 2025 tumbuh positif mencapai 78,23 poin.

Peningkatan sebesar 0,54 poin atau 0,70% dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 77,69 poin. Selama rentang periode tahun 2020 hingga 2025, IPM Kota Sukabumi tumbuh rata-rata sebesar 0,83% per tahun.

Akselerasi nilai IPM tahun 2025 ditopang oleh perbaikan dimensi pembentuknya, dengan rincian sebagai berikut:

a) Dimensi Kesehatan (Umur Panjang dan Hidup Sehat): Direpresentasikan oleh Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang mencapai 75,45 tahun pada 2025, meningkat 0,34 tahun dari tahun 2024 yang berada pada level 75,11 tahun.
b) Dimensi Pengetahuan (Pendidikan): Harapan Lama Sekolah (HLS) tumbuh menjadi 13,63 tahun, yang berarti rata-rata anak usia 7 tahun berpeluang menempuh pendidikan hingga jenjang Diploma II. Sementara itu, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas merangkak naik menjadi 10,39 tahun.
c) Dimensi Standar Hidup Layak (Daya Beli): Pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan tercatat sebesar Rp12,69 juta pada tahun 2025, melonjak sebesar Rp440 ribu atau tumbuh sebesar 3,59% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam skala regional, IPM Kota Sukabumi menempati peringkat ke-7 dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Namun, dalam kategori perkotaan, capaian IPM Kota Sukabumi berada pada posisi yang relatif rendah karena hanya lebih baik dari Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar. Pemerintah Kota Sukabumi menetapkan target IPM tahun 2027 secara optimis sebesar 78,75 poin , yang diupayakan melalui penguatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan *stunting*, serta pemerataan akses fasilitas pendidikan menengah.

5) Proyeksi Indeks Gini/ Gini Rasio

Rasio Gini merupakan indikator yang digunakan untuk memantau ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat dengan rentang nilai antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna).

Kota Sukabumi mencatatkan perbaikan ketimpangan pengeluaran yang sangat impresif pada tahun 2025. Realisasi Rasio Gini turun tajam menjadi 0,370 poin, membaik secara signifikan dibandingkan tahun 2024 yang berada pada level 0,428. Penurunan ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran masyarakat bergeser ke arah yang lebih merata, sehingga risiko gesekan sosial akibat polarisasi ekonomi dapat diminimalisir.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Pinjaman Bank, Dana Umat, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/*Public Private Partnership* (PPP), swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan di Kota Sukabumi yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Sejalan dengan arah kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Barat, arah kebijakan ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2026, antara lain:

1. Menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru

   Dilakukan dengan peningkatan produktivitas, peningkatan pusat-pusat pertumbuhan baru, pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital, dan meningkatkan industri pariwisata MICE

2. Meningkatkan sisi permintaan yang didukung oleh sektor riil, eksternal, fiskal, dan keuangan

   Dilakukan dengan menjaga konsumsi masyarakat, investasi yang berkualitas, peningkatan ekspor, kebijakan fiskal adaptif, dan mendorong partisipasi swasta serta pembiayaan inovatif

3. Mengurangi pengangguran dan kemiskinan

   Dilakukan dengan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan dan inovatif serta perlindungan sosial yang integratif, adaptif, dan inklusif

4. Meningkatkan SDM berkualitas yang kompetitif

   Dilakukan dengan peningkatan layanan dasar, peningkatan modal manusia, dan peningkatan modal sosial budaya.

3.3 Kebijakan Umum Perubahan RKPD Tahun 2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK.

Perubahan APBD Kota Sukabumi Tahun 2026 dilakukan karena diperlukannya penyesuaian perolehan pendapatan daerah, penyesuian alokasi belanja daerah, dan perubahan pada sisi sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA 2026. Selain itu terjadinya dinamika pada beberapa kegiatan yang memerlukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sesuai dengan peralihan peruntukan output program dan kegiatan.

Prioritas pembangunan pada Perubahan APBD Kota Sukabumi Tahun 2026 akan disesuaikan dan mengacu pada RKPD dan Rancangan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029, yang di dalamnya mencakup program-program prioritas dan kebijakan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan perhitungan SiLPA tahun 2025 menghasilkan SiLPA, maka Pemerintah Kota Sukabumi akan memanfaatkannya untuk *program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas* yang dibutuhkan, penambahan output sub kegiatan, penambahan volume output sub kegiatan yang telah dianggarkan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

3.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan RKPD Tahun 2026 pada hakekatnya adalah menyesuaikan belanja dengan pendapatan yang ada, dengan mempertimbangkan seluruh jenis pendapatan yang diterima baik berupa pendapatan asli daerah maupun berupa pendapatan transfer ataupun lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah pada perubahan RKPD Tahun 2026, adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan;
2. Melakukan digitalisasi pajak dan retribusi daerah;
3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah;
4. Normalisasi pajak daerah, BUMD dan BLUD;
5. Mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah; serta meningkatkan kemampuan aparatur;
6. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisifasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi.

Proses perencanaan pendapatan daerah dalam penyusunan perubahan RKPD Tahun 2026 dilakukan dengan asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
2. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah diasumsikan naik pada seluruh komponen yaitu Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Deviden dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperhitungkan akan ada sedikit penurunan, karena adaya pengurangan dari SiLPA tahun anggaran 2025 bersumber kapitasi JKN.
4. Pendapatan daerah diasumsikan sebesar Rp. 1,254,979,192,596,- atau bertambah sebesar Rp. 81,322,536,430 - atau sekitar 6,93 persen dari pendapatan APBD murni. Secara rinci asumsi pendapatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pendapatan Asli Daerah bertambah sebesar Rp. 81,322,536,430,- atau sebesar 6,93 persen, dengan rincian:
      1) Pajak Daerah diasumsikan bertambah sebesar Rp. 18,796,588,843,- atau 15,06 persen menjadi sebesar Rp. 143,613,595,178.00,-. Dari APBD Murni Rp. 124,817,006,335

Penambahan tersebut didapatkan terutama dari optimalisasi sumber PBBP2, PBJT listrik, PKB dan BBNKB;

2) Retribusi Daerah diasumsikan bertambah sebesar Rp. 2,200,930,591,- atau 5,08 persen, hal tersebut berasal dari penambahan retribusi pelayanan kebersihan, jasa usaha serta perizinan persetujuan bangunan gedung;

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berkurang sebesar Rp. 1,093,521,499 atau sekitar 22,89 persen yang berasal dari pengurangan deviden BJB;

b. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah bertambah sebesar Rp. 26,626,291,822 - atau sebesar 7,34 persen menjadi Rp. 389,395,254,334.00,-,

c. Pendapatan Transfer bertambah sebesar Rp. 30,605,203,675,- atau sebesar 4.80 persen dibanding dengan APBD murni Tahun 2026. Secara rinci perubahan pendapatan transfer :

1) Pendapatan transfer pusat diasumsikan bertambah sebesar Rp 31,935,511,710,-;

2) Pendapatan transfer antar daerah berkurang Rp. -1,777,954,899 sebesar atau 1.24 persen;

3) Lain-Lain Pendapatan yang sah sebesar Rp 2,000,000,000,- atau bertambah, karena adanya Penambahan transfer hibah dari Pemeirntah Pusat berupa Bantuan pemerintah.

Target/proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026

NO	URAIAN	APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2026 (Perubahan)	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	491,543,459,281	535,690,883,607	584,408,216,362.00	48,717,332,755	9.09
4.1.01	Pajak Daerah	31,356,923,772	124,817,006,335	143,613,595,178.00	18,796,588,843	15.06
4.1.02	Retribusi Daerah	7,446,506,402	43,326,992,504	45,527,923,095.00	2,200,930,591	5.08
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,677,922,257	4,777,922,256	5,871,443,755.00	1,093,521,499	22.89
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	319,183,095,278	362,768,962,512	389,395,254,334.00	26,626,291,822	7.34
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	814,581,248,924	637,965,772,559	668,570,976,234.00	30,605,203,675	4.80
4.2.01	1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	770,398,189,719	596,636,824,000	594,858,869,101	31,935,511,710	-0,30
	1.1. Dana Transfer Umum	611,814,935,398	453,234,773,000	486,948,239,609.00	33,713,466,609	
	1 2. Dana Transfer Khusus	153,056,913,321	143,402,051,000	141,624,096,101.00	-1,777,954,899	(1.24)
4.2.02	2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	44,183,059,205	41,328,948,559	39,998,640,524.00	-1,330,308,035	(3.22)
	A. Dana Bagi Hasil	43,558,597,276	41,328,948,559	38,207,789,924	-3,121,158,635	
	B. Bantuan Keuangan	2,418,994,480		1,790,850,600	1,790,850,600	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16,369,197,166	-	2,000,000,000	2,000,000,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1,322,493,905,371	1,173,656,656,166	1,254,979,192,596.00	81,322,536,430	6.93

Sumber: Hasil analisis Bappeda, 2026

3.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yaitu meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, serta lainnya sebagai pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu mencakup pencapaian Visi dan Misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 maupun tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rancangan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan belanja yang memenuhi azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan, maka penyusunan perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026 mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Nomor: B/000.7/SE.24/20.3/BAPPEDA/2026 tentang Penyusunan Usulan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 serta Peremendagri Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta perubahan RKPD 2026 berdasarkan kebijakan sebagai berikut:

1. Dilakukan dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan pembangunan dengan Visi, Misi dan Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Periode Tahun 2025-2030, juga program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI;
2. Ditujukan dalam memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat, seperti gaji, tunjangan, honorarium, belanja jasa kantor listrik, air, telpon, internet, belanja premi auransi, belanja sewa gedung, perlengkapan dan peralatan.

3. Mengakomodir kegiatan-kegiatan DAK Luncuran dan pengembalian sisa Bantuan Keuangan Provinsi tahun sebelumnya serta sumber anggaran lainnya sesuai ketentuan (SiLPA);
4. Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian target SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
5. Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan pencapaian target program unggulan dan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah;
6. Adanya kebijakan pusat dan provinsi yang mendasarinya;
7. Seluruh perubahan agar memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama waktu dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan hingga akhir tahun 2026.

Anggaran belanja daerah pada perubahan RKPD Tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp 1,240,723,970,741.97,- bertambah sebesar Rp 115,894,920,318,- atau 10,37 persen dari pagu APBD murni Tahun 2026. Penambahan pagu belanja ini dikarenakan adanya penyesuaian dengan estimasi pendapatan yang sudah disampaikan pada bagian sebelumnya serta sudah mengakomodir SiLPA yang sudah ditetapkan.

Secara rinci target anggaran belanja pada perubahan RKPD Tahun 2026 terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 4 Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025

REK	STRUKTUR APBD	APBD TA 2025	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	- / +	%
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7
2	BELANJA DAERAH					
2.1	Belanja Operasi	1,252,669,546,822	1,124,829,050,424	1,240,723,970,741.97	115,894,920,318	10.30
2.1.1	Belanja Pegawai	568,853,978,239	549,335,726,691	557,200,994,813.00	7,865,268,122	1.43
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	630,510,247,231	545,612,452,727	639,667,626,922.97	94,055,174,196	17.24
2.1.5	Belanja Hibah	52,971,821,352	29,880,871,006	43,855,349,006.00	13,974,478,000	46.77
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	333,500,000	-	-		
2.2	Belanja Modal	68,815,703,011	60,558,845,102	54,526,277,094.00	-6,032,568,008	(9.96)
2.2.01	Belanja Modal Tanah	718,690,000	276,130,500	856,130,500.00	580,000,000	210.05
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38,952,423,404	27,600,275,664	31,604,447,994.00	4,004,172,330	14.51
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13,480,902,651	14,701,098,000	10,242,798,000.00	-4,458,300,000	(30.33)
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11,203,689,481	13,641,270,138	7,337,433,000.00	-6,303,837,138	(46.21)
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,459,997,475	4,340,070,800	4,472,467,600.00	132,396,800	3.05
2.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	-	13,000,000.00		
2.3	Belanja Tidak Terduga	3,731,639,035	10,391,595,318	5,183,660,569.03	-5,207,934,749	(50.12)
	JUMLAH BELANJA	1,325,216,888,868	1,195,779,490,844	1,300,433,908,405.00	104,654,417,561	8.75
	Total Surplus/(Defisit)	-2,722,983,497	-22,122,834,678	(45,454,715,809.00)	-23,331,881,131	105.47

Sumber: Hasil analisis Bappeda, 2026

Dari data diatas dapat digambarkan bahwa terdapat perubahan uraian belanja secara keseluruhan, baik belanja operasi, belanja modal ataupun belanja tidak terduga sebagai berikut:

a. Belanja pegawai bertambah sebesar Rp 7,865,268,122,- atau sebesar 1.43 persen, hal tersebut untuk menutupi kekurangan gaji dan tunjangan PNS termasuk pemenuhan gaji CPNS dan PPPK;
b. Belanja Barang dan Jasa bertambah sebesar Rp 94,055,174,196,- Atau sebesar 17.24 persen dipergunakan untuk operasional kantor serta pemenuhan program prioritas dan strategis lainnya;
c. Belanja Hibah bertambah sebesar Rp 13,974,478,000,- atau 46.77 persen, untuk belanja hibah program P2RW;
d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin berkurang sebesar Rp -6,032,568,008,- atau sebesar 9.96 persen;
e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan berkurang sebesar Rp -4,458,300,000,- atau sebesar -30.33 persen,
f. Belanja Tidak Terduga berkurang sebesar Rp -5,207,934,749._ yaitu adanya pengalihan untuk menutup defisit rencana belanja prioritas hasil verifikasi.

3.3.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran pada Perubahan Anggaran adalah SiLPA hasil audit BPK Tahun 2025 sebesar Rp. 46,954,715,809.00,-. Adapun secara rinci SiLPA tahun 2025 tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 5 Rekapitulasi SiLPA Tahun 2025

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	SiLPA di Kas Daerah	26,354,372,579.00
2	Kas di BLUD	20,107,581,420.00
	- BLUD RSUD R Syamsudin S.H.	18,416,139,856.00

	- BLUD Puskesmas Selabatu	478,634,859.00
	- BLUD RS Al Mulk	1,212,806,705.00
3	Dana kapitasi JKN	115,399,327.00
4	Kas Dana BOS PUSAT REGULER	12,018,167.00
5	Kas BOK	365,344,316.00
	Jumlah SiLPA	46,954,715,809.00

Sumber: Hasil analisis Bappeda, 2026

Dari data diatas, SiLPA Tahun 2025 yang berasal dari TKD Pusat akan dianggarkan kembali sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan. SiLPA bersumber Dana lain juga akan dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian hanya SiLPA yang bersumber dari kas daerah saja yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk menutup defisit yang terjadi akibat anggaran belanja yang lebih besar dari pendapatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka kebijakan umum Pembiayaan Daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Untuk SiLPA Tahun 2025 yang berasal dari TKD Pusat, dengan ketentuan sebagai bereikut:
   a. Bersumber DAU SG, DBH SG, DAK Fisik dan Insentif fiskal akan dibelanjakan kembali di Perangkat Daerah yang peruntukannya disesuaikan dengan juknis yang telah ditetapkan
   b. Bersumber DAK Non Fisik akan menjadi pengurang pendapatan dana transfer untuk komponen DAK Non Fisik sesuai rincian SiLPA tersebut
2. Untuk SiLPA Tahun 2025 yang berasal dari dana lain, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Bersumber Bankeu Provinsi akan dikembalikan kepada kas daerah Provinsi Jawa Barat
   b. SiLPA BLUD RSUD R Syamsudin SH dan AL-Mulk, BLUD Puskesmas Selabatu, Jaminan Kesehatan Nasional, BOK Puskesmas dan Bos Pusat dianggarkan kembali dalam rencana belanja perubahan RKPD Tahun 2025 pada perangkat daerah berkenaan yaitu RSUD R Syamsudin SH, RSUD Al-Mulk, BLUD Puskesmas Selabatu, Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   c. Untuk SiLPA Tahun 2025 yang berasal dari Kas Daerah setelah dikurangi SiLPA yang telah dianggarkan pada APBD murni maka akan dianggarkan kembali untuk pemenuhan belanja pegawai, prioritas pembangunan serta program lainnya sesuai kebutuha.

Target/proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6 Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026

REK	STRUKTUR APBD	APBD TA 2025	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	- / +	%
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	49,677,699,306	23,894,593,300	46,954,715,809.00	23,060,122,509	96.51
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	49,677,699,306	23,894,593,300	46,954,715,809.00	23,060,122,509	96.51
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	-	1,771,758,622	1,500,000,000.00	-271,758,622	(15.34)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	1,771,758,622	1,500,000,000.00	-271,758,622	(15.34)
	Pembiayaan Neto	49,677,699,306	22,122,834,678	45,454,715,809.00	23,331,881,131	105.47
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	46,954,715,809	-	-	-	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 23,331,881,131,- yaitu berasal dari SiLPA hasil audit BPK. Pada APBD murni Tahun 2025 penerimaan pendapatan dianggarkan sebesar Rp 46,954,715,809.00,-, namun demikian ternyata SiLPA yang berasal dari kasda yang dapat dipergunakan untik menutup pembiayaan yang sudah dianggarkan sebelumnya hanya sebesar Rp. 26,354,372,579.00,-. Berdasarkan hasil perhitungan SiLPA tersebut ternyata terdapat kekurangan atau defisit sehingga harus ditutupi dengan penambahan pendapatan yang sudah dimasukan pada komponen pendapatan daerah.

Untuk pengeluaran pembiayaan berkurang dari perubahan, yaitu dari sebesr Rp. 1,771,758,622,- menjadi Rp. 1,500,000,000.00 atau selisih sebear 271,758,622, pembiayaan maka didapatkan angka pembiayaan netto sebesar Rp 45,454,715,809.00,-, angka tersebut sama dengan jumlah defisit pada belanja daerah sehingga SiLPA akhir adalah Rp 0 (nol rupiah).

3.3.4 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung implementasi pembangunan daerah terutama pada program prioritas dan unggulan, maka diperlukan pembiayaan yang cukup besar. Karena besarnya kebutuhan anggaran tersebut dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan, maka Kota Sukabumi dituntut untuk senantiasa terus mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam rangka pembangunan daerah.

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kota Sukabumi dan terbatasnya sumber–sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun Kota Sukabumi. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan non APBN dan APBD antara lain adalah: 1) Dana Masyarakat/Umat; 2) Corporate Social Responsibility (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL); 3) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); 4) Pinjaman Daerah; dan 6) Hibah.

Berdasarkan kajian awal yang dilakukan Kota Sukabumi akan mencoba menjajaki melakukan mekanisme pembiayaan dengan pola Pinjaman Daerah sebagai berikut:

1) Pinjaman Daerah

   Salah satu yang skema yang sedang dijajaki dalam proses pelaksanaan pembangunan adalah dengan melakukan pinjaman daerah kepada PT SMI.

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 4 Pengertian tentang pinjaman daerah tersebut digunakan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Konsep dasar pinjaman daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 pada prinsipnya diturunkan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Persyaratan umum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman adalah sebagai berikut:

a) Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Penerimaan umum APBD tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.
b) Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) paling sedikit 2,5 (dua koma lima). DSCR dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DSCR} = \frac{[\text{PAD} + \text{DAU} + (\text{DBH}-\text{DBH DR})] - \text{BW}}{\text{Pokok Pinjaman}+\text{Bunga}+\text{Biaya Lain}} \geq 2{,}5$$

c) Dalam hal Pinjaman Daerah diajukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah harus tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah.
d) Khusus untuk Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Pinjaman daerah melalui PT SMI ini nantinya akan dipergunakan untuk melakukan pembiayaan bagi proyek infrastruktur di Kota Sukabumi yaitu pembangunan jalan kota maupun jalan lingkungan, pedestrian, penanganan sampah dan penerangan jalan umum di seluruh wilayah Kota Sukabumi.

Pemanfaatan skema pinjaman melalui PT SMI ini dalam rangka percepatan pencapaian target-target pembangunan daerah serta mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kota Sukabumi mengoptimalkan kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan non konvensional. Sebagaimana diamanatkan dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, pemenuhan kebutuhan pendanaan program prioritas tidak hanya bergantung pada pendapatan asli daerah dan dana transfer, melainkan juga memanfaatkan alternatif pembiayaan daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Skema pinjaman melalui lembaga pembiayaan pembangunan seperti PT SMI ditempatkan sebagai salah satu instrumen strategis pembiayaan daerah.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil atau *outcome* program Perangkat Daerah. Selanjutnya, tujuan dan sasaran tersebut dikolaborasikan dengan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sehingga dapat mencapai visi yang telah ditentukan.

Visi pembangunan jangka menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta menjadi dasar perumusan tujuan, saaran dan prioritas pembangunan Daerah. Visi pembangunan jangka menengah Daerah menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahunkedepan yaitu mulai Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, visi pembangunan jangka menengah harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah daerah difokuskan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan. Adapun visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Sukabumi adalah:

"Mewujudkan Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, dan Nasionalis"

Penjelasan visi di atas adalah sebagai berikut:

1. Inovatif

   Inovatif menekankan pentingnya kreativitas dan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Kondisi ini akan tergambar dengan:

   a. Terintegrasikannya teknologi terbaru dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik;

b. Diadopsinya metode baru untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat pelayanan;

c. Berkembangnya ide-ide baru dari semua tingkatan pemerintahan dan masyarakat untuk solusi yang lebih baik;

d. Tersedianya pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam teknologi dan inovasi;

e. Terciptanya lingkungan yang mendukung pengembangan produk, layanan, atau teknologi baru yang inovatif dan usaha kecil dengan berbagai akses ke sumber daya dan teknologi; dan

f. Terjalinnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga penelitian dalam pengembangan solusi baru untuk masalah lokal.

2. Mandiri

Mandiri berfokus pada kemampuan untuk berdiri sendiri tanpa terlalu bergantung pada pihak luar. Kondisi ini akan tergambar dengan:

a. Meningkatnya kewirausahaan lokal dan ekonomi kreatif;
b. Terkelolanya sumber daya alam dan manusia secara efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang tanpa mengandalkan bantuan eksternal;
c. Tersedianya pelatihan keterampilan dan dukungan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan memecahkan masalah secara mandiri; dan
d. Terfasilitasnya masyarakat untuk mengatasi tantangan secara efektif tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal.

3. Agamis

Agamis berarti menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan. Kondisi ini akan tergambar dengan:

a. Disusunnya berbagai kebijakan yang sejalan dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat;
b. Diterapkannya prinsip-prinsip etika dan moral yang diambil dari ajaran agama dalam tindakan dan keputusan pemerintah;
c. Dijaminnya kebebasan beragama dan terjaganya kerukunan antar umat beragama;

d. Terbangunnya dan terpeliharanya fasilitas ibadah serta terdukungnya kegiatan keagamaan yang positif; dan
e. Berkembangnya perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dalam interaksi sosial dan pelayanan publik.

4. Nasionalis

Nasionalis berfokus pada cinta tanah air dan kepentingan nasional. Kondisi ini tergambar dengan:

a. Ditempatkannya kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;
b. Tergalangnya semangat persatuan dan kesatuan di antara seluruh rakyat untuk memperkuat identitas nasional;
c. Dipertahankannya dan dipromosikannya budaya serta tradisi lokal yang merupakan bagian dari kekayaan nasional; dan
d. Teredukasinya masyarakat tentang pentingnya Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Korelasi antara Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi dengan Visi Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 terletak pada masing-masing aspek yang saling melengkapi dan memperkuat. Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota "Mewujudkan Masyarakat yang Inovatif, Mandiri, Agamis, dan Nasionalis" mendukung pencapaian visi jangka panjang "Kota Sukabumi Kreatif, Unggul, Berbudaya, dan Berkelanjutan". Dengan mempromosikan inovasi dan kreativitas, masyarakat diharapkan lebih siap untuk berkontribusi pada pengelolaan kota yang unggul. Kemandirian masyarakat memperkuat upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan. Nilai-nilai agama yang sejalan dengan budaya lokal akan menciptakan harmoni sosial. Semangat nasionalis akan mendukung pelaksanaan kebijakan berkelanjutan dalam menjaga sumber daya untuk generasi mendatang. Karena itu, semua elemen ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan kota yang unggul dan sejahtera.

Dalam mewujudkan visi tersebut maka telah dirumuskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah atau dikenal dengan nama Misi. Terdapat lima Misi RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat berbasis vokasi serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat berbasis vokasi bertujuan untuk mempersiapkan warga kota dengan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan mempromosikan kesempatan kerja yang lebih baik. Adapun peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga kota mendapatkan akses yang efektif, efisien, dan berkualitas terhadap layanan kesehatan. Pengembangan dan penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi diarahkan secara spesifik untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan kerja masyarakat, dengan rincian sasaran berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut:

a. Jenjang Pendidikan Menengah (SMA/MA): Peserta didik dan lulusan baru *(fresh graduates)* sekolah kejuruan untuk penyelarasan kurikulum berbasis industri dan magang.
b. Jenjang Pendidikan Tinggi (D1/D2/D3/D4): Mahasiswa/ lulusan diploma untuk peningkatan sertifikasi kompetensi keahlian standar nasional/internasional.
c. Non-Formal/Masyarakat Umum (Pencari Kerja & Putus Sekolah): Pemuda usia produktif (15-24 tahun) dan angkatan kerja pencari kerja yang dilatih melalui Balai Latihan Kerja (BLK) atau Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta.

2. Pengamalan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan memperkuat toleransi, ketenteraman serta ketertiban umum

   Pengamalan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan penuh rasa saling menghargai. Sikap saling menghargai dengan mempromosikan toleransi dan menghargai keberagaman yang ada di masyarakat tersebut akan memperkuat kohesi dan integrasi sosial. Hal ini didukung dengan upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum untuk menjaga kondusif kota dan juga untuk menjaga iklim investasi.

3. Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata

   Pengembangan ekonomi kreatif bertujuan untuk memanfaatkan potensi kreativitas dan inovasi dalam menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing kota. Pengembangan ekonomi kreatif ini tidak lepas dari pengembangan pariwisata yang lebih diarahkan pada industri MICE (*Meeting, Incentives, Conventions, Exhibitions*).

Pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada pendekatan berbasis penghasilan *(revenue-generating creative economy)* melalui penguatan rantai nilai *(value chain)* dari hulu ke hilir. Fokus kebijakan tidak hanya pada pembinaan keahlian, melainkan pada peningkatan omzet pelaku Ekraf, akses pasar digital/ekspor, fasilitasi HKI (Hak Kekayaan Intelektual), penyerapan tenaga kerja lokal, serta penciptaan nilai tambah ekonomi bagi subsektor unggulan Kota Sukabumi.

4. Peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur publik

   Peningkatan kualitas lingkungan hidup ditujukan agar prinsip keberlanjutan menjadi arus utama dalam pembangunan mengingat ancaman degradasi lingkungan dan perubahan iklim semakin nyata terjadi. Sementara itu, pengembangan infrastruktur ditujukan agar masyarakat memiliki akses yang adil terhadap kebutuhan dasar serta peluang untuk pengembangan kehidupan yang lebih baik.

5. Penguatan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik berkualitas

   Penguatan tata kelola pemerintahan ditujukan untuk memastikan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan didukung aparatur yang profesional, birokrasi yang transparan dan akuntabel, sistem pemerintahan berbasis digital, dan tata kelola yang inovatif.

Pelaksanaan pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2026 merupakan tahap pembangunan tahun kedua dari RPJMD Tahun 2025 – 2029. Perencanaan pembangunan Kota Sukabumi menggunakan pendekatan substasi perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (T-H-I-S), yang secara implementatif dilakukan melalui:

1. Menjaga kesinambungan melalui penyesuaian program prioritas pembangunan daerah dengan Visi, 5 (lima) Misi, 5 (lima) Tujuan dan 20 (dua puluh) sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2025 – 2029.

2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas serta sasaran prioritas pembangunan Kota Sukabumi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow output priority program*) serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

3. Menjaga dan memastikan semua tahapan perencanaan dilalui dengan baik dan benar serta tepat waktu dengan mengimplementasikan SIPD serta sistem digital lainnya yang terintegrasi.
4. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, baik dari pusat, provinsi, Kota Sukabumi, serta dari unsur pemerintah maupun swasta dan masyarakat.
5. Melibatkan peran aktif seluruh *stakeholder* baik dari pemerintah maupun di luar pemerintah seperti masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, komunitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Tujuan diturunkan dari Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sukabumi selama lima tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini yang merupakan hasil dari cascading Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi.

Adapun secara rinci tujuan, sasaran, outcome, indikator kinerja beserta targetnya sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 1 Target Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	*BASELINE* 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Visi: "Mewujudkan Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, Nasionalis" Misi: 1. Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat berbasis vokasi serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 2. Pengamalan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan memperkuat toleransi, ketenteraman serta ketertiban umum 3. Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata 4. Peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur publik 5. Penguatan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik berkualitas	Terwujudnya SDM Kota Sukabumi yang unggul dan berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia	77,69	77,90	78,31	78,75	79,22	79,68	80,14	
		Terwujudnya pendidikan masyarakat kota yang berkualitas dan merata	▪ Harapan Lama Sekolah ▪ Rata-rata Lama Sekolah	13,62 10,38	13,63	13,68	13,73	13,78	13,84	13,89	
		Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas	Usia Harapan Hidup	75,11	75,31	75,52	75,73	75,94	76,15	76,36	
		Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat kota	Persentase angka kemiskinan	7,20	6,36-7,02	6,21-6,76	5,93-6,48	5,68-6,22	5,38-5,93	4,92-5,44	
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja masyarakat kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,34	7.54 - 8.21	7.25 - 7.92	7.24 - 7.91	7.20 - 7.87	7.18 - 7.85	7.13 - 7.80	
	Terwujudnya masyarakat Kota Sukabumi yang agamis, toleran, berbudaya, dan inklusif		Indeks Rasa Aman	75,40	77,43	77,98	78,53	79,08	79,63	80,18	
		Terwujudnya masyarakat kota yang agamis dan toleran	Indeks Kerukunan Umat Beragama	78,16	79,00	79,27	79,55	79,82	80,09	80,36	
		Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya	Indeks Warisan Budaya	38,85	38,85	38,95	39,05	39,15	39,25	39,35	
		Terwujudnya masyarakat kota yang inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		60,46	61,76	63,06	64,36	64,55	66,25	
	Terwujudnya pertumbuhan dan produktivitas ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif		PDRB Per Kapita	44,76	45.29 - 45.65	50.38 - 51.35	49.78 - 51.53	51.93 - 54.73	54.05 – 58.2	56.12 - 62.33	
		Meningkatnya ekonomi kreatif kota	Indeks Kota Kreatif	87,86	87,86	88,53	89,21	89,88	90.56	91,23	
		Berkembangnya industri pariwisata MICE	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,26	3,29	3,36	3,44	3,53	3,61	3,70	
		Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota	Indeks Ketahanan Pangan	69,94	72	74	76	78	80	82	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	*BASELINE* 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru kota	Rasio Terbentuknya Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	0	0	0	0	0	25	25	
		Terwujudnya kemandirian kota dalam pengelolaan keuangan	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2,47	3,5	5	7	9	13	18	
	Terwujudnya infrastruktur Kota Sukabumi yang berkualitas dan berkelanjutan		Indeks Kota Layak Huni	65,74	66,75	67,75	68,75	69,75	70,75	72	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup kota	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	87,37 (2023)	88,37	88,4	88,43	88,48	88,53	88,58	
		Meningkatnya resilensi kota terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	84,55 (2023)	92,89	92,86	92,83	92,8	92,77	92,74	
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Sukabumi yang adaptif dan inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi	A-	A-	A	A	A+	A+	A+	
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan kota berbasis digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,98	3,2	3,3	3,4	3,6	3,8	4	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota	Indeks Pelayanan Publik	4,18	4,25	4,5	4,6	4,7	4,8	5	
		Meningkatnya inovasi kota dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	
		Terwujudnya birokrasi pemerintahan kota yang transparan dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tingkat Maturitas SPIP	76,36	78	80	81	82	83	84	
		Terwujudnya ASN kota yang berintegritas, netral dan berkinerja tinggi	Indeks Sistem Merit	77,69	77,90	78,31	78,75	79,22	79,68	80,14	

Sumber: Rancangan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan dengan optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam menyusun strategi dan penahapan pembangunan, selain memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD harus dipedomani juga arah kebijakan dan fokus pentahapan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 terutama pada tahap pertama yaitu pemantapan pondasi.

Gambar 4. 1 Pentahapan Pembangunan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045



Tahap pertama adalah pemantapan fondasi. Pemantapan fondasi ini merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dihasilkan dari pelaksanaan pembangunan periode lalu dan meningkatkan capain kinerja yang belum optimal sebagai modalitas pembangunan ke depan. Fokus yang dilakukan pada tahap pertama seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 4. 2 Fokus Pemantapan Pondasi (2025-2029)



Tema atau fokus pembangunan memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Kota Sukabumi dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahunan untuk perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan. Tema pembangunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026 sebagai tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 masih mengacu pada RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Hal ini adalah demi menjaga kesinambungan pembangunan secara berkelanjutan. Adapun tema pembangunan Tahun 2026 adalah:

"Penguatan Ekonomi Inklusif dan Pelayanan Publik untuk Ketahanan Sosial Masyarakat"

Tema di atas memiliki makna bahwa tahun 2026 fokus pembangunan Kota Sukabumi adalah untuk bidang ekonomi dan pelayanan publik. Ekonomi yang diharapkan adalah ekonomi yang bersifat inklusif/terbuka terutama dalam mendukung peningkatan ekonomin kreatif. Pertumbuhan ekonomi haruslah difokuskan pada pemerataan manfaat ekonomi untuk seluruh lapisan masyarakat dan bukan hanya pada kelompok tertenu saja. Selain itu pelayanan publik yang merupakan kebutuhan masyarakat juga harus menajadi perhatian utama agar hal tersebut dapat membantu memudahkan dan mensejahterakan masyarakat.

Tema tersebut sejalan dengan tema RKPD Provinsi Jawa Barat yaitu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik serta telah selaras juga dengan tema RKP yaitu Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif. Pada prinsipnya ketiga tema tersebut bertujuan untuk percepatan pembangunan ekonomi inklusif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tema diatas, maka harus disandingkan dengan prioritas pembangunan daerah dan program prioritas pembangunan daerah sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan. Peraturan Mengteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dilakukan analisis berdasarkan tujuan, sasaran dan isu strategis RPJMD, hasil evaluasi RKPD serta kebijakan Provinsi dan Nasional, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Penentuan Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi

Isu Strategis Aktual	Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan
● Pengembangan SDM dan Ketrampilan Masyarakat Berbasis Vokasi ● Masyarakat Inklusif, Berbudaya, dan Religius ● Ekonomi Kreatif dan Perluasan Lapangan Kerja ● Lingkungan dan Infrastruktur Perkotaan ● Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	● Terwujudnya SDM Kota Sukabumi yang unggul dan berkarakter ● Terwujudnya masyarakat Kota Sukabumi yang agamis, toleran, berbudaya, dan inklusif ● Terwujudnya pertumbuhan dan produktivitas ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif ● Terwujudnya infrastruktur Kota Sukabumi yang berkualitas dan berkelanjutan ● Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Sukabumi yang adaptif dan inovatif	● Terwujudnya pendidikan masyarakat kota yang berkualitas dan merata ● Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas ● Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat kota ● Meningkatnya penyerapan tenaga kerja masyarakat kota ● Terwujudnya masyarakat kota yang agamis dan toleran ● Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya ● Terwujudnya masyarakat kota yang inklusif ● Meningkatnya ekonomi kreatif kota ● Berkembangnya industri pariwisata MICE ● Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota ● Terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru kota ● Terwujudnya kemandirian kota	● Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) ● Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ● Penciptaan Lapangan Kerja ● Penataan Kota ● Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan

Isu Strategis Aktual	Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan
		dalam pengelolaan keuangan ● Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup kota ● Meningkatnya resilensi kota terhadap bencana dan perubahan iklim ● Terwujudnya tata kelola pemerintahan kota berbasis digital ● Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota ● Meningkatnya inovasi kota dalam pembangunan ● Terwujudnya birokrasi pemerintahan kota yang transparan dan akuntabel ● Terwujudnya ASN kota yang berintegritas, netral dan berkinerja tinggi	

Sumber: Analisis Bappeda, 2026

Berdasarkan tabel di atas, maka prioritas pembangunan Kota Sukabumi pada periode perubahan RKPD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)

   Salah satu kunci utama dalam melakukan pembangunan adalah ketersediaan sumber daya terutama anggaran. Maka opsi terbaiknya adalah melakukan otimalisasi peningkatan PAD melalui: Normalisasi dan optimalisasi pajak daerah, retribusi, BLUD dan BUMD.

2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

   Fokus pembangunan adalah demi kepentingan masyarakat, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama pembangunan khususnya untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting. Adapun secara teknis prioritas ini akan dilaksanakan melalui: implementasi wakaf uang, dana bergulir/dana abadi, penguatan ekonomi kreatif termasuk UMKM, serta pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

3. Penciptaan Lapangan Kerja

   Salah satu masalah besar di Kota Sukabumi selain ketimpangan adalah masih tingginya angka pengangguran, maka prioritas penciptaan lapangan kerja merupakan hal yang harus dilakukan. Program yang dapat dilakukan diangtaranya melalui: pengembangan pendidikan vokasi serta pengiriman tenaga kerja luar negeri, kemitraan dengan industri dan pelaku ekonomi serta dukungan untuk pengusaha dan *start up*.

4. Penataan Kota

   Sebuah kota yang indah adalah kota yang tertata dengan baik sehingga akan banyak kunjungan wisatawan untuk menikmati alam dan lingkungannya. Penataan kota merupakan hal yang harus terus menerus dilakukan dengan terlebih dahulu mempunyai perencanaan yang matang. Langkah yang akan dilakukan untuk penataan kota diantaranya melalui: perbaikan dan pembangunan infrastruktur pelayanan publik, penanganan sampah, serta penerangan seluruh wilayah kota.

5. Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan

   Salah satu pembangunan yang tidak boleh dilupakan adalah pembangunan nilai, mental dan budaya masyarakat. Maka penguatan nilai-nilai positif serta keterbukaan dalam semua proses pembangunan menjadi salah satu kunci yang harus dilakukan. Prioritas ini dapat dilakukan melalui penguatan nilai agama, sosial, dan budaya, toleransi dan keberagaman, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai tugas dan perannya serta kolaborasi pembangunan dengan semua stakeholder yang ada.

Selain prioritas pembangunan daerah, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran telah ditentukan juga program prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2026 yang disusun berdasarkan hasil cascading RPJMD yang dimulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Program pioritas pembangunan daerah menjadi pelaksanaan dari strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Program prioritas pembangunan daerah disajikan berdasarkan tujuan, sasaran dan *outcome* dari RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029. Dengan sifat program prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya harus diutamakan.

Perumusan program prioritas bertujuan untuk menggambarkan rangkaian “kerja” yang dibutuhkan untuk mencapai “kinerja” tujuan dan sasaran pembangunan. Program prioritas tersebut dihasilkan melalui mekanisme *cascading* tujuan, sasaran, dan *outcome* pembangunan. Proses perumusan program prioritas melalui mekanisme *cascading* dinilai lebih logis dan lebih dapat menjaga kesinambungan tujuan dan sasaran dengan program prioritas yang dihasilkan.

Berdasarkan *cascading* yang dilakukan, program prioritas Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 terdiri dari 46 program. Program prioritas yang dihasilkan juga telah disesuaikan dengan daftar program menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program prioritas Kota Sukabumi tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 3 Program Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PD
Visi: "Mewujudkan Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, Nasionalis" Misi: 1. Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat berbasis vokasi serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 2. Pengamalan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan memperkuat toleransi, ketenteraman serta ketertiban umum 3. Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata 4. Peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur publik	Terwujudnya SDM Kota Sukabumi yang unggul dan berkarakter			Indeks Pembangunan Manusia		
		Terwujudnya pendidikan masyarakat kota yang berkualitas dan merata		▪ Harapan Lama Sekolah ▪ Rata-rata Lama Sekolah		
			Meningkatnya akses dan mutu pendidikan masyarakat	• Tingkat Partisipasi Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini • Tingkat Partisipasi Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar • Tingkat Partisipasi Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama • Tingkat Partisipasi Anak Usia 7 -18 Tahun yang belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikbud
			Meningkatnya literasi masyarakat	Persentase peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Dispusipda
		Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas		Usia Harapan Hidup		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	• Prevalensi Stunting • Persentase peningkatan Succes Rate TB • Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terstandar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Dinkes

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PD
5. Penguatan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik berkualitas				• Persentase pemenuhan perbekalan kesehatan pada faskes		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Kelurahan dengan minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
		Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat kota		Persentase angka kemiskinan		
			Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja masyarakat kota		Tingkat Pengangguran Terbuka		
			Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Tersertifikasi Kompetensinya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Disnaker
	Terwujudnya masyarakat Kota Sukabumi yang agamis, toleran, tentram, berbudaya, dan inklusif			Indeks Rasa Aman		
		Terwujudnya masyarakat kota yang agamis dan toleran		Indeks Kerukunan Umat Beragama		
			Meningkatnya kualitas masyarakat kota yang agamis	Persentase masyarakat yang mendapat manfaat program wakaf	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
			Meningkatnya pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya	Persentase Konflik antar Inter Umat Beragama yang Diantisipasi	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol
		Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Tentram dan Tertib		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PD
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Trantibumlinmas di Kota Sukabumi	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang terselesaikan	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpolpp damkar
		Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya		Indeks Warisan Budaya		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Disdikbud
		Terwujudnya masyarakat kota yang inklusif		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Dinas Daldukkbp3a
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Daldukkbp3a
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Program Pemenuhan Hak Anak	Dinas Daldukkbp3a
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disporapar
	Terwujudnya pertumbuhan dan produktivitas ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif			PDRB Per Kapita		
		Meningkatnya ekonomi kreatif kota		Indeks Kota Kreatif		
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Disporapar

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PD
			Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UKM Menjalin Kemitraan	Program Pengembangan UMKM	Diskumindag
		Berkembangnya industri pariwisata MICE		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disporapar
		Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota		Indeks Ketahanan Pangan		
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKP3
			Meningkatnya kualitas komsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	DKP3
		Terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru kota		Rasio Terbentuknya Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru		
			Meningkatnya investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
		Terwujudnya kemandirian kota dalam pengelolaan keuangan		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
			Meningkatnya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD
	Terwujudnya infrastruktur Kota Sukabumi yang berkualitas dan berkelanjutan			Indeks Kota Layak Huni		
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup kota		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur		
			Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUTR

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PD
			Meningkatnya pelayanan sarana transportasi darat	persentase layanan BRT	Program Penyelenggaraan Lalu L intas dan Angkutan Jalan	Dishub
			Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyediaan sistem air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pnyediaan Air Minum	DPUTR
			Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangan	Program Pengembangan Permukiman	DPUTR
			Meningkatnya kualitas ruang publik	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUTR
			Menigkatnya kualitas layanan Sumber daya air	Persentase Peningakatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUTR
			Meningkatnya kualitas layanan persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
			Meningkatnya kualitas layanan air limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Air Limbah Domestik Layak dan Aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUTR
		Meningkatnya resilensi kota terhadap bencana dan perubahan iklim		Indeks Risiko Bencana		
			Meningkatnya ketahanan bencana Daerah	Persentase pemenuhan SPM sub urusan bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Presentase penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran sesuai standar pelayanan	Program pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpolppdam kar

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PD
			Meningkatnya pengurangan emisi GRK	Emisi Co2 Equivalen	Program Pengendalia Pencemaran dan/atauK erusakan Lingkungan Hidup	DLH
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Sukabumi yang adaptif dan inovatif			Indeks Reformasi Birokrasi		
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan kota berbasis digital		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
			Meningkatnya penggunaan aplikasi informatika di pemerintahan	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika yang Digunakan dalam Pemerintahan	Program Aplikasi Informatika	Diskominfo
			Meningkatnya efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas dokumen	Tingkat Ketersediaan Arsip se bagai Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Program Pengelolaan Arsip	Dispusipda
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota		● Indeks Pelayanan Publik ● Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kota		
			Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik	IPP Setda	Program Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah Kabupaten/Kota	Setda
			Meningkatkan kualitas peraturan daerah yang ditetapkan	Persentase Prolegda yang Dit etapkan dengan Peraturan Daerah	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Setwan
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	Indeks tata kelola pengadaan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Setda
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil
			Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di	Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PD
			kecamatan			
		Meningkatnya inovasi kota dalam pembangunan		Indeks Inovasi Daerah		
			Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan Iptek	Persentase PD yang Menerapkan Inovasi Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda
		Terwujudnya birokrasi pemerintahan kota yang transparan dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi General (IRB General) Kota Sukabumi		
			Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	● Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD ● Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda
			Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengukuran IRB PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Setda
			Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Nilai Laporan Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD
			Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Persentase rekomendasi pengawasan yang ditindaklanjuti	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Terwujudnya ASN kota yang berintegritas, netral dan berkinerja tinggi		Indeks Sistem Merit		
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Nilai Aspek Pengembangan Karir	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM

Sumber: RPJMD Kota Sukabumi 2025-2029

Prioritas pembangunan dan program prioritas ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan dan program prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2026 dengan isu strategis pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	Pengembangan SDM dan Ketrampilan Masyarakat Berbasis Vokasi	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penciptaan Lapangan Kerja	1) Program Pengelolaan Pendidikan 2) Program Pembinaan Perpustakaan 3) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 6) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 7) Program Penempatan Tenaga Kerja
2	Masyarakat Inklusif, Berbudaya, dan Religius	Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan	1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4) Program Pengembangan Kebudayaan 5) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 6) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 7) Program Pemenuhan Hak Anak 8) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3	Ekonomi Kreatif dan Perluasan Lapangan Kerja	Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Penciptaan Lapangan Kerja	1) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 2) Program Pengembangan UMKM 3) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 4) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 5) Program Pengawasan Keamanan Pangan 6) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

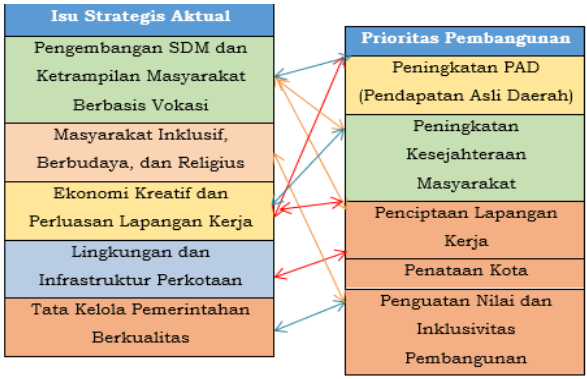
ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
			7) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
4	Lingkungan dan Infrastruktur Perkotaan	Penataan Kota	1) Program Penyelenggaraan Jalan 2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan S istem Pnyediaan Air Minum 4) Program Pengembangan Permukiman 5) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 6) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 7) Program Pengelolaan Persampahan 8) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 9) Program Penanggulangan Bencana 10) Program pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 11) Program Pengendalia Pencemaran dan/atauKerusakan Lingkungan Hidup
5	Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan	1) Program Aplikasi Informatika 2) Program Pengelolaan Arsip 3) Program Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah Kabupaten/Kota 4) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 5) Program Perekonomian dan Pembangunan 6) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 7) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 8) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 9) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 10) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 11) Program Pengelolaan Keuangan Daerah 12) Program Penyelenggaraan Pengawasan 13) Program Kepegawaian Daerah

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas, maka apabila kita sandingkan antara isu strategis, prioritas pembangunan dan program prioritas terdapat keterkaitan yang sangat erat. Isu strategis yang selanjutnya menjadi prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dapat kita petakan diakomodir pada program prioritas yang mana, sehingga kita dapat memastikan bahwa isu strategis dan prioritas pembangunan yang bermula dari berbagai permasalahan dan kondisi terkini Kota Sukabumi dapat diselesaikan melalui berbagai program prioritas yang akan dijalankan pada Tahun 2026.

Apabila kita gambarkan lebih detail, maka keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4. 3 Keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi (diolah)

Pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2026 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025 – 2029. Pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan melalui berbagai program pembangunan yang ada di seluruh perangkat daerah juga melalui program prioritas pembangunan serta program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi.

Adapun program unggulan yang akan di implementasikan pada tahun 2026 ini serta selama lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

A. Misi 1: Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keterampilan Masyarakat Berbasis Vokasi serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1. Beasiswa Sarjana (Berbasis Kewilayahan dan Disabilitas)

   Pemberian beasiswa dilakukan untuk dua kategori yaitu:

   1) Berbasis Kewilayahan

      Penerima beasiswa akan diatur sedemikian rupa dengan mempertimbangkan unsur keadilan dari sisi asal wilayah penerima. Dalam implementasinya akan melibatkan pihak yang berwenang serta aparatur wilayah yang sangat memahami kondisi lapangan.

   2) Kategori Disabilitas

      Salah satu hal yang mungkin menjadi kendala bagi sahabat disabilitas adalah akses terhadap pendidikan. Banyak individu disabilitas yang memiliki potensi besar, namun terhalang oleh keterbatasan aksesibilitas dan sumber daya yang memadai untuk melanjutkan pendidikan. Dalam implementasinya, pemberian beasiswa ini akan melibatkan pihak terkait yang berwenang seperti: Disabilitas Group Planner, Institusi pendidikan luar biasa serta komunitas atau organisasi yang konsen terhadap sahabat disabilitas. Hal tersebut untuk lebih memastikan bahwa pemberian beasiswa dapat tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat kepada sahabat disabilitas.

2. Pendidikan Vokasi melalui Optimalisasi BLK

   Otimalisasi BLK dapat membantu meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam jangka panjang, optimalisasi BLK dapat membantu meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan memiliki sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, masyarakat dapat meningkatkan kemampuan ekonominya dan menjadi lebih mandiri.

3. Peningkatan Puskesmas (Layanan Puskesmas Gratis, Homecare, Ambulance)

   Program unggulan peningkatan Puskesmas hadir untuk terus memastikan pentingnya keberadaan Puskesmas serta senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas. Kondisi saat ini, masih ada masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, maka ketika

mereka ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar memerlukan pembiayaan.

Kedepan pemerintah harus hadir dalam memastikan warga Kota Sukabumi dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa biaya walaupun belum memiliki jaminan kesehatan, dengan catatan masyarakat tersebut dijadikan prioritas untuk menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Sukabumi.

Selain itu melalui program unggulan ini pemerintah daerah juga harus bisa memastikan bahwa pelayanan kesehatan dapat di akses oleh masyarakat yang punye keterbatasan datang langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan memberikan pelayanan *home care* serta *ambulance*. Melalui program ini petugas kesehatan akan hadir langsung ke setiap rumah masyarakat yang membutuhkan serta apabila memerlukan rujukan dapat langsung difasilitasi oleh pelayanan Ambulance.

4. Posyandu Ayeuna (Operasional Posyandu)

   Posyandu menyediakan berbagai layanan kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan, imunisasi, dan penanganan penyakit ringan. Namun, untuk menjalankan operasional posyandu, diperlukan anggaran yang memadai. Anggaran operasional posyandu digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, seperti pembelian obat-obatan, peralatan kesehatan, dan biaya operasional lainnya.

B. Misi 2: Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Sosial, Budaya dan Memperkuat Toleransi, Ketentraman serta Ketertiban Umum

1. Sukabumi Kota Wakaf

   Program unggulan yaitu “Sukabumi Kota Wakaf” adalah suatu konsep yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan kota, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dalam rangka menjadikan Kota Sukabumi sebagai Kota Wakaf, maka pemerintah daerah haruslah melakukan berbagai langkah dalam menuju cita-cita tersebut. Salah satu yang akan dilakukan adalah melalui program Gerakan Wakaf Uang, dimana seluruh lapisan masyarakat termasuk Aparatur Sipil Negara dan dunia usaha dihimbau untuk melakukan wakaf uang secara rutin dalam kurun waktu tertentu.

Gerakan wakaf uang inilah yang nanti akan menjadi salah satu prasyarat utama dalam menjadikan Sukabumi sebagai Kota Wakaf.

Pengelolaan wakaf uang nantinya akan dilakukan oleh sebuah lembaga Nazhir Wakaf yang kredibel yang direkomendasikan oleh lembaga resmi seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selanjutnya pemerintah daerah akan menghimbau seluruh lapisan masyarakat terutama para aparatur untuk mengikuti gerakan wakaf uang ini yang selanjutnya Nazhir Wakaf akan melakukan pengelolaan yang pada akhirnya hasil dari pengelolaan tersebut akan kembali kepada masyarakat Kota Sukabumi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pembangunan (Insentif Marbot, Guru Ngaji, RW, RT, Linmas, Karang Taruna)

   Pemberian insentif ini dilakukan setiap bulan, dengan catatan unsur masyarakat tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam membantu pemerintah sesuai bidangnya dan berdasarkan arahan atau ketentuan yang akan disampaikan dalam sebuah regulasi khusus. Sebagai salah satu contoh adalah keterlibatkan para RT dan RW dalam mendukung program strategis peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sukabumi.

3. Pusat Konseling Keluarga Ayeuna (Ponsel Ayeuna) (Konseling Ibu, Ayah, Anak, Remaja)

   Pusat Konseling Keluarga Ayeuna merupakan sebuah program unggulan yang memfokuskan pada ketahanan keluarga dengan memberikan konsultasi gratis serta solusi-solusi bagi permasalahan keluarga untuk penduduk Kota Sukabumi. Melalui Pusat Konseling Keluarga Ayeuna, diharapkan dapat beperan penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan keluarga. Keberadaan pusat konseling keluarga ayeuna ini diharapkan memiliki dampak positif pada masyarakat. Dengan adanya pusat konseling keluarga ayeuna, masyarakat dapat memiliki akses yang lebih mudah ke layanan konseling dan penanganan masalah keluarga. Hal ini dapat membantu mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga, konflik keluarga, dan gangguan mental. Selain itu, keberadaan pusat konseling keluarga juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat secara luas.

4. Pemuda Berdaya (optimalisasi peran dan anggaran kepemudaan)

   Program unggulan pemuda berdaya sangat relevan untuk mendukung peningkatan peran pemuda dalam pembangunan. Melalui program ini pemerintah daerah akan memberikan kesempatan kepada para pemuda di semua sektor untuk dapat berperan lebih besar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Melalui program unggulan ini pemerintah daerah akan memberikan kesempatan kepada pemuda seperti dalam hal menyusun sendiri perencanaan pembangunan versi pemuda yang fokus kepada peningkatan peran dan kualitas pemuda itu sendiri, selain itu peningkatan kualitas dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk sektor-sektor strategis bidang kepemudaan juga akan semakin diperhatikan. Dalam implementasinya akan pemerintah daerah akan bekerjasama dengan organisasi kemasyarakat atau lembaga yang menampung para pemuda didalamnya.

C. Misi 3: Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata

1. Menata Kebaikan Tech

   Melalui program ini masyarakat atau komunitas yang mempunyai produk unggulan dan memerlukan pemasaran lebih jauh dapat dibantu untuk lebih diperkenalkana kepada masayarakat luass baik Kota Sukabumi maupun diluar Kota Sukabumi.
   Selain itu program-program unggulan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta program-program prioritas lainnya di setiap Perangkat daerah ataupun dari lembaga lain dapat juga diperkenalkan melalui program ini, sehingga dapat dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat dan pada akhirnya akan lebih banyak masyarakat yang menerima manfaat dari berbagai program tersebut.

2. Dana Bergulir (Dana Abadi)

   Merupakan sebuah program yang menyiapkan dana untuk modal usaha masyarakat yang dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat atau lembaga lain yang kredibel sesuai peraturan perundang-undangan, yang disediakan di setiap Rukun Tetangga (RT) yang ada di Kota Sukabumi.
   Dana yang disediakan untuk program ini adalah sebear Rp. 10.000.000 per RT

Dana ini yang nantinya akan di fokuskan untuk memberikan modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan dengan adanya pembatasan jumlah pinjaman.

Selanjutnya dana ini akan dikembalikan secara bertahap dan tidak memberatkan dari masyarakat yang melakukan pinjaman kepada kelompok swadaya masyarakat atau lembaga lain yang kredibel sesuai peraturan perundang-undangan yang ditunjuk sebagai pengelola.

Dengan demikian dana ini akan tetap ada atau kembali utuh seperti semula yang selanjutnya dapat dijadikan modal bergulir kembali oleh masyarakat yang lainnya. Dalam lima tahun program ini berjalan, sangat memungkinkan jumlah pinjaman kedepananya akan bisa menjadi lebih banyak dari pinjaman awal yang diberikan.

D. Misi 4: Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Publik

1. Infrastruktur Ayeuna (Stadion Bertaraf Nasional dan Infrastruktur Publik lainnya)

   Infrastruktur utama yang harus jadi prioritas adalah yang berhubungan dengan kepentingan atau kebutuhan publik. Salah satunya adalah infrastruktur dalam mendukung kegiatan olahraga masyarakat. Selain itu, Kota Sukabumi sebagai salah satu kota berkembang di Jawa Barat, ternyata memiliki potensi besar dalam bidang olahraga. Banyak atlet berbakat yang lahir dan berkembang di kota ini, dan hampir semua cabang olahraga juga ada di Kota Sukabumi.

   Namun demikian kondisi hari fasilitas olahraga yang memadai dan memenuhi standar nasional masih sangat terbatas. Salah satunya adalah Stadion yang merupakan sebuah ikon dari pusat kegiatan olahraga di suatu wilayah. Oleh karena itu, maka pembangunan sebuah stadion olahraga berstandar nasional menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung perkembangan dunia olahraga, serta mengakomodir kebutuhan infrastruktur pelayanan publik di Kota Sukabumi.

   Program unggulan Infrastruktur Ayeuna melalui implementasi pembangunan stadion olahraga berstandar nasional bukan sekadar proyek infrastruktur biasa, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi perkembangan olahraga, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat.

Dalam implementasinya pembiayaan program infrastruktur ini akan menggunakan berbagai pendekatan pembiayaan mulai dari PAD, dana transfer, investor, CSR serta dari berbagai sumber lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Layanan Ambulans Jenazah

   Program unggulan Layanan Ambulans Jenazah hadir dalam rangka memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui program ini masyarakat bisa mengakses layanan ambulans tanpa biaya dengan hanya menyampaikan permohonan kepada lembaga yang diberikan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaannya. Selain itu, layanan ini sangat membantu keluarga yang mungkin tidak memiliki akses kendaraan yang memadai untuk membawa jenazah. Terlebih lagi, dalam kasus tertentu seperti kecelakaan, pemulangan jenazah dari luar kota, atau kondisi medis tertentu, ambulans jenazah menjadi solusi yang sangat dibutuhkan.

E. Misi 5: Penguatan Tata Kelola Pemerintah untuk Pelayanan Publik Berkualitas

1. Sukabumi Menyala (Layanan Publik Terintegrasi)

   Menyatukan semua layanan publik dalam satu portal yang terintegrasi merupakan salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses semua layanan publik yang dibutuhkan dalam satu tempat, tanpa harus mengunjungi beberapa tempat yang berbeda.

2. NGOPI (Ngobrol Happy bareng Wali Kota)

   Wali Kota dan Wakil Wali Kota dipilih secara langsung oleh masyarakat untuk selanjutnya bekerja melaksanakan janji politik yang suah disampaikan. Setelah dilantik maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi milik masyarakat dan bertugas untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk itu maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus mendengar secara langsung masukan, pendapat, keluhan dan permasalahan langsung dari masyarakat sehingga program kerja yang dilaksanakannya dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam mengakomodir kebutuhan tersebut, maka program unggulan NGOPI (Ngobrol Happy bareng Wali Kota dan Wakil Wali Kota) hadir sebagai jembatan komunikasi anatar masyarakat dengan pemimpinnya. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan berbasis kewilayahan serta juga dapat dilakukan dengan berbasiskan tematik tertentu.

Dalam menentukan prioritas pembangunan supaya sesuai dengan situasi dan kondisi terkini di lapangan, maka harus melakukan berbagai sinkronisasi dengan berbagai kepentingan diantaranya adalah pokok-pokok pikiran DPRD. Keterkaitan prioritas pembangunan dengan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)	● Dalam pelaksanaan kegiatan yang besumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota harus bersinergi. ● Mengamankan aset-aset milik Pemerintah Kota. ● Melaksanakan evaluasi dan monitoring di sektor PAD. ● Kajian potensi riil PAD dan peningkatan implementasi dari hasil kajian tersebut secara transparan yang dilakukan oleh tim independen. ● Sistem Pendapatan dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran diupayakan secara *online*. ● Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan solusi apabila regulasi tentang penghapusan PBB dan BPHTB jadi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. ● Evaluasi dan laporan hasil PAD dan penggunaan secara periodik (per Triwulan) kepada DPRD
2	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	● Menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara membangun rusunami, Rusunawa, Rumah murah bersubsidi. ● Penyelesaian pembayaran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) bagi warga yang tidak mampu; ● Peningkatan pelayanan bidang pendidikan termasuk penambahan ruang kelas baru, penambahan kuota bantuan bagi pelajar SMA/SMK, beasiswa bagi mahasiswa, peningkatan sarana prasarana SLB dan pelaksanaan program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU); ● Pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, khususnya olahan pangan masyarakat.
3	Penciptaan Lapangan Kerja	● Mengadakan Pembinaan dan pelatihan bagi para penyandang cacat Berbasis potensi/kebutuhan ● Menginformasikan setiap ada Lowongan Pekerjaan (Loker) kepada Masyarakat. ● Mengadakan pelatihan keterampilan dalam rangka stimulasi pertumbuhan UMKM di Kota Sukabumi. ● Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Koperasi dan UMKM ● Mempermudah regulasi/aturan untuk menarik investor di Kota Sukabumi

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
		● Pemberdayaan potensi pariwisata lokal khususnya di kelurahan-kelurahan ● Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi pariwisata nusantara ke dalam dan luar negeri ● Promosi pariwisata nusantara ke dalam dan luar negeri ● Pengembangan SDM dan profesionalismer pariwisata. ● Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
4	Penataan Kota	● Meningkatkan pemeliharaan jalan kota dan jalan lingkungan secara merata, baik berupa pavingisasi, betonisasi dan pengaspalan. ● Pendataan RTLH serta penaggulangan nya ● Pembangunan jalan baru, perbaikan/perawatan jalan yang ada dan pembangunan jalan untuk lokasi perbatasan yang sulit dijangkau; ● Segera merealisasikan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan dengan pola *typing fee.*
5	Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan	● Meningkatkan kerukunan hidup beragama ● Meningkatkan peran lembaga/*stake holders* dalam rangka mengantisipasi/mengatasi gejolak dalam kehidupan kerukunan umat beragama ● Menjaga kondisifitas antar partai politik di Kota Sukabumi. ● Mengintensifkan koordinasi antar Perangkat Daerah agar dalam perencanaan pembangunan lebih akurat/tidak berubah-ubah, dan dapat terintegrasi antara Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. ● Dalam melakukan perencanaan memperhatikan prinsip partisipasi, kesinambungan dan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah.Untuk perencanaan pembangunan Kota Sukabumi agar memperhatikan keseimbangan wilayah.

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2026

RPJMN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan 5 (lima) pengarusutamaan *(mainstreaming)* sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Esensi dari pengarusutamaan pembangunan adalah memperluas kemanfaatan dari hasil pembangunan dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan untuk seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pengarusutamaan dilakukan melalui pengintegrasian secara konsisten pendekatan (i) Gender dan Inklusi Sosial, (ii) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (iii) Transformasi Digital, (iv) Pembangunan Rendah Karbon, dan (v) Pembangunan Berketahanan Iklim ke dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah, serta inisiatif pembangunan lainnya yang dilakukan oleh *non state actors*.

Untuk mendukung tercapainya tujuan pelaksanaan pengarusutamaan di atas, Pemerintah Kota Sukabumi telah mensinkronkan program-program pembangunan daerah Tahun 2026 untuk pencapaian target tersebut. Berikut program-program pembangunan tersebut.

Tabel 4. 6 Perbandingan Program Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2026 dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan (Mainstreaming) Pembangunan Nasional Tahun 2026

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
Tujuan 1 TANPA KEMISKINAN	
• Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. • Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. • Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 3. Program Pemberdayaan Sosial 4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) 5. Program Pengendalian Penduduk 6. Program Pengelolaan Pendidikan 7. Program Pengelolaan Pendidikan 8. Program Pencatatan Sipil
Tujuan 2 TANPA KELAPARAN	
• Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. • Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. • Target 2.3 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
• Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. • Target 3.3. pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. • Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. • Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. • Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. • Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. • Target 3.a.1* Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. • Target 3.b.1(a) Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. • Target 3.c.1* Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil	1. Program Rehabilitasi Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial 3. Program Pemberdayaan Sosial 4. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 7. Program Pencatatan Sipil
Tujuan 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS	
• Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. • Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. • Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. • Target 4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan Global • Target 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
Tujuan 5 KESETARAAN GENDER	
• Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. • Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. • Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. • Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. • Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut. • Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Tujuan 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
• Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua • Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. • Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. • Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. • Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	
• Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	
• Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. • Target 8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. • Target 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. • Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi	

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. • Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. • Target 8.10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	
Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	
• Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. • Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. • Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	
• Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. • Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya. • Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	
Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	
• Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
	2. Program Penanggulangan Bencana
Tujuan 12 Kosumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	
• Target 12.4 ada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. • Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. • Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka. • Target 12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 2. Program Pengelolaan Persampahan
Tujuan 14 Ekosistem Lautan	
• Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. • Target 14.6 Pada thn 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yag berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.	
Tujuan 16 PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	
• Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. • Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. • Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Perekonomian Dan Pembangunan 3. Program Kepegawaian Daerah 4. Program Pencatatan Sipil

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. • Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. • Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. • Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. • Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. • Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	
Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	
• Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. • Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. • Target 17.8 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. • Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama. • Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi	1. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. • Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan di BAB II serta di sinkronkan dengan kondisi keuangan dan kebijakan belanja yang sudah ditetapkan pada Bab III, maka beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1) Pemenuhan gaji dan tunjangan untuk PNS, P3K, P3K PW dan Oitsourching di seluruh Perangkat Daerah sesuai hasil perhitungan atau prognosis bulan Juli Tahun 2026;
2) Pemenuhan belanja wajib mengikat seperti listrik dan telpon;
3) Pemenuhan kebutuhan untuk pencapaian IKU Kepala Daerah di beberapa Perangkat Daerah;
4) Pemenuhan beberapa program prioritas daerah seprti P2RW;

Untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah serta antar pusat dan daerah, maka prioritas pembangunan Kota Sukabumi harus diselaraskan dengan prioritas provinsi dan nasional. Prioritas pembangunan Kota Sukabumi selanjutnya diterjemahkan ke dalam program prioritas pembangunan, serta dijabarkan kembali melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sebagaimana tercantum lampiran perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026.

Prioritas Nasional (PN) pada Tahun 2026 ditetapkan sebanyak 8 (delapan) prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional tersebut, maka telah dilakukan pemetaan pencapaian prioritas nasional berdasarkan program perencanaan pembangunan yang bisa mendukung pencapaiannya. Lebih jelas pemetaan tersebut sebagaimana yang tercantum pada tabel 4.6 dibawah ini. Selain itu Provini Jawa Barat jugatelah menetapkan prioritas pembangunan melalui sembilan lengkah yang telah dilakukan sinkronisasi melalui implemetasi program di beerapa perangka erah terkait sebagaiman padatabel 4.7.

Tabel 4. 7 Sinkronisasi Program Prioritas dengan Prioritas Pembangunan Nasional

ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBANG 2025	TARGET RKPD 2026
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	1
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	19901	19901
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	700	700
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	5141	5141
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Kesehatan Untuk Semua	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang	Unit	1	1

ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBANG 2025	TARGET RKPD 2026
gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit			
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan MedisHabis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	2
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	4	4
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	0	0
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	0	0
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	0	0
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	0,3	0,3

ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBANG 2025	TARGET RKPD 2026
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	0	0
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	35	35
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan RDTR Kab/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kab/Kota	Dokumen	1	1
			Penetapan RTRW Kab/Kota	Jumlah Perda RTRW Kab/Kota	Dokumen	0	0
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	0	0
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	0	0
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	2	2

ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	1	1
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	1	1
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	12	12
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	4	4
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1	1

ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBANG 2025	TARGET RKPD 2026
		NON KEBAKARAN					
Membangun dari desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	35	35
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	42	42
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250	250
Membangun dari desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	105	105

ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBANG 2025	TARGET RKPD 2026
pemberantasan kemiskinan.	kerja dan perlindungan pekerja						
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	20	20
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	18200	18200
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	33	33
			Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	100	100

ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBANG 2025	TARGET RKPD 2026
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kegiatan	2	2
			Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	60	60
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	0	0
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Laporan	0	0
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan	Laporan	12	12

ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	pangan dan gizi kabupaten/kota			
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan kses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0
			Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	Berita Acara	0	0
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan Hidup Berkualitas	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indek Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	30	30
			Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket	31	31

ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBANG 2025	TARGET RKPD 2026
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	67.163,78	67.163,78
			Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase	71,19	71,19
			Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	19.969,41	19.969,41
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	67.895	67.895
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	0	0
			Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Laporan	0	0

ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota			
			Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	0	0
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	1
			Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	1	1
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan/ Dokumen	7	7
			Pembentukan Kelompok Ketahanan dan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan	Kelompok	5	5

ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk			
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	110	110
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	2	2
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	10	10
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang	Media	13	13

ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBANG 2025	TARGET RKPD 2026
				dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis			
			Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi	Laporan	0	0
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	12	12
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	3	3
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	2	2
			Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	3	3
			Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	31	31

ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBANG 2025	TARGET RKPD 2026
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	10	10
			Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	40	40
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	150	150
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	80	80
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	10	10

ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	10	10
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	40	40
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Orang	107	107
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	425	425

ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBANG 2025	TARGET RKPD 2026
		SAING KEOLAHRAGAAN					
			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	110	110
			Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga	1	1
Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	60	60
			Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	100	100
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	31	31

ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBANG 2025	TARGET RKPD 2026
Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Dokumen	2	2
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	3	3
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	20	20
		PROGRAM PELESTARIAN DAN	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	3	3

ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBANG 2025	TARGET RKPD 2026
		PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
			Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	0	0
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	45	45
			Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar	47,482	47,482
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	1	1
			Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	3	3

ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBANG 2025	TARGET RKPD 2026
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	31	31
			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	200	200
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	0	0
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	0	0
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	0	0
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku usaha	20	20

ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku usaha	5	5
			Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku usaha	10	10
			Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku usaha	0	0
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Orang		
			Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	2	2

ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBANG 2025	TARGET RKPD 2026
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen		
			Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga		
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit	2	2
			Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk	25	25
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,	Meningkatnya Produksi Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	12	12

ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBANG 2025	TARGET RKPD 2026
ekonomi hijau, dan ekonomi biru							
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	30	30
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	12	12
			Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	1.272	1.272
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	1	1
			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	650	650
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	22	22
			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	40	40
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	1

ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Koordinasi dan SinkronisasiPengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usah tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	30	30
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	20	20

ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBANG 2025	TARGET RKPD 2026
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Orang	65	65
			Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	1	1
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	0	0
- Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur; - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	- Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila; - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila; - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	50	50

ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBANG 2025	TARGET RKPD 2026
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	50	50

Sumber: Hasil Analisa Bappeda, 2025

Tabel 4. 8 Sinkronisasi Program Prioritas dengan Prioritas Provinsi Jawa Barat

NO	JABAR ISTIMEWA	PROGRAM KOTA SUKABUMI	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
1	Lengkah Kahiji			
	(Pembangunan Infrastruktur Jalan sampai ke Pelosok Desa dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan)	Program Penyelenggaraan Jalan	18.599.821.335,00	DPUTR
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.992.085.404,00	Dishub
		Program Kawasan Permukiman	12.029.156.400,00	DPUTR
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	824.122.750,00	DPUTR
2	Lengkah Kadua			
	(Pembangunan Jaringan Irigasi di Seluruh Wilayah Pertanian dan Mendorong Ekosistem Ekonomi Pertanian Organik)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.783.411.983,00	DPUTR
3	Lengkah Katilu			
	(Pengembangan Pendidikan Berkarakter, SMA/SMK Gratis dan Penambahan Ruang Kelas Baru)	Program Pengelolaan Pendidikan	78.862.529.910,00	Disdikbud
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	79.889.800,00	Disdikbud
		Program Pengembangan Kurikulum	37.270.000,00	Disdikbud
4	Lengkah Kaopat			
	(Pengembangan Lapangan Kerja Baru)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	485.571.000,00	Disnaker
		Program Penempatan Tenaga Kerja	56.027.500,00	Disnaker

NO	JABAR ISTIMEWA	PROGRAM KOTA SUKABUMI	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	50.963.000,00	Disporapar
		Program Pengembangan UMKM	350.000.000,00	Diskumindag
5	Lengkah Kalima			
	(Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan Penambahan Layanan Khusus)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.229.541.938,00	Dinkes
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	55.161.668.048,00	Dinkes
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.250.666.000,00	Dinkes
6	Lengkah Kagenep			
	(Penanganan Stunting dan Gizi Buruk)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	55.161.668.048,00	Dinkes
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.798.396.000,00	Dinkes
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	797.471.000,00	Dinkes
7	Lengkah Katujuh			
	(Pemulihan Kondisi Lingkungan Jawa Barat)	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	397.595.250,00	DLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	293.959.000,00	DLH
8	Lengkah Kadalapan			

NO	JABAR ISTIMEWA	PROGRAM KOTA SUKABUMI	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	(Pengembangan Pengelolaan Sampah Mandiri)	Program Pengelolaan Persampahan	2.445.901.370,00	DLH
9	Lengkah Kasalapan			
	(Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lingkungan dan Transformasi Birokrasi)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	26,381,151,550	Kecamatan
		Program Pengembangan Kebudayaan	210.489.000,00	Disdikbud
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	629,892,188,087	Seluruh PD

Sumber: Hasil Analisa Bappeda, 2025

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Penyesuaian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2026 merupakan bagian dari proses penyelarasan kembali perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dengan perkembangan kondisi aktual serta dinamika kebijakan pembangunan yang terjadi sepanjang tahun berjalan. Perubahan RKPD Tahun 2026 dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tetap konsisten dengan arah pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan.

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 pada dasarnya merupakan hasil formulasi dari rangkaian proses perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 dalam rangka penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026. Proses tersebut dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain unsur akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintah, dan masyarakat. Pelaksanaan Musrenbang menjadi sarana untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan, menyepakati permasalahan prioritas, serta merumuskan program dan kegiatan yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak langsung bagi masyarakat Kota Sukabumi.

Selain melalui Musrenbang, proses perencanaan pembangunan daerah juga memperhatikan hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan yang bersifat inklusif sebagai implementasi Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif. Dalam rangka memperluas ruang partisipasi masyarakat, Pemerintah Kota Sukabumi telah melaksanakan kegiatan antara lain *Sukabumi Youth Planner Conference* serta *Focus Group Discussion* (FGD) Disabilitas. Masukan dan aspirasi yang diperoleh dari berbagai kegiatan tersebut menjadi salah satu bahan dalam memperkaya substansi perencanaan pembangunan daerah, yang selanjutnya diproses dan diselaraskan dengan tahapan serta mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi melakukan penyesuaian terhadap alokasi belanja daerah sebagai respons terhadap perkembangan kapasitas fiskal daerah dan kebijakan pemerintah pusat, termasuk adanya penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi tersebut berdampak terhadap ruang fiskal daerah sehingga diperlukan langkah rasionalisasi, penajaman prioritas, dan pengalokasian kembali anggaran (*reallocating*) agar sumber daya yang tersedia dapat diarahkan secara lebih optimal untuk membiayai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang memiliki tingkat urgensi dan dampak pembangunan yang lebih tinggi.

Penyesuaian alokasi belanja juga dilakukan dalam rangka mendekatkan pemenuhan porsi belanja wajib (*mandatory spending*) sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan pedoman penyusunan/perubahan RKPD Tahun 2026. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi melakukan penyesuaian dan rasionalisasi terhadap pagu indikatif dengan tetap mempertahankan kesinambungan pelayanan publik dan pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah. Penyesuaian diarahkan terutama pada aspek strategis sebagai berikut:

1. Fungsi Pendidikan dan Kesehatan, diarahkan untuk mengoptimalkan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana dasar pendidikan dan kesehatan. Penajaman alokasi dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kebutuhan, ketercapaian target kinerja, serta dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Infrastruktur dan Pelayanan Dasar, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas fiskal daerah sebagai dampak dari penurunan alokasi TKD. Pengalokasian belanja infrastruktur dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan mengutamakan infrastruktur yang bersifat mendesak, pelayanan dasar, serta infrastruktur yang memberikan dampak langsung dan luas terhadap masyarakat. Di sisi lain, optimalisasi belanja pemeliharaan dilakukan untuk mempertahankan fungsi dan keberlanjutan aset infrastruktur yang telah tersedia. Penyesuaian belanja modal diarahkan secara selektif, dengan tetap mendorong pemanfaatan sumber pendanaan alternatif, antara lain melalui Bantuan Keuangan Provinsi dan dukungan pendanaan dari APBN, sehingga pemenuhan kebutuhan infrastruktur dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

3. Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dilakukan melalui penyesuaian alokasi anggaran untuk pengawasan internal serta pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tetap memperhatikan ketentuan dan arahan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Penyesuaian tersebut diarahkan untuk memastikan fungsi.

5.1 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2026

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang di dalam RKPD Perubahan Tahun 2026 dilaksanakan secara terpadu berdasarkan urusan/kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta hasil pemutakhirannya, dengan dukungan pendanaan bersifat indikatif. Program dan kegiatan hasil pemetaan ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2026.

Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Pusat Data dan Informasi, dimana dalam SIPD tersebut menggunakan rincian objek belanja sesuai ketentuan yang berlaku.

Seluruh perangkat daerah mengusulkan rencana kerja Perubahan pada SIPD RI dengan melakukan entri rincian objek belanja, selanjutnya usulan tersebut dilakukan proses verifikasi oleh Tim Bappeda. Proses verifikasi dilakukan terutama dengan melihat Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) per sub kegiatan, guna melihat apa rincian aktivitas yang ada di dalamnya sehingga dari awal proses perencanaan sudah dapat diketahui apa tujuan, siapa sasaran dan bagaimana pelaksanaan kegiatannya, sehingga nanti dapat dilakukan penelaahan terhadap kesesuaian dengan indikator kinerja yang akan dicapainya sebagaimana dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Strategis perangkat daerah dan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam proses pengusulan pagu anggaran Perubahan Tahun 2026, perangkat daerah pada awalnya diarahkan untuk mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan.

Namun demikian setelah dilakukan analisis, penelaahan dan verifikasi ternyata kebutuhan belanja masih belum terpenuhi terutama dalam mendukung kegiatan yang dianggap prioritas di masing-masing perangkat daerah. Selain itu usulan awal tersebut masih belum mempertimbangkan kebutuhan program prioritas dan unggulan yang ada dalam dokumen RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029. Untuk itu maka berdasarkan hasil analisis dan diskusi dengan seluruh tim penyusun RKPD, maka kebutuhan tersebut dipenuhi dengan kembali melakukan verifikasi ulang serta mengurangi aktivitas yang dianggap bukan prioritas.

Rekapitulasi usulan pagu Perubahan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Sukabumi tahun 2025-2029 serta SIPD RI disampaikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 1 Pagu Usulan Perangkat Daerah Perubahan 2026
Dan RPJMD
Kota Sukabumi Tahun 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH	RPJMD 2026	RKPD P 2026
1	*2*	*3*	*4*
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	155,285,095,535	241,435,306,013
2	Dinas Kesehatan	501,436,470,599	581,138,800,980
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	43,780,270,613	57,180,146,810
4	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	12,634,524,290	12,354,484,348
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,709,929,538	4,039,961,944
6	Dinas Sosial	8,414,484,996	7,013,603,379
7	Dinas Tenaga Kerja	4,656,862,600	5,907,792,556
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	7,604,617,307	12,305,055,619
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	12,130,783,488	9,474,449,154
10	Dinas Lingkungan Hidup	27,759,237,958	28,809,031,173
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,858,876,953	4,748,185,825
12	Dinas Perhubungan	17,915,927,755	16,936,920,365
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	6,663,752,200	7,946,435,687
14	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	14,504,647,332	10,747,319,698
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5,407,435,399	5,479,690,978

NO	PERANGKAT DAERAH	RPJMD 2026	RKPD P 2026
1	*2*	*3*	*4*
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	11,999,174,366	11,065,868,355
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6,211,375,224	5,629,340,634
18	Sekretariat Daerah	54,117,916,746	50,954,038,502
19	Sekretariat DPRD	61,769,853,917	61,290,516,745
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10,633,181,335	14,182,501,687
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	65,538,863,022	33,293,188,785
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7,974,221,050	7,251,898,506
23	Inspektorat Daerah	9,321,179,574	12,063,193,551
24	Kecamatan Cikole	16,542,688,785	16,472,823,591
25	Kecamatan Gunung Puyuh	12,207,547,945	11,878,441,881
26	Kecamatan Citamiang	12,796,818,071	13,110,828,802
27	Kecamatan Warudoyong	14,134,543,062	13,559,960,550
28	Kecamatan Baros	10,357,395,149	10,429,461,093
29	Kecamatan Lembur Situ	14,401,097,200	12,975,274,559
30	Kecamatan Cibeureum	11,019,407,140	11,989,843,210
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10,447,674,232	8,769,543,425
JUMLAH		1,158,235,853,381	1,300,433,908,405

Sumber : Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi

Apabila dilihat dari urusannya, dan dikaitkan dengan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam melakukan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah, maka akan terlihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5. 2 Jumlah Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran

NO	URUSAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	241,420,306,013	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	581,138,800,980	Dinas Kesehatan
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	53,393,024,310	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	URUSAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	3,787,122,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	Urusan Pemerintahan Bidang ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	16,394,446,292	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
7	Urusan Pemerintahan Bidang ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	4,039,961,944	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	7,013,603,379	Dinas Sosial
9	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	5,902,792,556	Dinas Tenaga Kerja
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1,777,013,017	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
11	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	8,687,979,139	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
12	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	28,809,031,173	Dinas Lingkungan Hidup
13	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4,748,185,825	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	10,528,042,602	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	16,936,920,365	Dinas Perhubungan
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	7,861,885,687	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	9,654,935,698	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	5,479,690,978	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	10,089,722,355	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	19,550,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	65,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	5,609,341,684	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	URUSAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	19,998,950	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	104,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	976,146,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	682,470,015	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
28	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	303,245,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
29	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	789,139,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
30	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	5,000,000	Dinas Tenaga Kerja
31	Sekretariat Daerah	50,954,038,502	Sekretariat Daerah
32	Sekretariat DPRD	61,290,516,745	Sekretariat DPRD
33	Perencanaan	12,926,701,687	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
34	Keuangan	33,293,188,785	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
35	Kepegawaian	6,768,443,506	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
36	Pendidikan Dan Pelatihan	483,455,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
37	Penelitian Dan Pengembangan	1,255,800,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
38	Inspektorat Daerah	12,063,193,551	Inspektorat Daerah
39	Kecamatan Administrasi	16,472,823,591	Kecamatan Cikole
40	Kecamatan Administrasi	11,878,441,881	Kecamatan Gunung Puyuh
41	Kecamatan Administrasi	13,110,828,802	Kecamatan Citamiang
42	Kecamatan Administrasi	13,559,960,550	Kecamatan Warudoyong
43	Kecamatan Administrasi	10,429,461,093	Kecamatan Baros
44	Kecamatan Administrasi	12,975,274,559	Kecamatan Lembur Situ
45	Kecamatan Administrasi	11,989,843,210	Kecamatan Cibeureum
46	Kesatuan Bangsa Dan Politik	8,769,543,425	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah		1,304,473,870,349	

Sumber : Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi

Konsistensi perencanaan bukan dilihat dari pagu anggaran, karena proses penetapan pagu anggaran tentu melalui mekanisme yang cukup ketat yaitu verifikasi dan kemampuan anggaran. Maka untuk melihat konsistensi antar dokumen perencanaan, salah satu variable nya adalah dengan melihat dari program apa yang telah dituangkan dalam RPJMD dan mana yang dilaksanakan pada dokumen RKPD.

Berikut disampaikan sinkronisasi program RPJMD dan RKPD yang dipergunakan pada Tahun 2026.

Tabel 5. 3 Keselarasan Program Pembangunan RPJMD dan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN	PROGRAM RPJMD	PROGRAM RKPD
1	Disdikbud		
	PENDIDIKAN		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum	Program Pengembangan Kurikulum
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Program Pengendalian Perizinan Kependidikan	Program Pengendalian Perizinan Kependidikan
		Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
	KEBUDAYAAN		
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		Program Pengelolaan Permuseuman	Program Pengelolaan Permuseuman
		Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
		Program Pembinaan Sejarah	Program Pembinaan Sejarah

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN	PROGRAM RPJMD	PROGRAM RKPD
2	Dinkes		
	KESEHATAN		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3	DPUTR		
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN	PROGRAM RPJMD	PROGRAM RKPD
		Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan
		Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
	PERTANAHAN		
		Program Penatagunaan Tanah	Program Penatagunaan Tanah
4	Satpol PP Damkar		
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
5	BPBD		

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN	PROGRAM RPJMD	PROGRAM RKPD
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
		Program`Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program`Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
6	Dinsos		
	SOSIAL		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan
		Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
7	Disnaker		
	TENAGA KERJA		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN	PROGRAM RPJMD	PROGRAM RKPD
		Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
8	Dalduk KB PPA		
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
		Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan
		Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Program Pemenuhan Hak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk
9	DKP3		
	PANGAN		

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN	PROGRAM RPJMD	PROGRAM RKPD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan
	KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
	PERTANIAN		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Program Penyuluh Pertanian	Program Penyuluh Pertanian
10	DLH		
	LINGKUNGAN HIDUP		

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN	PROGRAM RPJMD	PROGRAM RKPD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
11	Disdukcapil		
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN	PROGRAM RPJMD	PROGRAM RKPD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk
		Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
12	Dishub		
	PERHUBUNGAN		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
13	Diskominfo		
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	STATISTIK		
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	PERSANDIAN		
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
14	Diskumindag		

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN	PROGRAM RPJMD	PROGRAM RKPD
	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
	PERDAGANGAN		
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
		Program Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor
	PERINDUSTRIAN		

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN	PROGRAM RPJMD	PROGRAM RKPD
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
15	DPMPTSP		
	PENANAMAN MODAL		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
16	Disporapar		
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN	PROGRAM RPJMD	PROGRAM RKPD
	PARIWISATA		
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
17	Dispusipda		
	PERPUSTAKAAN		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
	KEARSIPAN	Program Pengelolaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
18	Setda		
	SEKRETARIAT DAERAH		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan
19	Setwan		
	SEKRETARIAT DPRD		

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN	PROGRAM RPJMD	PROGRAM RKPD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
20	Bappeda		
	PERENCANAAN		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	PENELITIAN		
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
21	BPKPD		
	KEUANGAN		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
22	BKPSDM		
	KEPEGAWAIAN DAERAH		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN	PROGRAM RPJMD	PROGRAM RKPD
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
23	Inspektorat		
	INSPEKTORAT DAERAH		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
24	Kesbangpol		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		Program Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN	PROGRAM RPJMD	PROGRAM RKPD
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
25	KECAMATAN WARUDOYONG		
	KEWILAYAHAN		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
26	KECAMATAN BAROS		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
27	KECAMATAN GUNUNG PUYUH		

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN	PROGRAM RPJMD	PROGRAM RKPD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
28	KECAMATAN CIBEUREUM		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
29	KECAMATAN CITAMIANG		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN	PROGRAM RPJMD	PROGRAM RKPD
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
30	KECAMATAN CIKOLE		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
31	KECAMATAN LEMBURSITU		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sumber: Hasil Analisis Bappeda

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh program RKPD merupakan program yang sudah direncanakan di RPJMD dan sebaliknya bahwa seluruh program RPJMD telah dilaksanakan melalui RKPD Tahun 2026.

Penyusunan pagu anggaran pada Perubahan RKPD Tahun 2026 sangat mempertimbangkan prioritas pembangunan dan program prioritas yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2025-2029, Dari hasil analisis yang dilakukan, maka didapatkan data bahwa pagu anggaran RKPD Tahun 2026 yang mendukung pencapaian lima prioritas pembangunan dan indikator kinerja utama kepala daerah adalah sebesar Rp, 125,892,059,537,- atau sekitar 10,6 % dari total belanja RKPD yang tersebar di berbagai perangkat daerah pengampu, Lebih jelasnya rincian pagu anggaran tersebut seperti tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 4 Rekapitulasi Anggaran Pada RKPD Tahun 2026 Berdasarkan Prioritas Pembangunan dan Pencapaian IKU Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)		4,142,979,567	BPKPD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4,142,979,567	
2	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat		69,553,959,598	
		Program Pengelolaan Pendidikan	14,721,807,000	Disdikbud
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	49,685,477,598	Dinkes
		Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	5,146,675,000	Dinkes
3	Penciptaan Lapangan Kerja		543,098,500	
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	487,071,000	Disnaker
		Program Penempatan Tenaga Kerja	56,027,500	Disnaker
4	Penataan Kota		36,729,606,351	
		Program Penyelenggaraan Jalan	20,769,662,773	DPUTR

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2,447,347,600	DISHUB
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	563,000,000	DPUTR
		Program Kawasan Permukiman	2,911,094,000	DPUTR
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	3,296,760,468	DPUTR
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2,640,000,000	DPUTR
		Program Pengelolaan Persampahan	3,151,741,510	DLH
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	950,000,000	DPUTR
5	Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan		14,922,415,521	
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	10,475,813,321	Setda
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2,757,737,200	Kesbangpol
		Program Pengembangan Kebudayaan	127,889,000	Disdikbud
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	58,918,100	Dalduk KB PPA
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	85,000,000	Dalduk KB PPA
		Program Pemenuhan Hak Anak	37,298,250	Dalduk KB PPA
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,379,759,650	Disporapar
Jumlah			125,892,059,537	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda

Usulan dan program strategis Tahun 2026 diprioritaskan untuk menjaga keberlangsungan program seperti Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW), Honor Ketua RT-RW, BPJS Tenaga Kerja untuk Ketua RT, Ketua RW, Anggota Linmas dan Kader, Termasuk didalamnya penanganan kekumuhan dan *stunting*, Sementara usulan masyarakat melalui Musrenbang Kelurahan Tahun 2026 prioritas untuk 5 usulan fisik, 5 usulan non fisik, sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat melalui Dana Kelurahan serta inovasi, Untuk strategi percepatan penurunan *stunting* dilakukan melalui konvergensi 3F (3 Fokus), yaitu: Fokus Lokasi (Kelurahan), Fokus Intervensi Aksi (Sensitif dan Spesifik), dan Fokus Kelompok Sasaran (1000 Hari Pertama Kehidupan).

Pendapatan Kota Sukabumi masihlah sangat terbatas, dan sebagian besar masih mengandalkan dana transfer dari Provinsi maupun pusat, Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan strategi pembiayaan pembangunan melalui sumber lain yang sah secara ketentuan yang berlaku, Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan meminta dukungan pembiayaan Non APBD melalui program CSR *(Corporate Social Responcibility)* atau TJSLP (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan),

Selain itu, tahun 2026 rencana pembiayaan Non APBD bersumber CSR akan difokuskan pada penanganan masalah persampahan dan lingkungan hidup, Pemerintah Kota akan mengundang semua perusahaan yang telah terdaftar dan akan di paparkan proposal untuk penanggulangan sampah untuk dapat menggugah seluruh perusahaan untuk memberikan pembiayaan CSR dalam program tersebut.

Program yang akan diluncurkan untuk bisa didanai dari dukungan pembiayaan Non APBD khususnya CSR adalah berupa:

1) Pengadaan Gerobak Sampah di seluruh RW di Kota Sukabumi
2) Pengadaan Motor Sampah (Mosam) untuk 33 Kelurahan
3) Pengadaan Mobil/Truck Sampah
4) Sosialisasi dan kampanye gerakan memilah sampah dalam rangka *sirkular economy*
5) Penghargaan kepada masyarakat/kelompok masyarakat peduli sampah
6) Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik.

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Secara umum program prioritas terkait erat dengan upaya pencapaian sasaran daerah, dimana sasaran daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai, Sasaran dijabarkan ke dalam indikator sasaran, yang dijabarkan kembali melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah, Dengan demikian, maka diharapkan sasaran daerah yang telah ditetapkan dapat dicapai dari akumulasi output setiap pelaksanaan sub kegiatan yang mendukung pencapaian output kegiatan serta selanjutnya mendukung pencapaian outcome program yang sudah ditentukan dalam dokumen perencanaan lima tahunan serta diterjemahkan dalam dokumen perencanaan tahunan,

Daftar kegiatan prioritas Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2026 disajikan dalam bentuk Matriks Rencana Kerja Tahunan (RKT) menurut kelompok Perangkat Daerah serta berdasarkan urusan yang diampunya pada Dokumen RKPD Perubahan Kota Sukabumi Tahun 2026 atau Buku II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2026 ini.

BAB VI
PENUTUP

Perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka Ekonomi Daerah, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, rencana program dan kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD yang memuat kegiatan lanjutan, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan Pembangunan Daerah melalui program-program Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang merupakan tahun pertama pelaksanaanya.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak terkait, maka perlu dirumuskan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagai acuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, berupa program/kegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
2. Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagai landasan penyusunan Perubahan KUA-PPAS sebagai pedoman penyusunan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2026;

Akhirnya semoga perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026 ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Semoga seluruh pihak yang terkait dapat berkontribusi aktif dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pelaksanasan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan pemantapan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing daerah.

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI